

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

Drs. ASRIL UMAGAP

NIM. 016762681

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013**

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tual, 21 Januari 2013
Yang Menyatakan,



(Drs. ASRIL UMAGAP)
NIM. 016762681

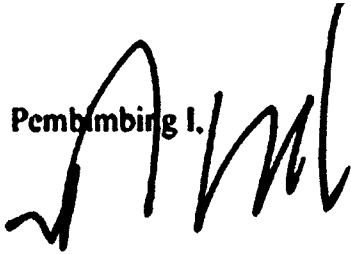
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara

Penyusun TAPM : Drs. Asril Umagap
NIM : 016762681
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal : 21 Januari 2013

Menyetujui :

Pembimbing I.



Prof. Dr. Rakhmat, Drs. MS
 NIP. 196305201987021002

Pembimbing II.



Dewi A. Padmo Putri, M.A., Ph.D
 NIP. 196107241987012001

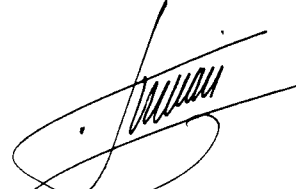
Mengetahui,

**Ketua Bidang Ilmu/Program
 Magister Administrasi Publik**



Florentina R. Wulandari, SIP., M.Si
 NIP. 197106091998022001

Direktur Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc, Ph.D
 NIP. 195202131985032001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Drs. Asril Umagap
NIM : 016762681
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara

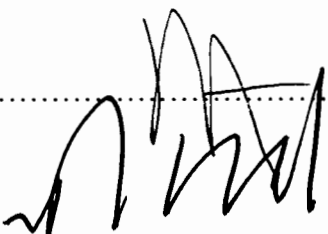
Telah dipertahankan di hadapan Sidang Komisi Penguji TAPM Program Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka pada:


Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Juni 2013
W a k t u : Pukul 09.00 – 11.00 WIT

dan telah dinyatakan LULUS

KOMISI PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji :
Suciati, M.Sc, Ph.D 

Penguji Ahli :
Prof. Dr. Mukhlis Hamdi, M.Si 

Pembimbing I :
Prof. Dr. Rakhmat, Drs, MS 

Pembimbing II :
Dewi A. Padmo Putri, M.A., Ph.D

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

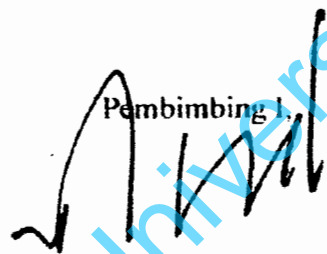
LEMBAR LAYAK UJI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kami selaku pembimbing TAPM dari Mahasiswa,

Nama/NIM : Drs. Asril Umagap / 016762681
Judul TAPM : Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah/~~baru~~ selesai sekitar ~~100~~ % sehingga dinyatakan ~~sudah layak uji/~~belum layak uji~~~~ dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

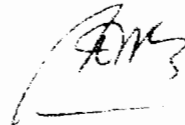
Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.


Pembimbing I.

Prof. Dr. Rakhmat, Drs, MS
NIP. 196305201987021002

Tual, 21 Januari 2013

Pembimbing II.



Dewi A. Padmo Putri, M.A., Ph.D
NIP. 196107241987012001

ABSTRACT
Strategy Tourism Development in Southeast Maluku Regency

Asril Umagap
Universitas Terbuka
umagap_asril@yahoo.com

Keywords: Strategy, Tourism Development, SWOT Analysis

This research directing to (1) identify the internal and external factors in the development of tourism in Southeast Maluku Regency, (2) identify the key success factors of tourism development in Southeast Maluku Regency, and (3) formulate a strategy of tourism development in Southeast Maluku Regency.

This research is a qualitative research with descriptive method for the purpose of this research will provide a picture or describe a systematic, factual and accurate view of the object to be studied and put forward a development strategy as a recommendation for Local Government. The respondents of this research is the Head of Culture, Tourism, Youth and Sports, Head and Head of the Department of Culture, Tourism, Youth and Sports of Southeast Maluku Regency, tourism businesses, attractions manager, people around the attractions, cultural and community components at the sites expected to provide information related to the development of tourism in Southeast Maluku Regency. Instruments used in the research were interview and observation. Data were analyzed by using SWOT analysis.

Tourism development strategy derived from the results of the SWOT analysis is divided into 2 (two) parts namely focus strategy which basically can be named as the stability or the rationalization strategies and support strategies that can basically be named as an expansion strategy, diversification strategy, and the strategy of defensive or survival. Focus on strategies gained some development strategies are: facilitation of the establishment of the Tourism Promotion Agency of Southeast Maluku district by the Local Government and set in a decision to support the Regional Head imaging marine and cultural tourism in Southeast Maluku regency national and international level and facilitation through the provision of the Local Government regulations support the creation of a conducive investment climate in the field of tourism. Gained some support on strategy development strategies include: optimizing the potential of maritime art and culture in order to increase tourist visits, the arrangement of objects and owned tourist attraction in order to realize investments in a number of attractions and open networks (networking) with the main destinations in Indonesia (Jakarta, Bali, Yogyakarta, Manado) in order to introduce the potential of art and culture and a unique social Kei and awake.

ABSTRAK
Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara

Asril Umagap
Universitas Terbuka
umagap_asril@yahoo.com

Kata Kunci: Strategi, Pengembangan Pariwisata, Analisis SWOT

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara, (2) mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara, dan (3) merumuskan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan maksud hasil penelitian ini akan memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang akan diteliti dan mengajukan sebuah strategi pengembangan sebagai bahan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah. Responden penelitian ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, pelaku usaha pariwisata, pengelola objek wisata, masyarakat di sekitar objek wisata, budayawan dan komponen masyarakat yang ditemukan di lokasi penelitian yang diperkirakan dapat memberikan informasi terkait perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Maluku Tenggara. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT.

Strategi pengembangan wisata yang diperoleh dari hasil analisis SWOT terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu strategi fokus yang pada dasarnya dapat dinamai sebagai strategi stabilitas atau rasionalisasi dan strategi pendukung yang pada dasarnya dapat dinamai sebagai strategi ekspansi, strategi diversifikasi, dan strategi defensif atau survival. Pada strategi fokus diperoleh beberapa strategi pengembangan yaitu: fasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara oleh Pemerintah Daerah dan menetapkan dalam sebuah Keputusan Kepala Daerah guna mendukung pencitraan wisata bahari dan budaya Kabupaten Maluku Tenggara di tingkat nasional maupun mancanegara dan fasilitasi Pemerintah Daerah melalui penyediaan regulasi yang mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di bidang pariwisata. Pada strategi pendukung diperoleh beberapa strategi pengembangan antara lain: mengoptimalkan potensi bahari dan seni budaya guna meningkatkan kunjungan wisatawan, penataan obyek dan daya tarik wisata yang dimiliki guna mewujudkan investasi di sejumlah obyek wisata dan membuka jaringan (*networking*) dengan destinasi utama di Indonesia (Jakarta, Bali, Jogja, Manado) agar dapat memperkenalkan potensi seni budaya dan sosial masyarakat Kei yang unik dan terjaga.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, karena atas petunjuk, rahmat, dan hidayahNya, TAPM dengan judul **“Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara”** dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains untuk Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya TAPM ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D, selaku Rektor Universitas Terbuka;
2. Ibu Suciati, M.Sc, Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
3. Bapak Drs. C. B. Supartomo, M.Si, Kepala UPBJJ-UT Ambon, selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
4. Bapak Prof. Dr. Rakhmat, Drs, MS, dan Ibu Dewi Artati Padmo Putri, M.A., Ph.D, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan banyak waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran guna membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk berharga hingga selesainya penyusunan TAPM ini.
5. Bapak Prof. Mukhlis Hamdi, M.Si, selaku Penguji Ahli pada Ujian Sidang TAPM Program Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi

Publik, yang telah berkenan memberikan catatan, saran dan arahan perbaikan demi kesempurnaan TAPM ini.

6. Ibu Florentina R. Wulandari, SIP., M.Si, Kabid Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, selaku penanggung jawab Program Magister Administrasi Publik;
7. Bapak saya, Drs. Manan Umagap (Alm) dan Ibu Saya Saadia Bin Taher, yang telah mendidik saya dengan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan dan kedisiplinan yang tinggi, yang telah saya rasakan begitu bermakna bagi kehidupan saya hingga saat ini. Kakak dan adik-adik saya Halija Umagap, Johra Umagap, Asma Umagap, Asman Umagap, Eka Santi Umagap, yang tiada henti-hentinya menyemangati dan mendoakan saya demi keberhasilan menempuh pendidikan di Universitas Terbuka;
8. Istriku tercinta, Jeny Mandak, S.Pi, atas segala pengertian, keikhlasan, dan kesabaran yang tiada batasnya dalam mendampingi saya dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab, menjadi pendamping dalam melewati masa pendidikan yang penuh dengan tantangan. Ketiga Putraku yang sangat saya cintai dan banggakan, Ardha Umagap, Ay Umagap, dan Athar Umagap. Karena kalian, saya semakin terinspirasi dan termotivasi untuk melakukan yang terbaik bagi keluarga dan semakin optimis dalam menyelesaikan pendidikan ini;
9. Mama Darma Djen, yang tiada kenal lelahnya membantu menjaga dan merawat dengan tulus dan sabar anakku Athar Umagap, hingga saya mampu melewati masa pendidikan ini;

10. Rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik UPBJJ-UT Ambon domisili Tual-Maluku Tenggara atas semua kerjasama dan pengertian baiknya selama menempuh pendidikan ini;
11. Segenap pihak yang tak dapat saya sebutkan satu demi satu yang juga telah memberikan andil yang besar bagi kesuksesan penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Terbuka ini.

Akhirnya saya berdoa kiranya semua budi baik yang telah diberikan mendapat balasan pahala yang setinggi-tingginya dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap semoga keberadaan TAPM ini dapat bermanfaat bagi pembaca terutama kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai bahan masukan untuk pengkajian lebih lanjut. Terima kasih.

Tual, 21 Januari 2013

Penulis

Drs. Asril Umagap
NIM. 016762681

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Pernyataan Orisinalitas	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Lembar Layak Uji	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Bagan	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Konsep Strategi	11
B. Konsep Pengembangan Pariwisata	22
C. Pariwisata dalam Perspektif Administrasi Publik	29
D. Kerangka Berpikir	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Desain Penelitian	39
B. Subyek Penelitian/Narasumber/Responden	40
C. Instrumen Penelitian	41
D. Prosedur Pengumpulan Data	43
E. Metode Analisis Data	44

BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN	48
	A. Gambaran Umum Kabupaten Maluku Tenggara	48
	B. Kondisi Kepariwisataaan Kabupaten Maluku Tenggara	53
	C. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara	81
	D. Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara	99
	E. Rumusan Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara	100
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	106
	A. Simpulan	106
	B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN		
1.	Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang Tertuang dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008-2013	115
2.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pariwisata dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2013	117
3.	Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Maluku Tenggara	119
4.	Pedoman Wawancara	125
5.	Transkrip Hasil Wawancara	129
6.	Pedoman Observasi	144
7.	Lembar Hasil Observasi	145
8.	Surat Keterangan Kepala UPBJJ-UT Ambon No.	

	813/UN31.51/LL/2012, Tanggal 10 Oktober 2012 tentang Surat Keterangan Pengumpulan Data dan Informasi Penelitian	150
9.	Surat Izin Penelitian Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 070/148.a/SIP/ BKBPPM/2012, tanggal 17 Oktober 2012.....	152
10.	Surat Keterangan Selesai Penelitian Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 070/184.a/SK.P/BKBPPM/2012, tanggal 13 Nopember 2012	153
11.	Biodata Peneliti	154
12.	Peta Potensi Wisata Kabupaten Maluku Tenggara	155

Universitas Terbuka

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	38
Bagan 3.1 Matrik SWOT.....	45
Bagan 4.1 Matriks SWOT Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara	102

Universitas Terbuka

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011	53
Tabel 4.2 Nama-nama Situs Sejarah di Kabupaten Maluku Tenggara	69
Tabel 4.3 Rekapitulasi ODTW di Kabupaten Maluku Tenggara	78
Tabel 4.4 Kondisi Keberadaan Usaha Akomodasi di Kabupaten Maluku Tenggara	79
Tabel 4.5 Kondisi Keberadaan Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata di Kabupaten Maluku Tenggara	80
Tabel 4.6 Kontribusi Sektor Pariwisata bagi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008 sampai dengan Bulan September 2012	90
Tabel 4.7 Faktor-faktor Kunci Keberhasilan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara	100
Tabel 4.8 Formulasi Strategi SWOT Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara	102

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang Tertuang dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008-2013	115
Lampiran 2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pariwisata dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2013	117
Lampiran 3	Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Maluku Tenggara	119
Lampiran 4	Pedoman Wawancara	125
Lampiran 5	Transkrip Hasil Wawancara	129
Lampiran 6	Pedoman Observasi	144
Lampiran 7	Lembar Hasil Observasi	145
Lampiran 8	Surat Keterangan Kepala UPBJJ-UT Ambon No. 813/UN31.51/LL/2012, Tanggal 10 Oktober 2012 tentang Surat Keterangan Pengumpulan Data dan Informasi Penelitian	150
Lampiran 9	Surat Izin Penelitian Kepala Badan Kesbangpo l& Linmas Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 070/148.a/SIP/ BKBPPM/2012, tanggal 17 Oktober 2012	152
Lampiran 10	Surat Keterangan Selesai Penelitian Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 070/184.a/SK.P/BKBPPM/2012, tanggal 13 Nopember 2012	153
Lampiran 11	Biodata Peneliti	154
Lampiran 12	Peta Potensi Wisata Kabupaten Maluku Tenggara	155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melalui kerangka pembangunan nasional, sektor pariwisata telah di tempatkan sebagai sektor andalan dan menempati posisi yang semakin penting sebagai penyerap tenaga kerja dan penyumbang devisa bagi negara. Sektor ini diharapkan dapat menggantikan peran minyak dan gas bumi yang semakin menipis dalam menopang laju pembangunan. Diharapkan pula dapat mengembalikan tingkat pertumbuhan ekonomi setelah terjadinya krisis multidimensional yang melanda Indonesia. Harapan ini tidaklah berlebihan, mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan keragaman budaya serta tradisi. Sektor pariwisata dipandang mampu mengakselerasikan perkembangan sektor lain sebagai penunjangnya, dengan demikian sektor pariwisata menjadi sektor andalan dalam perekonomian nasional.

Pariwisata merupakan kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek atau segi yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja.

Pariwisata merupakan salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta mendorong sektor-sektor produktivitas lainnya (Wahab, 1997). Pentingnya keberadaan sektor pariwisata

ditegaskan oleh Utama (2011) bukan hanya sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu Negara namun memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu Negara. Menurut IUOTO (*International Union of Official Travel Organization*) yang dikutip oleh Spillane (dalam Utama, 2011), terdapat delapan alasan utama dikembangkannya pariwisata oleh setiap negara yaitu: (1) Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi nasional maupun internasional. (2) Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya. (3) Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi. (4) Pemerataan kesejahteraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinasi. (5) Penghasil devisa. (6) Pemicu perdagangan internasional. (7) Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk jiwa hospitality yang handal dan santun, dan (8) Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga aneka ragam produk terus berkembang, seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu destinasi.

Perkembangan pariwisata akan memberi dampak positif bagi pendapatan masyarakat seiring meningkatnya kunjungan wisatawan. pendapatan daerah setempat karena adanya pemasukan bagi kas daerah dari pungutan pajak dan retribusi, meningkatnya permintaan hasil daerah setempat berupa barang-barang kerajinan maupun barang-barang yang khas dari suatu daerah (Karyono, 1997). Sinclair (1998) dalam sebuah surveynya tentang "*Tourism and economic development*" mengungkap bahwa pariwisata berkontribusi dalam pembangunan

suatu tempat tujuan wisata/destinasi, diantaranya masuknya mata uang asing, meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja.

Sementara itu semakin pentingnya sektor pariwisata bagi banyak negara menyebabkan persaingan di tingkat internasional semakin ketat, karena itu daerah-daerah tujuan wisata dituntut untuk dapat mengembangkan produk wisata yang berkualitas. Tanpa adanya produk wisata yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan pariwisata baru maka dapat dipastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan tidak dapat berkompetisi di tingkat global. Asumsi yang mendasari hal ini adalah bahwa setiap daerah tujuan wisata tentu memiliki ciri wilayah yang khas dengan potensi pariwisata unggulan didalamnya yang tentu saja memiliki ketidaksamaan dengan daerah tujuan wisata lainnya, sehingga persaingan menjadi kondisi yang tidak dapat terelakkan.

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, memberikan konsekuensi pada pemerintah daerah untuk sepenuhnya melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan di daerah masing-masing. Peran penting pemerintah daerah dalam hal ini lembaga eksekutif dan legislatif sebagai pelaksana dan pengawas jalannya pemerintahan sangat diharapkan, terutama dalam pengambilan kebijakan di berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata harus dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi daerah dan masyarakat yang semua ini dapat diwujudkannyatakan melalui pengembangan kepariwisataan.

Sehubungan dengan pengembangan kepariwisataan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09

Tahun 1999 tentang Kepariwisata yang didalamnya menyebutkan tujuan kepariwisataan untuk: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, b) meningkatkan kesejahteraan rakyat, c) menghapus kemiskinan, d) mengatasi pengangguran, e) melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, f) memajukan kebudayaan, g) mengangkat citra bangsa, h) memupuk rasa cinta tanah air, i) memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan j) mempererat persahabatan antarbangsa. Undang-Undang ini merupakan sebuah produk kebijakan publik yang menunjukkan kepedulian dan keseriusan pemerintah agar pelaksanaan pembangunan kepariwisataan dapat lebih mendorong pemerataan kesempatan berusaha, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang dan menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, agar program pengembangan pariwisata terlaksana dengan baik diantaranya perlu ada koordinasi antar sektor terkait. Yoeti (1997) berpendapat bahwa koordinasi perencanaan fisik daerah dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan menjadi keharusan karena pembangunan kepariwisataan sangat tergantung dari dukungan sektor-sektor lainnya yang memiliki keterkaitan dengan bidang kepariwisataan.

Keserasian kegiatan antar sektor dalam pengembangan pariwisata perlu diciptakan agar tidak terjadi ketimpangan kepentingan yang selanjutnya dapat menimbulkan kerugian terhadap lingkungan sosial. Pengembangan pariwisata menurut Prajogo (1976) perlu didahului dengan perencanaan secara menyeluruh, terintegrasi dengan sektor lain, terarah, sebagai sarana untuk memelihara

kekayaan budaya, lingkungan alam dan peninggalan sejarah, menghasilkan perubahan-perubahan sosial yang positif, dilakukan sesuai kemampuan dan terus menerus dilakukan monitoring.

Pengembangan pariwisata yang baik selain berorientasi pada peningkatan pendapatan bagi destinasi pariwisata dan peningkatan taraf hidup juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Pengembangan pariwisata yang baik akan memberikan manfaat bagi destinasi pariwisata, sekaligus memberikan penghargaan terhadap adat isitiadat dan budaya setempat. Hal ini merupakan keharusan mengingat pariwisata negara ini sangat bertumpu pada alam dan budaya. Kehancuran alam dan budaya yang dimiliki akan berdampak sangat besar terhadap pariwisata. Pengembangan daerah pariwisata membutuhkan biaya yang cukup besar dan perencanaan yang matang agar dapat mencapai hasil yang optimal (Yoeti, 1997).

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008-2013. Visi, misi, tujuan, sasaran ini dijabarkan dalam visi, misi, tujuan, sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara. Visi, misi, tujuan, sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam strategi yakni pengembangan produk wisata, penguasaan pasar pariwisata lokal, domestik dan mancanegara, penciptaan iklim investasi yang kondusif, pengembangan sumber daya manusia aparatur, pelaku usaha wisata dan

masyarakat, pemberdayaan masyarakat pariwisata, serta pemeliharaan, pembinaan, pelestarian, dan pemanfaatan kebudayaan daerah.

Kabupaten Maluku Tenggara memang memiliki banyak obyek wisata yang menarik untuk dikembangkan, yakni wisata alam seperti pantai Ngurbloat di Desa Ngilingof, pantai Ngursarnadan di Desa Ohoililir, pantai Nadiun Ohoidertawun di Desa Ohoidertawun, pemandian alam Evu di Desa Evu, Goa Hawang di Desa Letvuan, Air terjun Kasair di Frawaf, wisata sejarah seperti Desa Wisata sejarah Banda Ely, Meriam Portugis di Desa Ohoiwait, situs sejarah Nen Dit Sakmas, situs sejarah Sirian Sirien, Desa Adat Tanimbar Kei, Wisata religi seperti Taman Ziarah Bukit Masbait di Desa Kelanit, Taman Ziarah Uskup Johannes Aerts di Desa Langgur, agro wisata salak, tempat permainan anak-anak. Selain itu, daerah ini juga memiliki potensi budaya yang dapat dikemas sebagai atraksi wisata seni dan budaya seperti tari sawat, tari katar, tari sosoi yirik, juga berbagai jenis lagu adat seperti Ngel-ngel, Wawar, Atnanit, Baut. dan masih banyak lagi lainnya. Namun dilihat dari jumlah wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara masih sangat sedikit. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011, tercatat jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara pada tahun 2008 masing-masing sebanyak 9.831 orang dan 246 orang, pada tahun 2009 masing-masing sebanyak 10.123 orang dan 383 orang, pada tahun 2010 masing-masing sebanyak 10.256 orang dan 504 orang. Adapun pada tahun 2011 tercatat jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara masing-masing sebanyak 10.321 orang dan 603 orang. Sedangkan target jumlah kunjungan wisatawan

nusantara dan mancanegara pada tahun 2013 sesuai RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008-2013 masing-masing sebanyak 35.000 orang dan 1000 orang.

Potensi pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara yang sangat besar dan mempunyai prospek sangat cerah tersebut juga belum mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah maupun peningkatan taraf hidup masyarakat setempat. Hal ini tidak selaras dengan kebijakan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola potensi pariwisata. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai kewajiban untuk mengembangkan segala potensi pariwisata yang secara nyata merupakan sumber daya produktif Kabupaten Maluku Tenggara untuk kepentingan daerah dan masyarakat setempat. Pemberian kewenangan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang potensi dan kebutuhan daerahnya. Pengetahuan dan pemahaman tentang potensi pariwisata dan kebutuhan daerah pada sektor ini diharapkan mampu mengembangkan pariwisata di daerah. Hal ini tentunya diikuti dengan berbagai upaya pengelolaan sumber daya pariwisata yang ada secara baik dan benar.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa strategi pengembangan pariwisata telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2013 yakni pengembangan produk wisata, penguasaan pasar pariwisata lokal, domestik dan mancanegara, penciptaan iklim investasi yang kondusif, pengembangan

sumber daya manusia aparatur, pelaku usaha wisata dan masyarakat, pemberdayaan masyarakat pariwisata, serta pemeliharaan, pembinaan, pelestarian, dan pemanfaatan kebudayaan daerah. Artinya, strategi ini telah dijadikan pedoman tindak dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara sejak tahun 2009. Pada kenyataannya, strategi pengembangan pariwisata yang telah ada ini belum mampu menjadikan sektor pariwisata sebagai penyumbang pendapatan daerah dan tumpuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan penetapan sektor pariwisata dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008-2013 sebagai sektor unggulan daerah.

Sesuai informasi awal yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara dan Bidang Penanaman Modal Daerah Bappeda Kabupaten Maluku Tenggara, sejak tahun 2008 hingga kini belum ada investasi yang terjadi pada semua obyek wisata di Kabupaten Maluku Tenggara. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang belum terbentuk dan Asosiasi pariwisata yang belum mapan ditambah dengan tidak tersedianya website pariwisata sebagai media promosi pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara memperjelas bahwa sektor pariwisata di daerah ini belum berkembang. Padahal, dengan perumusan dan penetapan strategi yang tepat dan komprehensif akan mampu mendorong perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah dan terutama masyarakat. Untuk itu perlu adanya suatu kajian yang mendalam mengenai strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara yang

tepat dan komprehensif. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk mencari alternatif strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "**Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara**".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor internal dan eksternal dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara?
2. Apa saja faktor-faktor kunci keberhasilan pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara?
3. Bagaimana rumusan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan permasalahan yang disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Merumuskan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat, baik secara akademis maupun pragmatis. Kegunaan dua aspek itu dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengembangan ilmu administrasi terutama konsep-konsep strategi atau manajemen strategik dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata. Disamping itu juga berguna sebagai salah satu acuan (referensi) bagi peneliti-peneliti lain yang akan melakukan studi serupa.

2. Secara pragmatis

Secara pragmatis penelitian ini diharapkan dapat merekomendasikan berbagai alternatif strategi pengembangan pariwisata sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara khususnya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara dalam merumuskan ulang strategi pengembangan pariwisata yang telah ada. Hal ini menjadi penting mengingat strategi tersebut hingga kini belum mampu menjadikan sektor pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara berkembang secara signifikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Strategi

Strategi sebagaimana dijelaskan LAN RI (2008) merupakan sarana untuk mencapai tujuan melalui seni memadukan atau menginteraksikan antar faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi dalam pencapaiannya yang manfaatnya adalah untuk mengoptimalkan sumber daya unggulan dalam memaksimalkan pencapaian sasaran kinerja. Sedangkan konsep dasar strategi menurut LAN RI (2008) adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan pada berbagai bidang.

Strategi dalam konteks tertentu juga dibedakan dari taktik. Drucker (1990) menjelaskan bahwa strategi adalah jika mengerjakan sesuatu **yang benar** (*doing the right things*), sedangkan pengertian taktik adalah jika mengerjakan sesuatu **dengan benar** (*doing the thing right*). Perbedaan yang paling mudah antara keduanya menurut Wahyudi (1996) adalah strategi memutuskan apa yang seharusnya dikerjakan, sedangkan taktik memutuskan bagaimana sesuatu dikerjakan.

Strategi merupakan sebuah konsep yang komprehensif, karena menyangkut berbagai hal yang berhubungan dengan internal maupun eksternal organisasi. Strategi bersifat fleksibel atau tidak kaku sebab dapat dirumuskan serta diterapkan pada organisasi publik untuk berbagai tingkatan/bagian/aktivitasnya (Nugraha, 2011).

Strategi merupakan pola atau bentuk kebijakan yang ditempuh oleh suatu organisasi yang menggambarkan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi melakukannya (Bryson, 2001). Sementara itu Salusu (2002) menjelaskan strategi sebagai suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya yang ada dalam organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Setiap strategi selalu mempunyai tujuan. Adapun tujuan strategi menurut Koteen (dalam Salusu, 2002) adalah kunci dari arah perubahan masa depan, ia mengarahkan apa yang hendak dikejar di waktu yang akan datang (3-5 tahun), membantu menciptakan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan kemajuan organisasi, dan secara pragmatis sebagai kunci menuju kelangsungan hidup organisasi.

Strategi menurut pandangan Schendel dan Hofer, Higgins (dalam Salusu, 2002) dijelaskan ada 4 tingkatan strategi yang keseluruhannya itu disebut Master Strategi yaitu:

1. *Enterprise Strategy*; yakni suatu strategi yang berkaitan dengan respons masyarakat, dimana organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan merespon keinginan masyarakat dengan pertimbangan-pertimbangan etis.
2. *Corporate Strategy*; yakni suatu strategi yang berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *grand strategi* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi.
3. *Business Strategy*; yakni suatu tingkatan strategi yang bertujuan bagaimana merebut pasaran ditengah masyarakat dengan maksud untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan strategi yang menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik. Dengan kata lain, strategi ini memusatkan perhatian pada keunggulan kompetitif.
4. *Functional Strategy*; yakni suatu strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada 3 jenis strategi ini, yaitu:

- a. Strategi fungsional ekonomi, yakni mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai suatu kesatuan ekonomi yang sehat antara lain berkaitan dengan: keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
- b. Strategi fungsional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, controlling, staffing, motivating, communicating, decision making, representing* dan *integrating*.
- c. Strategi isu stratejik, yakni mengontrol lingkungan baik situasi yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui atau yang selalu berubah (hal. 101-102).

Selain tingkatan strategi, juga dikenal adanya tipe-tipe strategi. Tiap-tiap tipe ini saling menopang sehingga merupakan satu kesatuan yang kokoh. Tipe-tipe yang dimaksud ini menurut Koteen (dalam Salusu, 2002) adalah strategi berikut:

1. *Corporate Strategy* (strategi organisasi); strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif stratejik yang baru.
2. *Program Strategy* (strategi program); strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu. Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi.
3. *Resource Support Strategy* (strategi pendukung sumber daya); strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.
4. *Institutional Strategy* (strategi kelembagaan); fokus dari strategi ini ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik (hal. 105)

Strategi sebagaimana dirumuskan oleh Hax dan Majluf (1991) adalah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu, integral, melibatkan semua unsur organisasi dan menentukan tujuan organisasi berupa sasaran jangka panjang, program dan prioritas alokasi sumber daya, bidang yang digeluti atau akan digeluti serta tanggap terhadap lingkungan eksternal dan internal organisasi.

Dalam perkembangannya konsep mengenai strategi terus berkembang dimana hal tersebut dapat kita lihat dari konsep-konsep strategi yang berkembang saat ini, yang antara lain sebagai berikut (Rangkuti, 1997):

- a) Chandler (1962): Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.
- b) Argyris (1975), Mintzberg (1979), Steiner dan Meiner (1977): Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.
- c) Porter (1985): Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.
- d) Hamel dan Prahalad (1995): Strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan dimasa depan sehingga perencanaan strategis hampir selalu dimulai dari apa yang terjadi (persepsi) bukan dari apa yang dihadapkan (ekspektasi) (hal. 3-4).

Perencanaan strategi yang digunakan oleh kalangan bisnis maupun kalangan penyelenggara pembangunan (pemerintah dan LSM) pada perkembangannya dikemas dalam suatu metode yang saat ini telah dikenal luas yaitu manajemen strategi. Pengintegrasian terminologi strategi dan manajemen, sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari upaya untuk mencapai keberhasilan suatu program dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara utuh, baik perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan (kepemimpinan), pengawasan dan evaluasi kembali.

Manajemen strategi diartikan sebagai suatu cara memimpin organisasi untuk mencapai misi, tujuan dan sasarnya dengan cara meningkatkan kemampuan manajerial, tanggung jawab operasional, sistem administrasi yang baik, yang dapat menghubungkan pengambilan keputusan strategi dengan pengambilan keputusan operasional, pada semua tingkatan hierarki organisasi,

dan pada semua jajaran kewenangan fungsional dalam organisasi (Salusu, 2002). Dengan kata lain manajemen strategi adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien. Sampai kepada implementasi garis terdepan, sedemikian rupa sehingga tujuan dan sarannya tercapai.

Nawawi (2000) menginventarisir 4 (empat) definisi dari manajemen strategik, sebagai berikut:

1. Manajemen strategik adalah proses atau rangkaian kegiatan atau pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan dan cara pelaksanaannya yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.
2. Manajemen strategik adalah usaha manajerial menumbuhkembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasi peluang yang muncul guna mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukannya.
3. Manajemen strategik adalah suatu keputusan dan tindakan yang mengarah pada suatu pengembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang aktif untuk membantu mencapai tujuan organisasi.
4. Manajemen strategik adalah perencanaan berskala besar (perencanaan strategik) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (visi) dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil) (hal. 147-148).

Konsep atau kerangka berpikir manajemen strategik berupaya mencari jalan keluar bagi institusi atau organisasi untuk beradaptasi kembali terhadap perubahan dan tantangan lingkungan melalui pencarian isu atau faktor strategis dengan menggunakan teknik-teknik manajemen, agar kemajuan dapat dipertahankan dengan kinerja yang semakin optimal.

Kegunaan praktis yang diperoleh dari aplikasi teknik-teknik yang dikembangkan oleh manajemen strategis (Bryson, 2001) adalah sebagai berikut:

1. Berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif.
2. Memperjelas arah masa depan.
3. Menciptakan prioritas.

4. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan.
5. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan.
6. Menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang-bidang yang berada dibawah kontrol organisasi.
7. Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi.
8. Memecahkan masalah utama organisasi
9. Memperbaiki kinerja organisasi.
10. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif.
11. Mengembangkan kerja kelompok dan keahlian (hal. 12-13).

Selanjutnya Salusu (2002), mengemukakan manfaat manajemen strategi yaitu sebagai pemberi petunjuk bagi para eksekutif dalam mencoba mempengaruhi dan mengendalikan lingkungan agar tercapai sasaran yang dikehendaki.

Bryson (2001) menyatakan bahwa untuk menerapkan teknik manajemen strategik secara baik dan berhasil, maka harus dipertimbangkan 8 (delapan) langkah pokok berikut ini:

1. Kesepakatan awal terhadap suatu proses manajemen strategik. Untuk itu perlu dilakukan negosiasi dengan para pembuat keputusan (*decision maker*) agar diperoleh dukungan dan komitmen dalam implementasinya kemudian.
2. Mengidentifikasi yang ada, baik yang bersifat formal maupun informal secara jelas dan transparan, karena mandat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan suatu institusi.
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai institusi karena posisinya penting sebagai tujuan bagi kebutuhan sosial atau politik yang akan diraih.
4. Menilai lingkungan eksternal yang menyangkut peluang dan ancaman yang ada. Faktor-faktor yang terkait dengan lingkungan eksternal ini adalah meliputi politik, ekonomi, sosial dan teknologi.
5. Menilai lingkungan internal yang berhubungan dengan kekuatan yang dimiliki maupun kelemahan yang ada. Dalam hal ini institusi dapat memonitori sebagai sumber daya sebagai input, strategis saat ini sebagai konversi, dan kinerja yang diperoleh sebagai output.
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi, antara lain yang menyangkut tujuan, cara, falsafah, lokasi, ketepatan waktu, pihak-pihak (*stakeholder*) yang mendapat keuntungan atau mengalami kerugian jika strategi baru diimplementasikan.
7. Merumuskan strategi baru dan tepat untuk mengelola isu-isu strategi yang ada dan muncul kemudian.

8. Membangun suatu visi institusi yang tepat untuk masa yang akan datang (hal. 55-71).

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam setiap merumuskan suatu strategi secara efektif adalah visi, misi, tujuan/*goal* dan sasaran suatu organisasi. Visi, misi, tujuan/*goal* dan sasaran merupakan satu kesatuan yang utuh dalam mewujudkan tujuan organisasi.

a. Visi

Visi menurut Salusu (2002) merupakan gambaran keadaan atau kondisi masa depan yang belum tampak pada saat ini, tetapi merupakan konsepsi yang dapat dibaca oleh setiap orang. Berarti visi merupakan suatu angan-angan atau cita-cita tentang keadaan yang diinginkan dimasa yang akan datang dan diharapkan lebih baik dari masa sekarang. Selanjutnya Bryson (2001) berpendapat bahwa visi sangat penting bagi suatu organisasi karena dapat memberikan kerangka dasar tentang gambaran organisasi di masa depan.

b. Misi

Misi adalah serangkaian upaya atau tindakan nyata yang ditetapkan untuk dilaksanakan oleh suatu institusi atau organisasi agar dapat merealisasikan visi. Nugraha (2011) menyatakan bahwa misi merupakan serangkaian langkah yang bertujuan untuk mencapai berbagai sasaran jangka pendek organisasi dan rumusannya disusun untuk jangka waktu satu sampai lima tahun.

Misi menurut Mahmudi (2007) menjelaskan jalan yang dipilih untuk mewujudkan masa depan. Adapun pernyataan misi harus bisa mengkomunikasikan esensi dari organisasi kepada semua pemangku kepentingan dan publik.

Secara organisatoris Handoko (1995) mengemukakan bahwa misi organisasi selain menunjukkan fungsi yang hendak dijalankan oleh organisasi dalam suatu sistem sosial dan ekonomi tertentu juga menjelaskan alasan keberadaan institusi atau organisasi, mengapa ia ada dan apa tujuan pendiriannya. Organisasi harus selalu dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan dan alat untuk mengorganisasikan sumberdaya. Mahmudi (2007) mengemukakan bahwa tujuan organisasi merupakan penjabaran visi organisasi dan merupakan arah yang dicapai organisasi secara umum.

c. Tujuan

Tujuan/goal menurut Wahyudi (1996) merupakan suatu pernyataan kualitatif tentang keadaan atau hasil yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Hal ini senada dengan uraian Salusu (2002) bahwa tujuan diartikan sebagai kondisi jangka panjang yang diinginkan, dinyatakan dalam istilah yang umum dan kualitatif, dan mungkin hanya sebagian yang dapat dicapai.

Penetapan tujuan organisasi tidak boleh menyimpang dari visi dan misi organisasi (Mahmudi, 2007). Tujuan organisasi antara lain: meningkatkan profitabilitas, meningkatkan pelayanan, meningkatkan integritas dan moralitas karyawan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan kepuasan pelanggan dan kualitas layanan, dan pelayanan terbaik melalui inovasi dan *on-line leadership* (Mahmudi, 2007).

d. Sasaran

Sasaran adalah batasan masalah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan dan dapat diukur

(Prasojo dkk., 2010). Didalam organisasi dikenal ada sasaran primer dan sasaran sekunder. Sasaran primer ialah yang hendak dicapai organisasi secara umum, sedangkan sasaran sekunder ialah yang dilaksanakan oleh unit-unit kecil dalam organisasi untuk merealisasikan sasaran primer. Selain itu dijelaskan pula bahwa suatu sasaran dikatakan baik bila memenuhi kriteria antara lain: (a) mengandung arti, (b) masuk akal, (c) menantang, (d) spesifik dan dapat diukur, dan (e) konsisten (Salusu, 2002).

Langkah selanjutnya menuju suatu pembuatan strategi suatu organisasi adalah menganalisis lingkungan. Lingkungan adalah salah satu faktor terpenting untuk menunjang keberhasilan suatu organisasi dalam persaingan (Wahyudi, 1996). Lingkungan dapat dibedakan lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah analisis secara internal organisasi dalam rangka menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari suatu organisasi yang ada. Menurut Higgins (1985) kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategik dalam mencapai sasarannya. Sedangkan kelemahan adalah sebaliknya, yakni situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya.

Faktor kekuatan dan kelemahan saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Jika kelemahan yang sangat dominan, ada kemungkinan kekuatan yang dimiliki organisasi berubah menjadi kelemahan. Sebaliknya, kekuatan yang ada dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kelemahan (Salusu, 2002). Dengan demikian proses analisis lingkungan internal merupakan proses yang sangat

penting dan harus dilakukan, karena dengan analisis lingkungan internal maka akan diketahui kekuatan dan kelemahan yang ada (Rangkuti, 1997).

Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang merupakan kekuatan yang berada di luar organisasi. Lingkungan eksternal mengandung dua faktor yaitu peluang dan ancaman. Higgins (1985) mengartikan peluang sebagai situasi dan faktor-faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai atau bahkan dapat melampaui pencapaian sasarannya. Sedangkan ancaman sebaliknya, merupakan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya.

Organisasi yang melakukan analisa lingkungan internal dan eksternal maka organisasi tersebut telah melakukan analisis kekuatan, kelemahan serta analisis peluang dan tantangan atau analisis SWOT (Wahyudi, 1996). Hasil analisa SWOT maka disusunlah suatu strategi untuk mencapai tujuan. Suatu strategi yang disusun selalu diharapkan untuk keberhasilannya. Maka untuk berhasilnya suatu strategi yang disusun dengan meyakinkan, oleh Hatten dan Hatten (dalam Salusu, 2002) memberikan beberapa petunjuk supaya suatu strategi yang dibuat dapat sukses, yaitu:

1. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya, disesuaikan dengan arus perkembangan dalam masyarakat/lingkungan.
2. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi, tetapi disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan, dan strategi yang satu diserasikan atau jangan bertolak belakang dengan strategi yang lain.
3. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain, karena jika terpisah dari unit kerja lainnya akan mengakibatkan kekuatan tidak menyatu akhirnya merugikan posisi organisasi.
4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya, disisi lain memanfaatkan kelemahan pesaing dan membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih kuat.

5. Sumber daya adalah sesuatu yang kritis, sehingga dibuat agar layak dan dapat dilaksanakan.
6. Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar, oleh sebab itu suatu strategi harus dapat selalu dikontrol.
7. Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai, jangan menyusun strategi di atas kegagalan.
8. Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait, dan terutama dari eksekutif, dan dari semua pimpinan unit kerja dalam organisasi (hal. 108-109).

Kotler dan Fox (dalam Yoeti, 2002) mengingatkan perumusan suatu strategi harus berdasarkan dan berpedoman kepada: *Environment analysis*, *Resource Analysis* dan *Goals Formulation Steps*. Dalam perumusan strategi suatu daerah tujuan wisata, dianjurkan dilakukan melalui tiga tingkatan, yaitu: *Pertama*, Analisis terhadap berbagai perusahaan kelompok industri pariwisata yang terdapat di daerah tujuan wisata tersebut. *Kedua*, Penyusunan strategis terkait kebijakan pemerintah daerah tentang pengembangan pariwisata. *Ketiga*, Pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata secara regional menyangkut aksesibilitas, fasilitas, objek dan atraksi wisata dan sarana pendukung lainnya.

Strategi untuk manajemen dan pembangunan jangka panjang wilayah pariwisata sangat diperlukan. Hal ini untuk menjamin agar proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan pada semua tingkat pemerintahan dan sektor swasta terjadi di dalam kerangka kerja yang meminimumkan ketidakpastian, mendorong pembangunan industri pariwisata, serta memadukan peranan pariwisata di dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat di wilayah tersebut (Stimson, 1997). Hal senada diyakinkan oleh Seetanah (2011) yang menyebutkan:

“It is believed that close collaboration of governments with national tourism industry actors at large to support tourism development strategies is required and also that policy makers should adopt sustainable tourism policies for a desirable sustainable tourism as well as economic development” (hal. 304).

B. Konsep Pengembangan Pariwisata

Tersedianya berbagai obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana serta keinginan untuk menggali sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadikan pariwisata di hampir seluruh daerah di Indonesia sebagai prioritas pengembangan. Pariwisata menurut Geriya (1996) merupakan suatu fenomena yang terdiri dari berbagai aspek, seperti ekonomi, teknologi, politik, keagamaan, kebudayaan, ekologi, pertahanan dan keamanan. Melalui pariwisata berkembang keterbukaan dan komunikasi secara lintas budaya maupun antara komponen-komponen lain dalam kerangka hubungan yang bersifat saling mempengaruhi.

Pentingnya pengembangan pariwisata bagi suatu daerah menuntut adanya upaya pengembangan yang terencana secara baik dan terintegrasi dengan seluruh aspek pembangunan di daerah. Hal ini menurut Soemardjan (dalam Spillane, 2001) dilakukan untuk memberikan kerangka kerja kebijaksanaan pemerintah. Selain itu untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural.

Agar pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata mencapai hasil yang optimal perlu ditetapkan sasaran dan arah pengembangannya. Gunn (1979) menetapkan sasaran pengembangan pariwisata pada suatu Daerah Tujuan Wisata yaitu mempersiapkan aksesibilitas, fasilitas dan daya tarik pariwisata untuk meningkatkan kepuasan wisatawan, memberikan keuntungan ekonomis bagi industri pariwisata, melindungi daerah tujuan wisata dari segala bentuk kehancuran dan pencemaran.

Sasaran pengembangan pariwisata menurut Mac Intosh dan Goeldner (dalam Yoeti, 2002) yaitu adalah menyediakan kerangka untuk menjamin terlaksananya pembangunan pariwisata guna meningkatkan standar kehidupan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar proyek pariwisata itu dikembangkan.

Pengembangan pariwisata adalah suatu upaya peningkatan dan pengembangan serta pendayagunaan sumber daya dan potensi nasional agar dapat menjadi kegiatan ekonomi yang handal dalam penerimaan devisa, mendorong pembangunan daerah dan memperluas peluang kerja dan usaha (Yoeti, 2001). Selanjutnya Yoeti mengatakan pengembangan sektor pariwisata adalah dilakukan dengan mengikutsertakan semua lapisan masyarakat selaku penyedia jasa/industri pariwisata maupun sebagai pelaku wisata agar pariwisata dapat menjadi milik masyarakat sehingga manfaat dari kelangsungannya akan lebih terjamin serta harus memperhatikan nilai-nilai agama, tradisi dan norma-norma lain yang hidup dan dianut dikalangan masyarakat tempat kegiatan pariwisata berlangsung (Yoeti, 2001).

Menurut Marpaung (2002), perkembangan kepariwisataan bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat. Bagi warga setempat, pariwisata dapat memberikan kehidupan yang standar melalui keuntungan ekonomi yang didapat dari tempat tujuan wisata.

Adapun arah pembangunan pariwisata Indonesia adalah untuk memperkenalkan kekayaan dan keindahan alam, budaya, serta sejarah perjuangan bangsa bagi masyarakat Indonesia maupun internasional agar diperoleh berbagai manfaat lebih lanjut (Pendit, 1998).

Pembangunan sektor lainnya di daerah dengan memanfaatkan keunggulan pariwisata yang dimiliki secara nyata telah banyak memberikan dampak positif bagi daerah tersebut. Hubungan simbiosis antara pariwisata dan pertanian misalnya, yang lebih dikenal dengan *agritourism* merupakan elemen kunci dari suatu pariwisata lingkungan dan tanggung jawab sosial dalam daerah pedesaan. Hubungan diantara sektor pariwisata dan pertanian mampu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Semuanya ini dapat menjadi peluang bagi penduduk setempat, sebagaimana diungkapkan oleh Kuo (2006) sebagai berikut:

The symbiotic relationship between tourism and agriculture that can be found in agritourism is a key element of an environmentally and socially responsible tourism in rural areas. Rural hospitality offers new employment and income generating opportunities for rural populations, including agritourism as expression and cultural exchange of agricultural practices, artistic heritage and craftsmanship and culinary traditions (hal. 562).

Pengembangan kepariwisataan mempunyai peranan penting sebagaimana tercermin dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.105/UM.001/MKP/2010 tentang Perubahan Pertama atas Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014, yakni:

Meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya (hal. 1).

Pengembangan sektor pariwisata di era otonomi daerah sekarang ini, menurut Armida S. Alisjahbana dalam makalahnya "Pengembangan Pariwisata

Daerah Memasuki Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi” (2009) memerlukan koordinasi dan kerjasama diantara berbagai sektor, mempertimbangkan kepekaan budaya dan lingkungan dan tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan untuk memperoleh devisa, serta dalam kebijakan Pemerintah Daerah didahului dengan analisis lingkungan internal dan eksternal.

Sehubungan dengan pengembangan pariwisata di Indonesia, Swasono (2001) berpendapat bahwa dalam pengembangan pariwisata Indonesia harus didahului dengan pemahaman mengenai berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan pariwisata Indonesia tersebut. Sedikitnya ada tiga tantangan yang dapat dikemukakan, yaitu tidak seiringnya tuntutan dan selera wisatawan dan investor asing di bidang pariwisata dengan tujuan menjaga kelestarian unsur-unsur budaya masyarakat maupun lingkungan alam setempat, nilai tambah ekonomi dari pengembangan pariwisata lebih besar ke tangan investor asing daripada kepada rakyat setempat, dan belum adanya pola pikir yang bersifat timbal balik antara pihak tuan rumah dan pihak tamu.

Dalam pengembangan pariwisata juga terdapat permasalahan-permasalahan. Permasalahan tersebut (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, 2010) adalah:

- (1) belum mampu mendorong upaya mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan rakyat yang tercermin dari semakin menurunnya kontribusi pariwisata terhadap penerimaan PDB dan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2007 dibandingkan dengan kondisinya pada tahun 2004;
- (2) belum optimalnya kesiapan destinasi nasional untuk bersaing di pasar global;
- (3) belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (*information and communication technology/ICT*) sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata;
- (4) masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) pariwisata dalam bersaing di pasar global;
- (5) masih

rendahnya jumlah dan nilai investasi di bidang pariwisata, dan belum optimalnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (*public and private partnership*) (hal. 14).

Isu mengenai pariwisata Indonesia menurut Myra (1997) ialah belum termanfaatkannya sumber daya wisata alam dan budaya yang menarik yang dimiliki oleh provinsi lain di Indonesia diakibatkan masih tingginya konsentrasi kegiatan di provinsi yang paling maju seperti Jakarta, Bali, Yogyakarta dan beberapa tempat lainnya di Jawa, Sumatra Utara dan Sulawesi Selatan serta ketersediaan informasi dan keterjangkauan (aksesibilitas).

Menurut Sudirman (2001), masalah yang terjadi dalam pengembangan pariwisata di era otonomi daerah ini, antara lain:

1. Pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan menentukan kebijakan-kebijakan umum dalam lingkup nasional, tampaknya kurang melakukan usaha-usaha pengembangan pariwisata secara konseptual dalam artian berorientasi pada pola penyebaran wisatawan secara lebih merata ke daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.
2. Perencanaan kebijakan pariwisata sering didesain tidak sesuai dengan fenomena lokal, sifatnya mengarah pada kebijakan makro, sehingga kebijakan nasional sering tidak sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kemajuan pariwisata.
3. Pembangunan dan pengembangan pariwisata pada umumnya didasarkan pada konsep yang kurang tepat, artinya dalam melakukan pembangunan pariwisata bersama pihak investor swasta selalu berorientasi pada keuntungan, sementara masyarakat tidak dilibatkan secara aktif, melainkan hanya menerima nilai residu dari kemaslahatan pariwisata.
4. Belum tertatanya obyek-obyek kunjungan pariwisata, hal ini diakibatkan belum tersedianya mekanistik profil data-data unggulan dan andalan kawasan pariwisata daerah secara regional.
5. Pada umumnya sarana dan prasarana pariwisata lokal dan nasional belum memadai atau kurang memenuhi standar bagi peningkatan pertumbuhan pariwisata di daerah.
6. Kurangnya perhatian pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk mengembangkan nilai-nilai budaya adat istiadat sebagai wacana untuk pengembangan pariwisata termasuk pengembangan karakteristik

komoditi-komoditi spesifik daerah sebagai penunjang daya tarik wisata (hal. 3-4).

Untuk menanggulangi berbagai permasalahan pengembangan pariwisata dalam pelaksanaan otonomi daerah, menurut Nirwandar (2005) perlu dilakukan serangkaian tindakan yang berbasis pada strategi:

- a. Kebijakan fiskal (*Fiscal Policy*) dengan jalan memberikan berbagai kebijakan fiskal bagi pengembangan kepariwisataan di berbagai daerah khususnya di kawasan timur Indonesia, seperti *tax holiday*, pendudukan permodalan, bunga pinjaman yang kompetitif dan sebagainya.
- b. Kebijakan Investasi (*Investment Policy*) melalui penerapan peraturan perundangan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah yang kondusif terhadap pembangunan usaha pariwisata baru maupun pengembangan usaha yang telah ada.
- c. Pengembangan infrastruktur dengan memperbesar aksesibilitas menuju dan dalam destinasi pariwisata melalui pembangunan serta perluasan jaringan jalan, bandara, pelabuhan laut, jaringan telekomunikasi, penyediaan listrik dan air bersih. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan daya saing serta daya tarik dalam penyediaan fasilitas kepariwisataan di suatu daerah tertentu.
- d. Pengembangan SDM melalui peningkatan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat lokal guna mengembangkan kompetensi masyarakat dalam penyediaan barang dan jasa kepariwisataan serta pelayanan bagi wisatawan baik mancanegara maupun nusantara.
- e. Koordinasi Lintas Sektor mengembangkan kemitraan antara seluruh stakeholders pembangunan kepariwisataan melalui upaya koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat, asosiasi/usaha pariwisata, DPR/DPRD, maupun pemerintah (hal. 6-8).

Pengembangan pariwisata di suatu daerah tidak terlepas dari perhatian dan dukungan semua elemen yang terkait didalamnya, baik masyarakat, pengusaha maupun pemerintah daerah dalam bentuk kemitraan yang saling mendukung, memperkuat satu dengan lainnya untuk meningkatkan daya saing pariwisata daerah dan terkelolanya sumber daya alam lestari. Wujud nyata kemitraan dimaksud dapat dituangkan dalam bentuk atau manajemen kolaborasi

(*collaborative management*). Melalui manajemen kolaboratif, menurut Tadjudin (2009) kepentingan-kepentingan seluruh stakeholder dapat diakomodasikan secara adil, dan memandang harkat setiap stakeholder sebagai entitas yang sederajat sesuai dengan tata nilai yang berlaku, dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Borrini-Feyerabend, et al (2000) (dalam Wulandari, et. al., 2011) menyatakan bahwa dalam praktik pengelolaan kolaboratif setidaknya terdapat nilai etik dan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Mengakui perbedaan nilai, kepentingan dan kepedulian para pihak yang terlibat,
- (2) Terbuka bagi berbagai model hak pengelolaan sumber daya alam,
- (3) terciptanya transparansi dan kesetaraan,
- (4) masyarakat sipil mendapatkan peranan dan tanggung jawab yang lebih punya arti,
- (5) memperkuat kapasitas dan keunggulan komparatif dari berbagai aktor kelembagaan yang terlibat,
- (6) menghargai dan mementingkan proses ketimbang hasil,
- (7) Meraih petikan pelajaran melalui kaji ulang terus menerus dan perbaikan pengelolaan sumber daya alam (hal. 36).

Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara dituntut untuk dapat dan terus berkembang. Kegiatan wisata di berbagai daerah sudah mulai dirasakan sebagai kebutuhan. Menyikapi hal ini, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengembangkan segenap potensi wisata yang ada. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara didasarkan pada visi, misi, dan tujuan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008-2013 (Lampiran 1). Selain itu, pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara juga didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2013 (Lampiran 2).

C. Pariwisata dalam Perspektif Administrasi Publik

Peran administrasi publik sangat penting bagi negara. Hal ini nampak dari keseluruhan tugas utama yang diembannya yaitu mengelola semua jenis urusan publik. Pengelolaan urusan publik dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan bagi kepentingan publik. Terpenuhinya kepentingan publik sangat menentukan kestabilan, keutuhan, ketahanan suatu negara, dan sekaligus menunjukkan komitmen eksekutif, legislatif maupun yudikatif terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Administrasi publik menurut O'Sullivan dan Rassel (dalam Irawan, 2010) adalah merupakan bagian dari administrasi secara keseluruhan yang tugas utamanya adalah mengelola semua jenis urusan publik untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dicanangkan, yakni tercapainya kesejahteraan rakyat (publik). Nigro dan Nigro (1970) mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu hubungan kerjasama dalam lingkungan pemerintahan antara kelompok eksekutif, legislatif, dan yudikatif, merupakan sebagian dari proses politik, dan sangat erat kaitannya dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

Administrasi negara atau administrasi publik menurut Pfiffner dan Presthus (dalam Sundarso, dkk, 2009) adalah suatu proses yang bersangkutan dengan implementasi kebijakan pemerintah maupun koordinasi berbagai usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. Pamudji (1981) menyimpulkan ketiga definisi administrasi negara menurut Pfiffner dan Presthus di atas sebagai suatu

proses dalam rangka pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah yang melibatkan beberapa orang dengan berbagai keahlian dan kecakapan.

Adapun administrasi publik menurut Atmosudirdjo (1982) adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Sedangkan menurut Thoha (2011) administrasi publik merupakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan untuk kepentingan masyarakat.

Administrasi publik menurut Perry (dalam Rohman, 2010) terkait diantaranya dengan usaha memperkuat hubungan dengan badan legislatif, badan-badan yang diangkat dan dipilih oleh rakyat, bagaimana menyusun kebijakan dan program sukses, administrasi perpajakan dan anggaran yang efektif, manajemen sumber daya manusia, bagaimana operasi pelayanan publik yang baik.

Administrasi publik menurut Litchfield, Dwight Waldo, Dimock, Dimock dan Koenig, serta Gordon (dalam Syafiie, 1997) adalah seluruh proses pengorganisasian berbagai kelompok maupun perseorangan guna mencapai tujuan pemerintah melalui pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah baik legislatif, eksekutif serta yudikatif.

Perubahan kebutuhan filosofis manusia dalam memahami hakikat dasar dari peranan administrasi publik sebagai fenomena sosial, mencakup pemahaman terhadap pergeseran cara berpikir dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam menghadapi permasalahan publik sangat mempengaruhi studi administrasi publik dalam perkembangannya (Rakhmat, 2009). Menurut Caiden (1982), disiplin administrasi publik pada hakikatnya merupakan suatu disiplin yang menanggapi

masalah-masalah pelaksanaan persoalan-persoalan masyarakat dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat.

Zauhar (1996) menjelaskan administrasi negara/publik sebagai proses kerjasama yang berlaku dalam lingkup organisasi publik untuk memberikan pelayanan publik. Sementara itu, Syafiie (1997), menjelaskan ada tujuh hal khusus dari administrasi publik, yaitu tidak dapat dielakkan, senantiasa mengharapkan ketaatan, mempunyai prioritas, mempunyai pengecualian, puncak pimpinan politik, sulit diukur sehingga kita terlalu banyak berharap dari Administrasi Publik ini.

Pengertian administrasi publik dapat juga ditinjau dari konsep kebijakan publik, yang juga merupakan salah satu objek formasi ilmu administrasi publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, mengatur semua yang ada, tempat lembaga administrator publik mempunyai domain, mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah itu (Nugroho, 2009).

Kebijakan publik menurut Dye adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Sedangkan David Easton memberikan definisi kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat (dalam LAN RI, 2008). Adapun kebijakan publik menurut Chandler & Plano (1988) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap berbagai sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

Seiring berjalannya waktu, Administrasi Publik dalam perkembangannya juga menghadapi berbagai tantangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Cooper (dalam Utomo, 2009), yang menyebutkan adanya berbagai tantangan yang dihadapi oleh Administrasi Publik didalam abad ke 21 yang terdiri dari: *Diversity; Accountability; Privatization; Civil Society; Democracy; Decentralization; Reengineering; The Empowering Effect of High Technology* (hal. 3).

Desentralisasi sebagai salah satu tantangan yang dihadapi oleh Administrasi Publik didalam abad ke 21 telah melahirkan otonomi daerah di Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Nurcholis, 2007). Proses desentralisasi menjadikan urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagian beralih menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah (Rakhmat, 2009). Desentralisasi menimbulkan otonomi daerah, yaitu kebebasan masyarakat yang tinggal di daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingannya yang bersifat lokal bukan nasional. Otonomi daerah adalah konsekuensi logis penerapan asas desentralisasi pada pemerintah daerah (Nurcholis, 2007).

Dalam praktiknya, pemahaman terhadap desentralisasi sangat beragam. Warga daerah pada umumnya mengerti prinsip-prinsip yang terkait dengan otonomi daerah, tetapi mereka memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Pengertian perbedaan ini dikemukakan baik dari jajaran pemerintah setingkat maupun beda tingkat. Dwiyanto (2003) mengemukakan bahwa beragam variasi dalam memahami otonomi daerah diduga juga ada kaitannya dengan pemaknaan terhadap asal-usul otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hal yang dimiliki

daerah karena itu secara otomatis melekat sejak berdirinya daerah tersebut. Konsep otonomi semacam ini berlawanan dengan paham yang menyatakan bahwa daerah tidak memiliki hak otonom karena hak tersebut sesungguhnya baru muncul setelah pusat mendesentralisasikan sebagian kewenangan kepada daerah. Otonomi daerah adalah pemberian pemerintah pusat melalui asas desentralisasi. Paham terakhir inilah yang sering dikaitkan dengan konsep keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Hasibuan (2002) mengemukakan bahwa pemberian otonomi daerah merupakan suatu prasyarat untuk terciptanya suatu pembangunan daerah dan nasional yang berkelanjutan. Tujuan yang hendak dicapai dalam pemberian otonomi daerah adalah terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata berarti bahwa pemberian otonomi kepada daerah adalah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan, dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar. Sedangkan otonomi yang dinamis berarti pemberian otonomi kepada daerah yang didasarkan pada situasi, kondisi dan perkembangan pembangunan. Selanjutnya pengertian otonomi yang bertanggung jawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air tanpa ada pertentangan antara kebijaksanaan yang diberikan oleh pemerintah daerah serta pelaksanaan operasional yang dilaksanakan oleh daerah penerima otonomi sehingga pembangunan daerah merupakan rangkaian pembangunan secara menyeluruh.

Hasibuan (2002) mengatakan bahwa ciri-ciri pembangunan daerah dengan memanfaatkan kewenangan otonomi adalah:

- a. Bahwa pembangunan itu berasal dari ide, aspirasi dan inspirasi masyarakat yang dicetuskan melalui lembaga-lembaga legislatif setempat sebagai aspek politik.
- b. Bahwa pembangunan direncanakan secara relatif tepat dengan kebutuhan dan potensi daerah yang umumnya untuk jangka waktu sedang dan pendek.
- c. Proses pembangunan akan banyak berorientasi dengan mekanisme kedaerahan baik secara fisik maupun secara sosial budaya.
- d. Proses pembangunan dilandaskan kepada peraturan daerah sebagai aspek-aspek legalitas dan berdasarkan aspek hubungan pusat dan daerah sebagai aspek teoritis (hal. 234).

Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia yang didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, telah menimbulkan konsekuensi logis berupa perluasan kewenangan yang signifikan dan berpengaruh bagi praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, tidak terkecuali dengan pembangunan sektor pariwisata.

Secara teoritis, esensi dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri memang diarahkan sebagai wahana untuk mewujudkan peran serta aktif masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal, termasuk dalam mengembangkan pariwisata di daerah. Hakikatnya, pemerintah daerah merupakan sarana bagi warga masyarakat daerah untuk dapat mencapai kesejahteraan hidup (Rakhmat, 2009).

Sektor pariwisata adalah sektor yang penting bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Pariwisata diharapkan memberikan peluang dan akses kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha pendukung pariwisata seperti; toko kerajinan, toko cindramata (souvenir), warung makan dan lain-lain.

Pengembangan usaha pendukung ini bertujuan agar masyarakat lokalnya memperoleh manfaat ekonomi yang lebih banyak dan secara langsung dari wisatawan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya (Subadra, 2006).

Pariwisata dipandang sebagai urusan publik karena besarnya harapan publik (masyarakat) terhadap manfaat yang akan diperoleh dari pengembangan sektor pariwisata ini. Prinsip utamanya adalah bahwa pariwisata hanya mampu bertahan, jika dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya mereka yang bermukim di destinasi pariwisata (Damanik, 2010).

Mengingat pariwisata merupakan urusan publik yang tujuan utama pengembangannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (publik), maka pariwisata menjadi salah satu perhatian penting administrasi publik. Dalam hal ini, berkembangnya pariwisata maupun dampak yang diberikan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Selanjutnya menjadi tugas administrator publik untuk perlu memikirkan apakah suatu kebijakan pemerintah di sektor pariwisata telah berjalan dengan baik, efisien, dan berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah dicanangkan baik berupa peningkatan devisa/PAD, terbukanya kesempatan kerja, terdistribusinya pendapatan, dan lainnya. Jika belum tercapai maka pemerintah perlu mencari strategi pengembangan pariwisata alternatif untuk memantapkan kebijakan tersebut.

D. Kerangka Berpikir

Pengembangan pariwisata di era otonomi daerah menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dan mutlak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku

Tenggara mengingat potensi pariwisata di daerah ini sangat besar dan merupakan sumber daya produktif di daerah. Pengembangan pariwisata dimaksudkan sebagai suatu upaya peningkatan dan pengembangan serta pendayagunaan sumber daya dan potensi nasional agar dapat menjadi kegiatan ekonomi yang handal dalam penerimaan devisa, mendorong pembangunan daerah dan memperluas peluang kerja dan usaha (Yoeti, 2001). Selanjutnya untuk mewujudkan kontribusi pariwisata bagi penerimaan devisa/pendapatan daerah, mendorong pembangunan daerah dan memperluas peluang kerja dan usaha tersebut diperlukan strategi yang tepat dan menyeluruh.

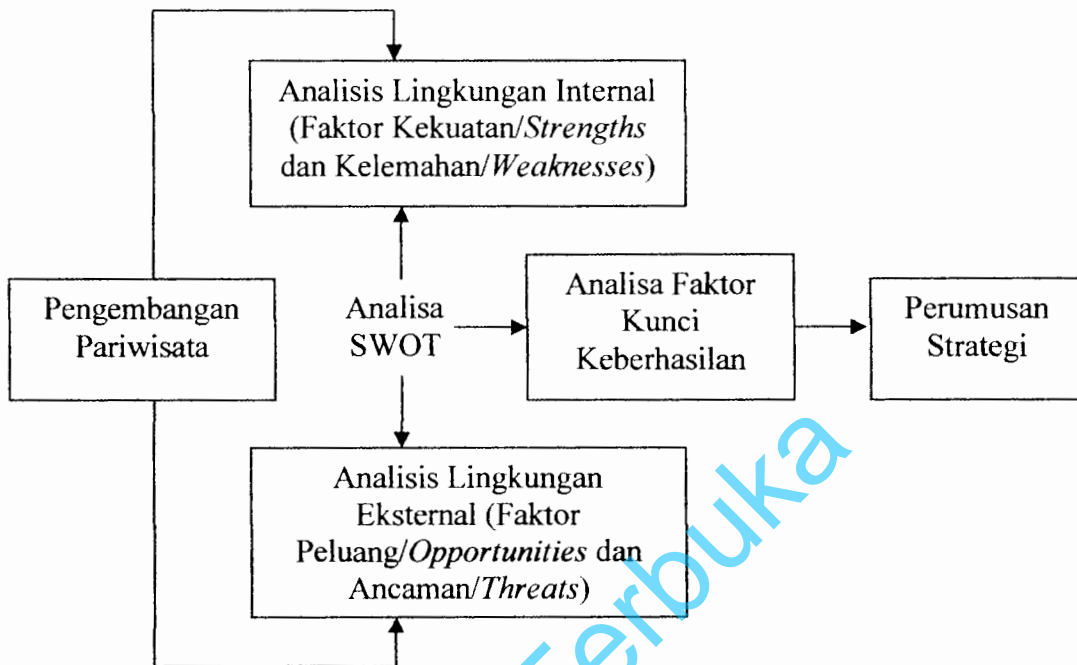
Strategi merupakan pola atau bentuk kebijakan yang ditempuh oleh suatu organisasi yang menggambarkan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi melakukannya (Bryson, 2001). Strategi dijelaskan oleh Salusu (2002) sebagai suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya yang ada dalam organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Agar dihasilkannya strategi pengembangan pariwisata yang tepat dan menyeluruh, sebelumnya diawali dengan analisa SWOT berupa analisa terhadap lingkungan internal maupun eksternal dan analisa faktor kunci keberhasilan. Lingkungan internal adalah analisis secara internal organisasi dalam rangka menilai atau mengidentifikasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dari suatu organisasi yang ada. Menurut Higgins (dalam Salusu, 2002) kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan stratejik dalam mencapai sasarannya. Sedangkan

kelemahan adalah sebaliknya, yakni situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya.

Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang merupakan kekuatan yang berada di luar organisasi. Lingkungan eksternal mengandung dua faktor yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Higgins (dalam Salusu, 2002) mengartikan peluang sebagai situasi dan faktor-faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai atau bahkan dapat melampaui pencapaian sasarannya. Sedangkan ancaman sebaliknya, merupakan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya.

Faktor kunci keberhasilan merupakan hasil analisa faktor internal dan eksternal yang dinilai sangat mendukung tercapainya visi dan misi. Faktor kunci keberhasilan merupakan faktor-faktor strategis dari tiap kategori kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Setiap kategori kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) masing-masing dipilih dua faktor kunci keberhasilan berdasarkan analisa terhadap tingkat dukungan dan keterkaitan tiap faktor dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya, melalui analisis SWOT, diperbandingkan masing-masing faktor kunci keberhasilan yang telah dipilih untuk menemukan rumusan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara yang paling tepat dan menyeluruh. Bagan 2.1 menggambar secara ringkas kerangka berpikir mengenai tahapan analisa SWOT perumusan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara.



Bagan 2.1. Kerangka Berpikir

Universitas Terbuka

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan maksud hasil penelitian ini akan memberikan gambaran atau mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang akan diteliti. Penelitian dengan metode deskriptif yaitu meneliti satu atau dua aspek dari suatu hal yang sudah terpetakkan secara umum dan luas dengan area penelitian yang lebih mendalam yang bertujuan mendiskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya (Irawan, 2010).

Pendapat di atas didukung oleh Nawawi (1991) yang menjelaskan metode diskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian baik yang berupa orang, lembaga, masyarakat dan lainnya pada saat sekarang dan sesuai fakta yang tampak apa adanya. Dalam penulisan ini peneliti mengembangkan konsep menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis (Singarimbun dan Effendi, 1989).

Sementara itu Nasution (1988) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya melalui interaksi dengan mereka serta berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang lingkungan sekitarnya. Terkait dengan judul penulisan ini yaitu Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara, maka yang dimaksud dengan orang dalam lingkungan hidupnya adalah mereka yang terlibat dalam

pengembangan pariwisata yaitu, pemerintah daerah, *stakeholders* yang terkait dengan pariwisata dan masyarakat yang merasakan dampak dari pengembangan pariwisata. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka penulis akan melakukan identifikasi faktor internal dan eksternal dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara, mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara dan merumuskan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara.

B. Subyek Penelitian/Narasumber/Responden

Irawan (2010), dengan mengambil beberapa sumber (Cresswell (1994), Denzin & Lincoln (1994), Guba & Lincoln (1994), Mostyn (1985), Tashakkori dan Teddie (1998), Bogdan & Biklen (1982), menjelaskan bahwa salah satu ciri penelitian kualitatif yaitu tertarik pada pertanyaan “*Why*” daripada “*What*”. Peneliti kualitatif tidak cukup hanya dengan jawaban “apa adanya” tetapi lebih tertarik pada alasan mengapa yang ada itu “mengada” seperti itu.

Peneliti kualitatif sebagai *human instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas hasil temuannya (Sugiyono, 2009).

Jika mengacu terhadap ciri penelitian kualitatif di atas, maka untuk mendapatkan informasi yang benar dan mendalam maka diperlukan subyek penelitian/narasumber/responden yang memiliki kapasitas yang memadai terhadap persoalan penelitian yang sedang diamati oleh peneliti.

Responden adalah orang yang memberi kita informasi sesuai dengan permintaan atau pertanyaan kita. Responden dalam penelitian kualitatif disebut “*key-informant*” (Irawan, 2010).

Dalam penelitian ini, responden (informan kunci/*key-informant*) yang paling mengetahui tentang pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara adalah aparat dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, yakni Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Seksi.

Selain itu, dalam rangka menyediakan informasi yang sifatnya mendukung informasi yang diperoleh dari responden (informan kunci/*key-informant*) maka pencarian informasi dilakukan juga melalui informan lainnya yaitu mereka yang juga memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara, seperti pelaku usaha pariwisata, pengelola objek wisata, masyarakat di sekitar objek wisata, budayawan. Kelengkapan dan kedalaman informasi juga diupayakan diperoleh dari siapa saja yang ditemukan di lokasi penelitian yang diperkirakan dapat memberikan informasi terkait perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Maluku Tenggara.

C. Instrumen Penelitian

Guna memberikan gambaran yang jelas sesuai fakta yang ada kepada semua pihak, menemukan makna dibalik fakta yang ada, dan menghasilkan data yang valid dan reliabel maka sangat diperlukan pemilihan instrumen penelitian yang tepat.

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. ***Pedoman Wawancara;***

Pedoman wawancara merupakan instrumen penelitian yang berbentuk daftar pertanyaan sebagai pedoman bagi peneliti untuk mendapatkan data dan informasi tentang faktor-faktor internal dan eksternal dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara dan hal lain terkait strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara selama ini (Lampiran 4). Melalui pedoman wawancara yang tersedia dilakukan wawancara langsung oleh peneliti dengan informan, baik informan kunci maupun informan pendukung. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dimungkinkan untuk dijawab oleh lebih dari satu informan. Wawancara dilakukan secara terpisah untuk masing-masing informan guna mendapatkan data yang obyektif sesuai rumusan masalah penelitian.

2. ***Pedoman Observasi;***

Pedoman observasi merupakan instrumen penelitian yang berbentuk daftar berbagai hal yang akan diamati dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian meliputi kondisi produk wisata di Kabupaten Maluku Tenggara yang meliputi atraksi, aksesibilitas maupun amenities (Lampiran 6). Atraksi terkait apa yang disuguhkan langsung kepada wisatawan selama berwisata, aksesibilitas menyangkut ketersediaan moda transportasi dari dan ke destinasi wisata serta amenities terkait ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti akomodasi, makan minum, telekomunikasi, dan lainnya. Hal lain yang diamati yaitu jumlah kunjungan wisatawan ke beberapa objek wisata dan faktor-faktor internal maupun eksternal pengembangan pariwisata di

Kabupaten Maluku Tenggara. Melalui pedoman observasi yang tersedia, peneliti selanjutnya menuju obyek penelitian untuk melakukan pengamatan secara langsung. Setiap aspek yang diamati mempedomani indikator yang telah ditetapkan untuk masing-masing aspek tersebut. Keseluruhan hal yang diamati dicatat sebagai hasil pengamatan untuk dituangkan pada BAB IV Temuan dan Pembahasan.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Penentuan subjek penelitian merupakan aktivitas awal yang penting dari proses pengumpulan data agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan informan sebagai pemberi informasi dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan (Idrus, 2009).

Data dan bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh di lapangan yang didukung dengan berbagai dokumen yang berkaitan.

Selengkapnya prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menentukan subjek penelitian.
2. Memilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data.
3. Mengurus perizinan dari birokrasi (Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Maluku Tenggara) guna kelancaran pencarian data.
4. Menginventarisir berbagai dokumen tentang kepariwisataan di Kabupaten Maluku Tenggara dengan mengacu pada permasalahan penelitian ini dan selanjutnya memanfaatkan informan guna mendapatkan data yang akurat dan

mendalam yang mengungkap strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan pedoman wawancara yang telah dirumuskan sebelumnya. Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka guna memberikan kesempatan kepada informan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Observasi lapangan juga dilakukan dalam penelitian ini guna mencatat berbagai fenomena yang terjadi di lapangan.

E. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis SWOT yaitu dengan melihat faktor-faktor yang merupakan Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) kepariwisataan di Kabupaten Maluku Tenggara.

Melalui analisis SWOT, diperbandingkan berbagai faktor internal meliputi Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) dengan faktor-faktor eksternal meliputi Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dalam rangka menemukan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara yang paling tepat dan menguntungkan. Diagram matriks SWOT dapat digambarkan pada Bagan 3.1 berikut ini.

	<p>STRENGTHS (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. Identifikasi Kekuatan 3. 4. 5. 	<p>WEAKNESSES (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. Identifikasi Kelemahan 3. 4. 5.
<p>OPPORTUNITIES (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. Identifikasi Kesempatan 3. 4. 5. 	<p>SO STRATEGIES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. Menggunakan Kekuatan untuk menangkap Kesempatan 3. 4. 5. 	<p>WO STRATEGIES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. Mengatasi Kelemahan dengan mengambil Kesempatan 3. 4. 5.
<p>THREATS (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. Identifikasi Ancaman 3. 4. 5. 	<p>ST STRATEGIES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. Menggunakan Kekuatan untuk menghindari Ancaman 3. 4. 5. 	<p>WT STRATEGIES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. Meminimalkan Kelemahan dan menghindari Ancaman 3. 4. 5.

Sumber: Wahyudi, 1996: 105

Bagan 3.1. MATRIK SWOT

Beberapa alternatif strategi yang dihasilkan dari analisa matriks SWOT ini menurut David (dalam Salusu, 2002) adalah sebagai berikut:

1. Strategi SO (*Strength Opportunity Strategy*) dipakai untuk memperoleh keuntungan dari peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal.
2. Strategi WO (*Weakness Opportunity Strategy*) bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan luar.
3. Strategi ST (*Strength Threat Strategy*) yaitu strategi yang digunakan untuk menghindari, paling tidak memperkecil dampak dari ancaman yang datang dari luar.

4. Strategi WT (*Weakness Threat Strategy*) yaitu strategi yang diarahkan pada usaha memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Beberapa ahli menganggap, ada empat strategi utama yang dapat dirumuskan dalam empat kwadran SWOT yakni (dalam LAN RI, 2008):

- 1. Strategi Ekspansi dirumuskan pada kwadran I.**

Dalam kwadran I ini dapat diinteraksikan atau dipadukan kekuatan kunci dan kesempatan kunci sebagai suatu strategi SO ke arah ekspansi atau pengembangan, pertumbuhan, perluasan dalam bidang tertentu, dalam mencapai tujuan atau peluang-peluang yang menjanjikan. Pada kwadran I ini organisasi dianggap memiliki keunggulan kompetitif.

- 2. Strategi Diversifikasi dirumuskan pada kwadran II.**

Dalam kwadran II ini dapat diinteraksikan atau dipadukan kekuatan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi ST untuk melakukan mobilisasi kekuatan kunci, dalam menciptakan diversifikasi, inovasi, pembaharuan, modifikasi di bidang tertentu dalam upaya mencegah ancaman kunci, sehingga tujuan yang telah ditentukan atau peluang yang menjanjikan masa depan yang cemerlang tercapai.

- 3. Strategi Stabilitas atau Rasionalisasi dirumuskan pada kwadran III.**

Dalam kwadran III ini dapat diinteraksikan atau dipadukan kelemahan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi WO untuk menciptakan stabilitas atau rasionalisasi atau melakukan investasi/divestasi dalam bidang tertentu dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau peluang yang menjanjikan masa depan yang lebih cemerlang.

4. Strategi Defensif atau Survival dirumuskan pada kwadran IV.

Dalam kwadran IV ini dapat diinteraksikan atau dipadukan kelemahan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi WT yang dapat menciptakan suatu keadaan yang defensif atau survival atau investasi/divestasi, efisiensi yang menyeluruh atau pengurangan kegiatan operasional agar dapat bertahan atau keadaan tidak semakin terpuruk akibat desakan yang kuat dari ancaman kunci.

Universitas Terbuka

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Maluku Tenggara

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kabupaten Maluku Tenggara menurut astronomi terletak antara 5^0 sampai $6,5^0$ Lintang Selatan dan 131^0 sampai $133,5^0$ Bujur Timur. Adapun letaknya menurut geografis dibatasi antara lain oleh Laut Arafura di sebelah selatan, Irian Jaya Bagian Selatan di sebelah utara, Kepulauan Aru di sebelah timur, dan Kota Tual, Laut Banda dan Bagian Utara Kepulauan Tanimbar di sebelah barat (sumber data: Maluku Tenggara dalam Angka Tahun 2012).

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara $\pm 4.197,47 \text{ Km}^2$, dengan luas daratan $\pm 1.010,74 \text{ Km}^2$ dan luas perairannya $\pm 3.186,73 \text{ Km}^2$.

Kabupaten Maluku Tenggara hanya terdiri atas 1 Gugusan Kepulauan yaitu Gugusan Kepulauan Kei yang terdiri atas Kepulauan Kei Kecil dengan luas seluruhnya $465,11 \text{ Km}^2$ dan Pulau Kei Besar dengan luas $545,64 \text{ Km}^2$ (sumber data: Maluku Tenggara dalam Angka Tahun 2012).

3. Topografi, Geologi, dan Iklim

Secara topografi Pulau Kei Kecil, dengan ketinggian $\pm 100 \text{ M}$ di atas permukaan laut. Beberapa bukit rendah di Tengah dan Utara mencapai 115 M . Pulau Kei Besar berbukit dan bergunung yang membujur sepanjang pulau dengan ketinggian rata-rata $500-800 \text{ M}$ dengan Gunung Dab sebagai puncak tertinggi, dataran rendah merupakan jalur sempit sepanjang pantai.

Menurut peta geologi Indonesia (1965), pulau/kepulauan di Maluku Tenggara terbentuk/tersusun dari tanah dan batuan yang tercatat sebanyak tiga jenis tanah dan lima jenis batuan. Iklim dipengaruhi oleh Laut Banda, Laut Arafura, dan Samudera Indonesia juga dibayangi oleh Pulau Irian di Bagian Timur dan Benua Australia di bagian selatan, sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan. Keadaan musim teratur, musim Timur berlangsung dari bulan April sampai Oktober. Musim ini adalah musim kemarau. Musim Barat berlangsung dari bulan Oktober sampai Februari. Musim hujan pada bulan Desember sampai Februari dan yang paling banyak pada bulan Desember dan Februari. Bulan Oktober sampai Maret bertiup angin Barat Laut sebanyak 50% dengan angin Barat Laut dominan 28%. Musim pancaroba berlangsung dalam bulan Maret/April dan Oktober/November. Bulan April sampai Oktober, bertiup angin Timur Tenggara. Angin kencang bertiup pada bulan Januari dan Februari dan diikuti dengan hujan deras dan laut bergelora. Bulan April sampai September bertiup angin Timur Tenggara dan Selatan sebanyak 91% dengan angin Tenggara dominan 61%. Bulan Oktober sampai Maret bertiup angin Barat Laut sebanyak 50% dengan angin Barat Laut dominan 28%.

Curah hujan antara 2.000-3.000 mm pertahun terdapat di Pulau Kei Kecil. Sedangkan di Pulau Kei Besar diatas 3.000 mm pertahun. Tahun 2011 curah hujan di Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan adalah 3.121 mm pertahun atau rata-rata 260,1 mm perbulan, dengan jumlah hari hujan sebanyak 211 hari atau rata-rata 17,58 hari hujan perbulan. Suhu rata-rata untuk tahun 2011 sesuai data dari Stasiun Meteorologi Dumatubun Langgur (BPS, 2012: 5) adalah $26,9^{\circ}C$ dengan suhu minimum $24,5^{\circ}C$ dan maksimum $30,8^{\circ}C$. Kelembaban rata-rata

84,5%, penyinaran matahari rata-rata 51,6% dan tekanan udara rata-rata 1.007,9 milibar. Berdasarkan klasifikasi Agroklimate menurut Oldeman, Irsal dan Muladi (1981, BPS, 2012: 6), di Maluku Tenggara terdapat Zone Agroklimate, Zone C2 bulan basah 5-6 bulan dan kering 4-5 bulan (sumber data: Maluku Tenggara dalam Angka Tahun 2012).

4. Sejarah Singkat Kabupaten Maluku Tenggara

Wilayah Maluku Tenggara pada zaman Penjajahan Belanda tercakup dalam jenis/bentuk organisasi yang diberi nama "*Recht Streek Bestuurde Gebieden*" bersama-sama dengan Maluku Tengah dan Kota Ambon dan dikenal dengan "*Residentie De Zuit Molukken*". Elat, serta Tapa dan Tounwawan dikenal dengan "*Bestuur Ressorf*". Tual dan Dobo, serta Saumlaki dan Wonreli dikepalai oleh "*Hoof van Plaasselyk*" atau Kepala Pemerintahan Setempat (KPS).

Kota Tual pada tahun 1948 adalah Ibukota "*Onder Afdeling Kei-Eenlanden*" yang dikepalai oleh seorang Asisten Residen. Sesudah kemerdekaan Republik Indonesia barulah Daerah Maluku Tenggara merupakan bagian dari Maluku Selatan.

Tokoh-tokoh Maluku Tenggara yang menduduki Dewan Maluku Selatan adalah A. Koedoeboen, S. Pooroe, Hi. A. Gani Renuat, B. Setitit. Mereka berpendapat bahwa letak geografis Maluku Tenggara jauh dari Ambon sebagai Ibukota Daerah Maluku Selatan serta kurangnya sarana dan prasarana perhubungan ke Maluku Tenggara.

Pada tahun 1950-1951 Sidang Dewan Maluku Selatan dilaksanakan di Ambon. Tahun 1951, Gubernur Maluku MR. J. Laturharhary dengan menumpang Kapal Kasimbar mengunjungi Maluku Tenggara. Pada kesempatan kunjungan itu

Gubernur mengundang tokoh-tokoh Maluku Tenggara untuk mengadakan pertemuan di atas Kapal Kasimbar dan menjelaskan bahwa tuntutan tokoh-tokoh Maluku Tenggara telah dipenuhi, maka Daerah Maluku Selatan dibagi 2 (dua) bagian yaitu: 1) Daerah Tingkat II Maluku Tengah dan 2) Daerah Tingkat II Maluku Tenggara. Untuk menentukan Ibukota Daerah Tingkat II Maluku Tenggara, diadakan pertemuan dimana terjadi perdebatan antara tokoh-tokoh yang berasal dari Kei, Aru dan Kisar dengan tokoh-tokoh dari Larat, Saumlaki dan Tefa yang menghendaki Saumlaki sebagai Ibukota. Perbedaan pendapat tersebut akhirnya didapat persetujuan bersama dimana Tual menjadi Ibukota.

Pada tahun 1957 Maluku Tenggara menjadi Daerah Swatantra Tingkat II Maluku Tenggara tetap dengan Ibukota Tual dengan membawahi 8 kecamatan masing-masing: 1) Kecamatan P.P. Terselatan, 2) Kecamatan Letti Moa Lakor, 3) Kecamatan P. P. Babar, 4) Kecamatan Tanimbar Selatan, 5) Kecamatan Tanimbar Utara, 6) Kecamatan Kei Kecil, 7) Kecamatan Kei Besar, 8) Kecamatan P. P. Aru. Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2000 dimekarkan menjadi dua kabupaten, masing-masing Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sehingga Kabupaten Maluku Tenggara membawahi 3 (tiga) kecamatan masing-masing 1) Kecamatan Kei Kecil, 2) Kecamatan Kei Besar, 3) Kecamatan P. P. Aru. Sedangkan Kabupaten Maluku Tenggara Barat membawahi 5 (lima) kecamatan lainnya. Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2003 kembali dimekarkan menjadi dua kabupaten, yakni Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru. Pada tahun 2007 Kabupaten Maluku Tenggara kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Kabupaten Maluku Tenggara membawahi 5 (lima) kecamatan yakni 1)

Kecamatan Kei Kecil, 2) Kecamatan Kei Kecil Timur, 3) Kecamatan Kei Kecil Barat, 4) Kecamatan Kei Besar, 5) Kecamatan Kei Besar Selatan, dan 6) Kecamatan Kei Besar Utara Timur (sumber data: Maluku Tenggara dalam Angka Tahun 2012).

5. Kondisi Demografis

Penduduk merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan termasuk pembangunan pariwisata, dalam arti bahwa penduduk atau manusia memiliki peranan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Peranan ini hanya akan dapat berhasil jika didukung dengan kemampuan dalam menjawab tantangan pembangunan.

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1980 adalah sebanyak 89.334 jiwa, tahun 1990 sebanyak 106.327 jiwa, dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 121.063. Sementara itu sensus penduduk tahun 2010 yang dilaksanakan pada bulan Mei 2010, mencatatkan penduduk Maluku Tenggara sebanyak 96.442 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 47.463 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 48.979 jiwa.

Disamping itu jumlah penduduk Maluku Tenggara untuk tahun 2011 berdasarkan hasil proyeksi adalah 99.112 jiwa, diantaranya laki-laki 49.188 jiwa dan perempuan 49.924 jiwa. Jumlah penduduk Maluku Tenggara pada tahun 2011 berdasarkan Catatan Sipil adalah sebanyak 127.683 jiwa, yang terdiri dari 63.223 laki-laki dan 64.460 perempuan. Adapun *sex ratio* pada tahun 2011 adalah 98, yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki.

Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	6.372	5.944	12.316
5 – 9	6.639	6.203	12.842
10 – 14	6.042	5.531	11.573
15 – 19	4.387	4.176	8.563
20 – 24	3.355	3.473	6.828
25 – 29	3.201	3.594	6.795
30 – 34	2.792	3.136	5.928
35 – 39	2.642	2.816	5.458
40 – 44	2.430	2.825	5.255
45 – 49	2.342	2.676	5.018
50 – 54	2.057	2.417	4.474
55 – 59	1.634	1.756	3.390
60 – 64	1.161	1.405	2.566
65 – 69	815	938	1.753
70 – 74	718	890	1.608
75+	876	1.199	2.075
Jumlah	47.463	48.979	96.442

Sumber Data: Maluku Tenggara dalam Angka Tahun 2012.

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui jumlah penduduk usia produktif (15-74 tahun) sebanyak 56.028 jiwa atau 58,09 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Maluku Tenggara. Jumlah penduduk usia produktif yang besar ini dapat menjadi modal pembangunan apabila kualitasnya baik dan sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan apabila kualitasnya rendah.

B. Kondisi Kepariwisataan Kabupaten Maluku Tenggara

Terkait kondisi kepariwisataan Kabupaten Maluku Tenggara maka dapat digambarkan berikut ini tentang objek dan daya tarik wisata (ODTW) meliputi ODTW alam, ODTW budaya, dan ODTW lainnya, kondisi usaha pariwisata, dan sarana prasarana penunjang pariwisata yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara.

1. ODTW Alam, yang terdiri dari:

a. Pantai Ngurbloat

Pantai ini merupakan objek wisata unggulan di Kabupaten Maluku Tenggara dan dimasukkan sebagai program prioritas bidang pariwisata daerah tahun 2008-2013 dalam mendukung misi daerah yakni Mengembangkan Struktur Ekonomi yang Tangguh dan Berdaya Saing Berbasis Kelautan dan Perikanan. Melalui program *Visit Ngurbloat* yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara diharapkan tercapainya sasaran berupa terwujudnya Pantai Ngurbloat sebagai ikon destinasi wisata Maluku Tenggara yang mendunia. Program prioritas bidang pariwisata ini ditujukan untuk pengembangan Pantai Ngurbloat dengan segala fasilitasnya sebagai obyek wisata bahari. Pantai ini berlokasi di Desa Ngilngof Kecamatan Kei Kecil. Pantai Ngurbloat memiliki kekhasan dengan pasir pantainya yang sangat halus bagaikan tepung sehingga sulit dijumpai didaerah manapun. Masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara mengklaim pasir pantai Ngurbloat merupakan pasir terhalus di dunia. Daya tarik lainnya dari kawasan pantai ini adalah sebagai tempat yang cocok untuk berenang (*snorkling*), bersantai-santai dibawah rindangnya pohon kelapa sambil bersantap makanan seperti kerang, ubur-ubur, rumput laut, menikmati panorama *sunset* (matahari terbenam), menikmati gerak gerik berbagai jenis burung, potensi laut ikannya yang besar, terdapat Danau Ablel yang berisi ikan mujair dan mas, suguhan atraksi pembuatan kuliner enbal (makanan khas masyarakat Kei), pulau-pulau sekitar yang indah seperti Pulau Er, Ngodan, Ngaf, dan Ohoview. Menariknya, para wisatawan juga disuguhkan tarian tradisional dan lagu daerah dengan diiringi musik tifa, gong dan seruling. Sangat mudah untuk mencapai

objek hanya berjarak 17 km dari Ibukota Langgur dengan waktu tempuh 20-30 menit. Belum ada rambu-rambu arah menuju objek.

Setiap hari minggu jumlah pengunjung kira-kira mencapai 300 sampai 400 orang belum termasuk pengunjung yang datang setiap hari pada waktu sore hari. Menurut Maya, salah seorang rombongan pengunjung dari Kota Tual dan Pango, pengunjung dari Kota Ambon, Pantai Ngurbloat sangat indah dan pasirnya sangat halus bagaikan tepung. Selain itu, kehadiran mereka di obyek wisata ini untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Di kawasan pantai ini tersedia bungalow sebanyak lima unit yang dibangun oleh pemerintah daerah setempat dan beberapa prasarana milik masyarakat lokal yakni penginapan sebanyak tujuh buah, tempat hiburan karaoke sebanyak tiga buah, warung sederhana sebanyak tigapuluh buah, dan tigabelas buah tempat duduk di pinggir pantai (Observasi, 19-21 Oktober 2012). Sektor pariwisata dinilai belum mampu memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar objek wisata. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah dan rendahnya kualitas prasarana penunjang pariwisata yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Hampir seluruh bangunan penunjang pariwisata merupakan milik masyarakat (Wawancara dengan Bapak Beni Ohoitumur selaku pengelola objek wisata Pantai Ngurbloat, 19 Oktober 2012). Adapun tempat parkir yang dibangun pemerintah daerah sejak tahun 2010 sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan karena selain belum layak secara fisik juga keberadaan tempat parkir ini tidak mengakses jalan masuk menuju objek utama pantai bagi pejalan kaki. Padahal di tahun 2011 telah dianggarkan pembangunan jalan masuk menuju objek utama dan pembangunan lanjutan tempat parkir namun sesuai hasil pengamatan di lapangan jalan masuk

dimaksud belum ada pembangunannya begitupun tempat parkir yang masih saja belum selesai dan belum dapat digunakan hingga saat ini.

Pada tahun 2011 dan 2012 juga telah dianggarkan pembangunan *guest house* namun terkendala dengan masalah kepemilikan lahan sehingga sampai saat ini belum terealisasi pembangunannya bahkan terhitung sejak tanggal 6 September 2012 telah dipindahkan lokasi pembangunan *guest house* ke kawasan Pantai Ngursarnadan Desa Ohoililir dengan pertimbangan bahwa telah terjadi proyek macet di lokasi Pantai Ngurbloat dan pembangunan *guest house* harus terus jalan dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat (wawancara dengan Bapak Budi Toffi, S.Par selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, 22 September 2012 dan observasi, 23 September 2012).

Pengelolaan objek wisata Pantai Ngurboat sampai saat ini hanya dilakukan oleh desa. Belum adanya pengelolaan bersama antara pihak desa dengan pemerintah daerah setempat. Bungalow yang dibangun oleh pemerintah daerah, pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat desa yang pengelolanya ditetapkan oleh kepala desa melalui mekanisme rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Bungalow ini dibangun oleh pemerintah daerah pada tahun 2009 namun baru dimanfaatkan pada tahun 2011. Hal ini mengingat pembangunannya tidak diikuti dengan pengadaan perlengkapan didalamnya. Adapun pengadaan perlengkapan baru dilaksanakan pada akhir desember 2010 (Wawancara dengan Ibu Fatimah Renngiwur, S.Sos, Kepala Seksi Standar Mutu Produk, Objek dan Daya Tarik Wisata, 18 Oktober 2012).

Pendapatan yang diterima dari kunjungan wisatawan ke objek wisata ini semua menjadi milik desa kecuali pemanfaatan bungalow yang dibangun pemerintah daerah menjadi pendapatan pemerintah daerah. Adapun pengelola bungalow diberikan honor sebesar Rp. 750.000 setiap bulan. Sampai saat ini belum ada investasi dari pihak swasta setempat, nasional maupun asing padahal objek wisata ini merupakan unggulan daerah dengan berbagai daya tarik didalamnya. Jaringan telepon seluler baru menjangkau objek wisata ini pada tahun 2011 yakni jaringan Pro XL (Wawancara dengan Ibu Fatimah Renngiwur, S.Sos, Kepala Seksi Standar Mutu Produk, Objek dan Daya Tarik Wisata, 18 Oktober 2012 dan Bapak Beni Ohoitumur selaku pengelola objek wisata Pantai Ngurbloat, 19 Oktober 2012).

b. Pantai Ngursarnadan

Pantai ini terletak di Desa Ohoililir Kecamatan Kei Kecil. Air laut yang kebiru-biruan dengan terumbu karang, pantai pasir putih menjadikan pantai ini menjadi tempat berwisata yang menarik untuk dikunjungi untuk aktifitas berenang dan juga bersantai sambil menikmati kelapa muda dan makanan khas setempat. Para tamu yang datang juga sering disuguhkan tari-tarian khas Kei. Objek wisata ini berjarak 14 km dari Langgur dengan waktu tempuh 20 menit. Belum ada rambu-rambu petunjuk arah menuju objek. Kondisi sarana prasarana belum memadai.

Setiap hari minggu jumlah pengunjung kira-kira mencapai 100 sampai 200 orang belum termasuk pengunjung yang datang setiap hari pada waktu sore hari. Di kawasan pantai ini tersedia bungalow sebanyak dua unit yang dibangun oleh pemerintah daerah setempat dan beberapa prasarana milik masyarakat lokal yakni

warung sederhana sebanyak lima buah, tiga buah *cottage*, dan tempat duduk di pinggir pantai sebanyak tigabelas buah (Observasi, 19-21 Oktober 2012). Menurut Bapak Alo Letsoin, pengelola obyek wisata Pantai Ngursarnadan, bahwa pengunjung yang datang ke obyek wisata Pantai Ngursarnadan bukan hanya wisatawan lokal namun banyak juga wisatawan asing yang berasal dari Italia dan Australia, bahkan mereka menetap beberapa hari di beberapa *cottage* yang ada di kawasan Pantai Ngursarnadan untuk dapat menikmati keindahan alam Pantai ini.

Sektor pariwisata dinilai belum mampu memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar objek wisata. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah prasarana penunjang pariwisata yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Hampir seluruh bangunan penunjang pariwisata merupakan milik masyarakat (Wawancara dengan Bapak Alo Letsoin, 19 Oktober 2012).

Pengelolaan objek wisata Pantai Ngursarnadan sampai saat ini hanya dilakukan oleh desa. Belum adanya pengelolaan bersama antara pihak desa dengan pemerintah daerah setempat. Bungalow yang dibangun oleh pemerintah daerah, pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat desa yang pengelolanya ditetapkan oleh kepala desa melalui mekanisme rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Bungalow ini dibangun oleh pemerintah daerah pada tahun 2010 namun baru dimanfaatkan pada tahun 2011. Hal ini mengingat pembangunannya tidak diikuti dengan pengadaan perlengkapan didalamnya. Adapun pengadaan perlengkapan baru dilaksanakan pada akhir desember 2010. Jaringan telepon seluler baru menjangkau objek wisata ini pada tahun 2011 yakni jaringan Pro XL (Wawancara dengan Ibu Fatimah Renngiwur, S.Sos, Kepala Seksi Standar Mutu

Produk, Objek dan Daya Tarik Wisata, 18 Oktober 2012 dan Bapak Alo Letsoin selaku pengelola objek wisata Pantai Ngursarnadan, 19 Oktober 2012).

Pendapatan yang diterima dari kunjungan wisatawan ke objek wisata ini semua menjadi milik desa kecuali pemanfaatan bungalow yang dibangun pemerintah daerah menjadi pendapatan pemerintah daerah. Adapun pengelola bungalow diberikan honor sebesar Rp. 750.000 setiap bulan. Sampai saat ini belum ada investasi dari pihak swasta setempat, nasional maupun asing (Wawancara dengan Ibu Fatimah Renngiwur, S.Sos, Kepala Seksi Standar Mutu Produk, Objek dan Daya Tarik Wisata, 18 Oktober 2012).

c. Pantai Nadiun Ohoidertawun

Pantai ini terletak di Desa Ohoidertawun Kecamatan Kei Kecil. Merupakan pantai pasir putih yang sangat indah dan sangat luas jika air surut. Pada dinding tebing tepi pantai terdapat gambar purbakala yang belum diketahui siapa penulis dan kapan lukisan itu dibuat. Keadaan lingkungan masih alami, masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan. Para tamu yang datang juga sering disuguhkan tari-tarian khas Kei. Objek wisata ini berjarak 12 km dari Langgur dengan waktu tempuh 15 menit. Belum ada rambu-rambu petunjuk arah menuju objek. Jaringan telepon seluler baru menjangkau objek wisata ini pada tahun 2011 yakni jaringan Pro XL (Wawancara dengan Ibu Fatimah Renngiwur, S.Sos, Kepala Seksi Standar Mutu Produk, Objek dan Daya Tarik Wisata, 18 Oktober 2012).

Setiap hari minggu jumlah pengunjung kira-kira mencapai 50 sampai 100 orang belum termasuk pengunjung yang datang setiap hari pada waktu sore hari. Di kawasan pantai ini tersedia bungalow sebanyak satu unit yang dibangun oleh

pemerintah daerah setempat dan tiga unit milik masyarakat lokal juga terdapat warung sederhana milik masyarakat lokal sebanyak dua buah (Observasi, 19-21 Oktober 2012).

Perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara bagi pengembangan objek wisata Pantai Nadiun Ohoidertawun sangat rendah. Saat ini hanya satu buah bungalow yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara padahal objek wisata Pantai Nadiun Ohoidertawun merupakan objek wisata yang sangat indah. Situs berupa lukisan kuno pada dinding batu yang ada pada tepian pantai ini telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku. Selama ini masyarakat tidak merasakan manfaat pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Wawancara dengan Bapak Egen Rahakbauw selaku Pejabat Kepala Desa Ohoidertawun, 19 Oktober 2012).

Pengelolaan objek wisata Pantai Nadiun Ohoidertawun sampai saat ini hanya dilakukan oleh desa. Belum adanya pengelolaan bersama antara pihak desa dengan pemerintah daerah setempat. Bungalow yang dibangun oleh pemerintah daerah, pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat desa yang pengelolanya ditetapkan oleh kepala desa melalui mekanisme rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Bungalow ini dibangun oleh pemerintah daerah pada tahun 2010 namun baru dimanfaatkan pada tahun 2011. Hal ini mengingat pembangunannya tidak diikuti dengan pengadaan perlengkapan didalamnya. Adapun pengadaan perlengkapan baru dilaksanakan pada akhir desember 2010 (Wawancara dengan

Ibu Fatimah Renngiwur, S.Sos, Kepala Seksi Standar Mutu Produk, Objek dan Daya Tarik Wisata, 18 Oktober 2012).

Pendapatan yang diterima dari kunjungan wisatawan ke objek wisata ini semua menjadi milik desa kecuali pemanfaatan bungalow yang dibangun pemerintah daerah menjadi pendapatan pemerintah daerah. Adapun pengelola bungalow diberikan honor sebesar Rp. 750.000 setiap bulan. Sampai saat ini belum ada investasi dari pihak swasta setempat, nasional maupun asing (Wawancara dengan Ibu Fatimah Renngiwur, S.Sos, Kepala Seksi Standar Mutu Produk, Objek dan Daya Tarik Wisata, 18 Oktober 2012).

d. Pantai Elomel

Pantai ini terletak di Desa Sathean Kecamatan Kei Kecil. Di tempat ini, pengunjung dapat menikmati panorama laut dengan latar pulau Batu Kapal, penangkaran ikan, memancing, dan menikmati gerak gerik berbagai jenis burung. Tempat ini juga sangat cocok untuk olahraga menyelam (*diving*) juga untuk santai siang hari sambil menikmati ikan bakar. Keadaan lingkungan masih alami, masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan. Objek wisata ini berjarak 8 km dari Langgur dengan waktu tempuh 10 menit. Belum ada rambu-rambu petunjuk arah menuju objek.

Setiap hari minggu jumlah pengunjung kira-kira mencapai 50 sampai 75 orang belum termasuk pengunjung yang datang setiap hari pada waktu sore hari. Di kawasan pantai ini tersedia satu unit panggung, satu unit gazebo dan satu unit rumah payung yang dibangun oleh pemerintah daerah pada tahun 2009 dan prasarana lainnya seperti rumah makan terapung, tujuh unit rumah payung milik keluarga besar. Pengelolaan objek saat ini dilakukan oleh keluarga besar yang

merupakan pemilik objek. Sampai saat ini belum ada investasi dari pihak swasta setempat, nasional maupun asing (Wawancara dengan Ibu Fatimah Renngiwur, S.Sos, Kepala Seksi Standar Mutu Produk, Objek dan Daya Tarik Wisata, 18 Oktober 2012 dan observasi, 19-21 Oktober 2012).

e. Pantai Daftel

Pantai ini terletak di Desa Ler Ohoilim Dusun Daftel Kecamatan Kei Besar. Merupakan objek wisata unggulan masyarakat Kei Besar. Di tempat ini pengunjung dapat bersantai, berenang, dan menikmati makanan khas seperti ikan bakar, sayur sir-sir, dan enbal. Pencapaian mudah dari kecamatan dengan menggunakan ojek dan rental mobil. Waktu tempuh ke objek wisata ini kira-kira 20 menit dari Elat, ibukota Kecamatan Kei Besar. Belum ada rambu-rambu petunjuk arah menuju objek. Pencapaian dari Langgur, ibukota Kabupaten Maluku Tenggara cukup sulit karena harus menyeberang antar pulau. Terdapat jaringan telepon seluler yakni simpati dan mentari (Wawancara dengan Ibu Fatimah Renngiwur, S.Sos, Kepala Seksi Standar Mutu Produk, Objek dan Daya Tarik Wisata, 18 Oktober 2012).

Setiap hari minggu jumlah pengunjung kira-kira mencapai 100 sampai 250 orang. Di kawasan pantai ini tersedia prasarana milik masyarakat lokal yakni sembilan unit gazebo yang disewakan kepada wisatawan dan enam buah warung makan (Observasi, 11 Nopember 2012). Sampai saat ini belum ada investasi dari pihak swasta setempat, nasional maupun asing (Wawancara dengan Ibu Fatimah Renngiwur, S.Sos, Kepala Seksi Standar Mutu Produk, Objek dan Daya Tarik Wisata, 18 Oktober 2012).

f. Pemandian Alam Evu

Objek wisata ini terletak di Desa Evu Kecamatan Kei Kecil. Berbentuk kolam berisi air tawar yang sangat jernih. Di tempat ini, pengunjung dapat berenang dan berolahraga air, menikmati kelapa muda dan makanan khas tradisional setempat berupa ikan bakar dan enbal. Objek wisata ini berjarak 20 km dari Langgur dengan waktu tempuh 45 menit. Belum ada rambu-rambu petunjuk arah menuju objek.

Setiap hari minggu jumlah pengunjung kira-kira mencapai 300 orang belum termasuk pengunjung yang datang setiap hari pada waktu sore hari diperkirakan 50 sampai 100 orang (Observasi, 22-23 Oktober 2012 dan 4 Nopember 2012). Sampai saat ini belum ada investasi dari pihak swasta setempat, nasional maupun asing (Wawancara dengan Ibu Fatimah Renngiwur, S.Sos, Kepala Seksi Standar Mutu Produk, Objek dan Daya Tarik Wisata, 18 Oktober 2012).

g. Goa Hawang

Objek wisata ini terletak di Desa Letvuan Kecamatan Kei Kecil. Keunikan objek wisata ini adalah adanya aliran sungai bawah tanah. Objek wisata ini berjarak 20 km dari Langgur dengan waktu tempuh 45 menit. Belum ada rambu-rambu petunjuk arah menuju objek.

Setiap hari minggu jumlah pengunjung kira-kira mencapai 20-30 orang. Objek wisata Goa Hawang sampai saat ini belum tersentuh pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga belum ada investasi dari pihak swasta setempat, nasional maupun asing (Wawancara dengan Bapak

Jhon Tawurutubun selaku pengelola objek wisata Goa Hawang, 4 Nopember 2012 dan observasi, 4 Nopember 2012).

2. ODTW Budaya, yang terdiri dari:

a. Desa Adat Tanimbar Kei

Objek wisata ini terletak di Desa Tanimbar Kei Kecamatan Kei Kecil Barat. Di tempat ini, wisatawan dapat melihat kehidupan masyarakat yang masih asli dengan budaya khas Tanimbar Kei seperti Upacara Tate'e yakni upacara untuk memohon kepada Sang Pencipta agar mendapatkan keberkahan saat panen hasil alam. Wisatawan juga dapat melihat arsitektur rumah penduduk yang masih dipertahankan keasliannya, rumah panggung dengan dinding berukiran berbagai corak. Rumah panggung bentuk khas Tanimbar Kei ini merupakan rumah asli Suku Kei. Daya tarik utamanya yaitu adanya tarian Rawit Wul yang merupakan tarian pujian kepada leluhur. Wisatawan dapat juga menyaksikan sebuah tangga tua yang dalam bahasa setempat disebut Elyub, berbagai bentuk kerajinan berbahan daun tikar, patung Wadar yang dijadikan sebagai sesembahan, serta kehidupan berbagai jenis agama bahkan yang animisme dan dinamisme yang sangat rukun dan toleran.

Jumlah pengunjung ke objek wisata ini mencapai 100-200 orang setiap bulannya yang sebagian besar merupakan peneliti budaya dan sebagian lainnya peneliti terumbu karang baik dari lokal, nusantara maupun mancanegara (Wawancara dengan Bapak Petrus Renwarin, SE, M.Si, Kepala Bidang Kebudayaan, 18 Oktober 2012). Kunjungan ke objek wisata ini sebenarnya sangat banyak. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Budi Toffi, S.Par selaku Kepala Seksi Promosi, Tenaga dan Sarana pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, dengan mengungkapkan banyaknya permintaan paket perjalanan wisata dari berbagai Biro Perjalanan Wisata dari daerah lain ke beliau, namun untuk menjangkau desa ini cukup sulit dengan jalur laut menggunakan speedboat jarak tempuh mencapai 3 jam, itupun jika cuaca baik. Jika kondisi cuaca laut tidak memungkinkan maka bisa dicapai selama 5 jam.

Peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara sampai tahun 2012 ini hanya sebatas melaksanakan penyuluhan sadar wisata, sedangkan pembangunan sarana prasarana pendukung aktivitas wisata budaya belum pernah dilakukan, padahal dalam Rencana Tindak Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara telah menetapkan Tanimbar Kei sebagai Desa Adat Berbudaya. Wisatawan yang datang biasanya tinggal dan makan di rumah penduduk karena tidak ada akomodasi maupun rumah makan. Sampai saat ini belum ada investasi dari pihak swasta setempat, nasional maupun asing padahal desa wisata ini merupakan unggulan daerah dengan berbagai daya tarik didalamnya (Wawancara dengan Bapak Petrus Renwarin, SE, M.Si, Kepala Bidang Kebudayaan, 18 Oktober 2012 dan Bapak Julius Soarubun, ST selaku Tokoh Muda Desa Tanimbar Kei, 18 Oktober 2012).

b. Desa Seni Banda Ely

Objek wisata ini terletak di Desa Banda Ely Kecamatan Kei Besar Utara Timur. Berdasarkan sejarah penduduk di desa ini merupakan penduduk asli Banda yang merupakan suatu daerah tujuan wisata di Kabupaten Maluku Tengah, yang berpindah ke Maluku Tenggara karena tidak sejalan dengan penjajah Belanda saat itu. Di desa ini, wisatawan dapat melihat kehidupan budaya yang

masih terus dipertahankan, diantaranya bahasa yang dipakai sehari-hari bukan bahasa Kei sebagaimana bahasa yang dipakai oleh penduduk suku Kei. Desa ini disebut sebagai desa seni karena berbagai kerajinan seni seperti pembuatan tembikar dan berbagai benda berbahan dasar tembaga dapat dilihat disini. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara telah membangun Pasar Seni untuk menampung berbagai hasil kerajinan penduduk.

Belum ada parasarana akomodasi maupun rumah makan di desa ini sehingga wisatawan yang datang tinggal dan makan di rumah penduduk. Sampai saat ini belum ada investasi dari pihak swasta setempat, nasional maupun asing padahal desa wisata ini merupakan unggulan daerah dengan berbagai daya tarik didalamnya (Wawancara dengan Ibu Fatimah Renngiwur, S.Sos, Kepala Seksi Standar Mutu Produk, Objek dan Daya Tarik Wisata, 18 Oktober 2012).

c. Situs Sejarah

Kabupaten Maluku Tenggara memiliki banyak situs sejarah diantaranya:

- 1) Situs **Makam Keluarga Kasdew dan Jingra**, yang berlokasi di Desa Letvuan dan Desa Ohoivur, Kecamatan Kei Kecil Timur. Kasdew dan Jingra adalah dua orang bersaudara yang datang dari Surabaya dan Bali bersama keluarga dengan membawakan tombak dan parang yang akhirnya dijadikan sebagai lambang Hukum Adat Lar Vul Ngabal, dan setelah menjalankan misi kemanusiaan, mereka wafat bersama keluarga dan dimakamkan di dua lokasi yakni Desa Letvuan dan Desa Ohoivur.
- 2) Situs **Makam Nen Dit Sakmas**, yang berlokasi di Desa Wain, Kecamatan Kei Kecil Timur. Nen Dit Sakmas adalah srikandi yang pertama kali

menggerakkan terbentuknya Hukum Adat Lar Vul Ngabal di kalangan Lor Siw (salah satu komunitas besar masyarakat Kei) dan membawa lambang Hawear (daun kelapa sebagai simbol sasi) pertama kali di Kepulauan Kei.

- 3) Situs **Siran Siryen (Amalir Lor)**, yang berlokasi di Desa Elaar Ngursoin, Kecamatan Kei Kecil Timur. Siran Siryen (Amalir Lor) merupakan tempat terlaksananya dua momentum upacara adat sakral oleh para leluhur di Ngurdinin di Elaar Ngursoin untuk pembagian kerbau siw bagi kelompok Lor Siw dan penancangan Hukum Adat Lar Vul Ngabal.
- 4) Situs **Wear Dit Balsobnaik**, yang berlokasi di Desa Ler Ohoilim, Kecamatan Kei Besar. Wear Dit merupakan tempat permandian Nen Dit Somar (srikandi Lor Lim) yang merupakan putri Jingra dan menyebarkan Hukum Adat Ngabal di Nuhu Yuut (Kei Besar). Sedangkan Balsobnaik merupakan tempat pembagian Loor/Nang kepada komunitas kelompok Lor Lim serta tempat pemukiman keluarga Jingra.
- 5) Situs **Ngutun Rit Tenan Bes**, yang berlokasi di Desa Matwair, Kecamatan Kei Kecil Barat dan Desa Faan, Kecamatan Kei Kecil. Ngutun Rit Tenan Bes yaitu bukti perjalanan petualangan kedua bersaudara Tobi Tobai dari Bali singgah diberbagai tempat di Kepulauan Kei dan terus ke Irian dan sempat membawa pulang Tabob (penyu raksasa yang merupakan satwa yang paling penting bagi masyarakat adat pada beberapa kampung di Pulau Kei Kecil sebagai bagian dari kehidupan dan ritual masyarakat adat) di Nuhu Fit. Adapun Ngutun Rit Tenan Bes merupakan tempat mengisi perbekalan Tobi dan Tobai. Ngutun Rit ditinggalkan di Desa Matwair dan Tenan Bes ada di Desa Faan.

- 6) Situs **Tivun Wane Woma El Kelbui**, yang berlokasi di Desa Fer, Kecamatan Kei Besar Selatan. Tivun Wane adalah tempat persinggahan Ngabal yang dibawa oleh Wadufin Taileleuw dan istrinya Nen Dit Somar di Fer sebelum diserahkan kepada Hilaai Talarat Fer. Sedangkan Woma El Kelbui adalah pusat Desa Fer yang dijadikan sebagai tempat pengukuhan Hilaai Talarat Fer menjadi Rat Tubav Yamlim serta penancangan Hukum Lar Vul Ngabal.
- 7) Situs **Makam Tua bertuliskan Bahasa Arab**, yang berlokasi pada sebuah Masjid di Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan. Makam Tua bertuliskan Bahasa Arab ini menunjukkan bahwa Masjid dimaksud merupakan masjid tertua dan pusat penyebaran Agama Islam pertama di Kei.
- 8) Situs **Benteng Sarnil Famas**, yang berlokasi di Desa Danar, Kecamatan Kei Kecil Timur. Benteng Sarnil Famas merupakan markas pertahanan Lor Siw.

Penataan terhadap situs sejarah selama ini hanya baru dilakukan pada dua situs sejarah yakni Situs Makam Nen Dit Sakmas dan Siran Siryen (Amalir Lor). Secara lengkap situs-situs sejarah yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Nama-nama Situs Sejarah di Kabupaten Maluku Tenggara

No.	Nama Situs Sejarah	Lokasi
1.	Makam Keluarga Kasdew dan Jingra	Desa Letvuan dan Desa Ohoivur, Kecamatan Kei Kecil Timur
2.	Makam Nen Dit Sakmas	Desa Wain, Kecamatan Kei Kecil Timur
3.	Siran Siryen (Amalir Lor)	Desa Elaer Ngursoin, Kecamatan Kei Kecil Timur
4.	Wear Dit Balsobnaik	Desa Ler Ohoilim, Kecamatan Kei Besar
5.	Ngutun Rit Tenan Bes	Desa Matwair, Kecamatan Kei Kecil Barat dan Desa Faan, Kecamatan Kei Kecil
6.	Tivun Wane Woma El Kelbui	Desa Fer, Kecamatan Kei Besar Selatan
7.	Makam Tua Bertuliskan Bahasa Arab	Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan
8.	Luvat Sarak Rau	Desa Ohoidertavun, Kecamatan Kei Kecil
9.	Pulau Batu	Desa Revav, Kecamatan Kei Kecil Timur
10.	Batu Kapal Soblak	Desa Wain, Kecamatan Kei Kecil dan Desa Reyamru, Kecamatan Kei Besar
11.	Sumur Tua Wear Idar	Desa Letman, Kecamatan Kei Kecil
12.	Tombak Bambu Tobi yang telah berubah menjadi batu	Desa Matwair, Kecamatan Kei Kecil Barat
13.	Guci Tua	Tanjung Tun Kor Desa Tutrean, Kecamatan Kei Besar Selatan
14.	Meriam Portugis dan Gong	Desa Ohoiwait, Kecamatan Kei Besar
15.	Kuburan Tua	6 Desa

Sumber Data: Profil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011.

d. Komunitas Masyarakat Kei

Masyarakat Kei terdiri dari dua komunitas besar atau yang sering disebut Utan dan Lor, yakni Utan Ur Siw dan Utan Lor Lim. Utan Ur Siw adalah kelompok komunitas masyarakat yang membagi kerbau siw di Elaer Nguridin/Ngursoin kepada sembilan kelompok yang tersebar di daratan Kei Kecil dan hanya lambang Lar Vul ke Kei Besar. Kelompok Utan Ur Siw

kemudian mencanangkan terbentuknya Hukum LAR VUL, dengan menggunakan parang (siruk aferak) sebagai lambang Hukum Adat Lar Vul di Kei Kecil.

Lor Lim adalah kelompok komunitas yang membagi ikan paus (Lor) di Ler Ohoi Lim kepada lima kelompok yang kesemuanya berada di Kei Besar, dan hanya lambang Lor Lim di Kei Kecil. Kelompok LOR LIM kemudian mencanangkan terbentuknya Hukum NGABAL, dengan menggunakan nganga (tombak) sebagai lambang Hukum Adat Ngabal di Kei Besar sebelum disatukan dengan hukum Lar Vul menjadi HUKUM ADAT LAR VUL NGABAL bagi masyarakat Kei.

e. Bentuk Perkawinan Suku Kei

Penduduk asli Maluku Tenggara adalah Suku Kei. Kabupaten Maluku Tenggara juga disebut sebagai Kepulauan Kei. Daya tarik wisata budaya di Kabupaten Maluku Tenggara diantaranya bentuk perkawinan Suku Kei. Ada tiga bentuk perkawinan Suku Kei yaitu 1) Tai reet yavut (kawin minang), 2) Manu'u marai (kawin lari), dan 3) Tubriin (kawin masuk rumah).

Diantara tiga bentuk perkawinan Suku Kei di atas yang menjadi panutan dan contoh mencirikan bentuk perkawinan yang sarat dengan pola budaya masyarakat Kei adalah Bentuk tai reet yavut (kawin minang).

Bentuk kawin minang dapat terlaksana dengan melalui tahapan-tahapan tertentu sebagai berikut:

1) Tahap Lenan Reet Fid (meminang).

Dalam tahapan ini pihak laki-laki (yan ur) dengan segala persiapan datang ke rumah pihak perempuan (mangohoi) untuk meminang/meminta calon istri dari pihak perempuan dengan syarat-syarat yang telah dipersiapkan.

2) Tahap Sawe Kot (pacar).

Dalam tahapan ini pihak laki-laki (yan ur) dengan segala persiapan datang ke rumah pihak perempuan (mangohoi) untuk meminang/meminta calon istri dari pihak perempuan dengan syarat-syarat yang telah dipersiapkan.

3) Tahap Sawe Laai (resepsi/pengantin).

Tahapan ini merupakan tahapan pelaksanaan perkawinan, resepsi yang berlangsung, baik secara ritual keagamaan maupun secara adat.

4) Tahap Kabil Vat.

Pada tahapan ini pihak laki-laki (yan ur) datang ke rumah pihak perempuan (mangohoi) untuk mencari/mengambil pengantin perempuan dengan penyelesaian adat tertentu.

5) Tahap Tiva de tel / de vit.

Pada tahapan ini pihak laki-laki setelah berhasil membawa pulang mempelai wanita ke rumahnya maka mereka melaksanakan pesta selama tiga malam atau tujuh malam secara berturut-turut sebagai ungkapan rasa gembira dan bahagia atas acara dimaksud.

f. Bahasa Kei

Bahasa Kei adalah bahasa daerah yang dimiliki atau dipakai oleh orang Kei dan orang yang tinggal di Kei maupun orang yang ingin mempelajari dan menggunakannya di luar Kei.

Bahasa Kei dapat digunakan oleh semua orang Kei secara umum, walaupun terdapat perbedaan tekanan kata (*aksentuasi*) dan tekanan bagian kalimat (*intonasi*) antara masyarakat yang tinggal di wilayah Kei Besar dengan

masyarakat yang tinggal di wilayah Kei Kecil, namun tidak membedakan makna komunikasinya.

g. Tarian Adat

Tarian adat masyarakat Kei dibedakan atas dua jenis sebagai berikut:

1) Jenis Sosoi Adat (tarian adat) meliputi tari perjuangan dan penghormatan,

antara lain :

- Sosoi Temar Rubil : tari panah/tari perjuangan
- Sosoi Yirik : tari penghormatan
- Sosoi Ngabal : tari perjuangan
- Sosoi Lar Vul : tari perjuangan.

2) Jenis Sul Vaar meliputi :

- Sul Sawat : tari sawat
- Sul Sahmul : tari lenso
- Sul Bingan : tari piring.

Pada umumnya jenis Sul Vaar adalah produk dari luar tapi diterima oleh masyarakat sebagai khasanah pemer kaya budaya.

h. Lagu Adat

Ada kurang lebih delapan jenis lagu adat yang sering digunakan pada peristiwa-peristiwa tertentu dan jarang didengar dalam pergaulan biasa antara lain :

1) Ngel-ngel (bagian-bagian), dilagukan untuk menggambarkan peristiwa tertentu yang dialami orang/masyarakat tertentu.

2) Wawar, dilagukan untuk mengisahkan suatu peristiwa heroik atau keperkasaan seseorang atau sekelompok orang.

- 3) Atnanit, dilagukan untuk mengisahkan tentang kebesaran seseorang/marga, dan menyambut adat yan ur mangohoi.
- 4) Baut, dilagukan untuk mengisahkan tentang kebesaran seseorang dan juga nasehat kepada yang bersangkutan.
- 5) Maroin, dilagukan untuk mengisahkan tentang kerinduan/ratapan terhadap seseorang yang ditinggal pergi.
- 6) Snehat, dilagukan untuk menyindir, mengkritik, menasehati dengan maksud ada perubahan terhadap sesuatu.
- 7) Soryat, dilagukan untuk menghibur dalam suasana kegembiraan.
- 8) Lilik Sauk, dilagukan untuk penghormatan terhadap penguasa/pembesar.

Salah satu contoh lagu adat yang sering diperdengarkan pada berbagai acara adat seperti pada saat penyambutan tamu secara adat di Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebagai berikut.

Tom Nen Dit Sakmas
(Sejarah Ratu Nen Dit Sakmas)

Nen Dit o he
Nen Dit Sakmas o kelmutun
O mahilinga he

Bir balwirin fel baing laar
Sunyatak lor kerbau siw a he
Lor utan tel murawtel dean
Rom be yal-yal naa meor hoi nean
Ne mew um fit i royo

Mear ohoi nean ne mew umfit
Bir dada wang tawur solor
Wewew sun tut lor maur ohoiwut
Nen Dit Sakmas o kelmutun
O mahilinga he

Nen Dit o hee

Artinya secara umum sebagai berikut:
Memuliakan keagungan Ratu Nen Dit Sakmas
Karena menciptakan Hukum Adat Lar Vul
Merupakan patokan bagi generasi penerus daerah Kei

i. Hukum Adat Lar Vul Ngabal

Hukum Adat Lar Vul Ngabal adalah Hukum Adat masyarakat Kei yang mengatur tentang semua aspek dan tatanan hidup masyarakat Kei. Hukum Adat ini lahir sejak masyarakat Kei berada di daratan Kepulauan Kei walaupun masih bersifat lokal. Hukum Adat Lar Vul Ngabal merupakan hukum adat tertinggi, memiliki kedudukan yang sangat strategis karena merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dari kandungan bumi negeri Kei dan telah disepakati pemberlakuannya, oleh karena itu Hukum Adat Lar Vul Ngabal bersifat mengikat seluruh masyarakat Kei dari saat ke saat dan dari generasi ke generasi.

Dahulu kala di Kepulauan Kei di setiap ohoi atau komunitas tertentu memiliki sistem hidup yang diatur dengan adatnya masing-masing, terutama oleh penduduk asli atau yang disebut tuan tanah (Kelompok Nuhuduan). Setelah hadirnya para musafir (kelompok pendatang/kelompok Mardat) telah membawa pengaruh dengan terjadinya pembaharuan dalam pola hidup, terutama pembaharuan dalam memadukan hukum-hukum adat lokal menjadi suatu unifikasi hukum adat universal masyarakat Kei yang kemudian disebut Hukum Adat Lar Vul Ngabal.

Hukum Adat Lar Vul Ngabal berbentuk supel karena hanya memuat tujuh pasal meliputi:

- 1) Pasal 1, 2, 3, 4 mengatur tentang betapa penting kehidupan dan derajat hidup sehingga manusia tidak boleh menjadi musuh atau melukai dan membunuh

manusia yang lain serta saling menghormati sesuai derajat dan martabat yang diatur dalam tatanan adat.

- 2) Pasal 5 dan 6 mengatur tentang kesusilaan atau kesucian dan martabat kaum wanita, oleh karena itu orang Kei biasanya menjaga batas-batas pergaulan termasuk batas/sekat dalam rumah yang melindungi tempat suci dimana ditempati oleh istri orang atau para gadis.
- 3) Pasal 7 mengatur tentang hak milik orang, dimana ditegaskan bahwa yang menjadi hak orang itu tidak boleh dikhianati, sebaliknya menjadi milik kita tidak boleh diganggu oleh orang lain.

3. ODTW lainnya, yang terdiri dari:

a. Taman Ziarah Bukit Masbait

Objek wisata ini tergolong wisata religi. Terletak di Desa Kelanit Kecamatan Kei Kecil. Merupakan tempat ziarah dan berdoa bagi pemeluk Agama Katolik. Letaknya di atas Bukit Masbait yang merupakan bukit tertinggi di Kabupaten Maluku Tenggara sehingga tempat ini menjadi cocok untuk menikmati panorama alam pulau Nuhu Roa maupun pulau Dullah. Objek wisata ini berjarak 9 km dari Langgur dengan waktu tempuh 15 menit. Belum ada rambu-rambu petunjuk arah menuju objek.

Setiap hari minggu jumlah pengunjung kira-kira mencapai 100-200 orang. Belum termasuk pengunjung yang datang setiap hari sekitar 10-20 orang (Observasi, 28-29 Oktober 2012).

b. Penangkaran Mutiara Ohoiwa

Tergolong ODTW buatan, lokasi di Desa Ohoiwa Kecamatan Kei Kecil. Di tempat ini wisatawan dapat menyaksikan proses penangkaran, pengolahan sampai dengan persiapan pemasaran mutiara.

c. Gelanggang Bermain Anak Alien Gota

Tergolong wisata buatan, lokasi di Kelurahan Ohoijang Watdek Kecamatan Kei Kecil. Berbagai jenis permainan anak dapat dilihat dan dimainkan disini. Bagi anak-anak di daerah ini, gelanggang bermain anak Alien Gota menjadi tempat primadona yang dikunjungi bukan hanya pada hari-hari libur saja namun juga pada hari-hari biasanya.

d. Gota *Supermarket and Department Store*

Tergolong wisata buatan (wisata belanja), lokasi di Kelurahan Ohoijang Watdek Kecamatan Kei Kecil. Berbagai jenis kebutuhan pokok rumah tangga dan kebutuhan lainnya tersedia di sini.

Letaknya yang sangat strategis di pusat pemerintahan menjadikan tempat ini setiap saat selalu ramai dikunjungi bukan saja oleh masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara namun juga dari Kota Tual. Beroperasi dari jam 10.00 - 22.00 WIT dengan karyawannya sebagian besar merupakan anak asli Kei.

e. Pasar Malam

Tergolong wisata kuliner, lokasi di Kelurahan Ohoijang Watdek Kecamatan Kei Kecil. Berbagai jenis makanan khas daerah seperti enbal, arwan (sayur) sir-sir, kacang botol dan ikan bakar colo-colo dijual di sini.

Setiap malam sangat ramai dikunjungi oleh pembeli yang bukan hanya masyarakat Kei saja namun juga masyarakat lainnya yang telah menetap di

Kabupaten Maluku Tenggara seperti orang Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Bahkan banyak wisatawan yang membeli untuk dijadikan oleh-oleh. Pasar malam ini beroperasi mulai jam 19.00 - 23.00 WIT.

f. Atraksi Pembuatan Enbal

Enbal merupakan makanan tradisional masyarakat Kei yang terbuat dari ubi dan selalu disajikan pada acara resmi pemerintahan maupun acara adat. Sampai saat ini, enbal dapat dijumpai di setiap rumah penduduk. Setiap wisatawan yang datang dan berminat mengetahui lebih dalam tentang makanan pokok masyarakat Kei ini sering disuguhkan atraksi pembuatannya bahkan wisatawan ingin mempraktekkan langsung pembuatan enbal. Desa Ngilngof di Kecamatan Kei Kecil dan Desa Haar Kecamatan kei Besar Utara Timur sering menyuguhkan atraksi dimaksud.

g. Kerajinan Tangan

Kerajinan tangan masyarakat Kei yang dapat dijadikan souvenir bagi setiap wisatawan beraneka macam, misalnya kerajinan anyaman daun tikar di Desa Tanimbar Kei, kerajinan tembikar dan perhiasan dari tembaga di Desa Banda Ely.

Kabupaten Maluku Tenggara juga sangat kaya akan hasil laut berupa mutiara yang memiliki kualitas sangat baik dan merupakan produk unggulan daerah serta terbukti memiliki banyak peminat, bukan hanya pada skala lokal, nasional namun sudah sampai skala internasional. Mutiara ini sering dijadikan perhiasan dalam bentuk cincin emas mutiara maupun rantai (Wawancara dengan Ibu Fatimah Renngiwur, S.Sos, Kepala Seksi Standar Mutu Produk, Objek dan Daya Tarik Wisata, 18 Oktober 2012).

Secara lengkap obyek dan daya tarik wisata (ODTW) di Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3 Rekapitulasi ODTW di Kabupaten Maluku Tenggara

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi
1.	Pantai Ngurbloat	Wisata Alam Bahari	Desa Ngilngof, Kec. Kei Kecil
2.	Pantai Ngursarnadan	Wisata Alam Bahari	Desa Ohoililir, Kec. Kei Kecil
3.	Pantai Nadiun Ohoidertawun	Wisata Alam Bahari	Desa Ohoidertawun, Kec. Kei Kecil
4.	Pantai Elomel	Wisata Alam Bahari	Desa Sathean, Kec. Kei Kecil
5.	Pantai Debut	Wisata Alam Bahari	Desa Debut, Kec. Kei Kecil
6.	Pantai Disuk	Wisata Alam Bahari	Desa Disuk, Kec. Kei Kecil Timur
7.	Tanjung Kor	Wisata Alam Bahari	Tanjung Kor, Kec. Kei Kecil Barat
8.	Pulau Kelapa	Wisata Alam Bahari	Pulau Kelapa Banda Elat, Kec. Kei Besar
9.	Pantai Daftel	Wisata Alam Bahari	Dusun Daftel, Kec. Kei Besar
10.	Pantai Walar	Wisata Alam Bahari	Desa Ohoiwait, Kec. Kei Besar
11.	Pemandian Alam Evu	Wisata Alam Tirta	Desa Evu, Kec. Kei Kecil
12.	Air Terjun Kasair	Wisata Alam Tirta	Desa Frawaf, Kec. Kei Besar
13.	Air Baluruk	Wisata Alam Tirta	Desa Tamangil Nuhuten, Kec. Kei Besar Selatan
14.	Goa Hawang	Wisata Alam Goa	Desa Letvuan, Kec. Kei Kecil
15.	Goa Tanimbar Kei	Wisata Alam Goa	Desa Tanimbar Kei, Kec. Kei Kecil Barat
16.	Taman Ziarah Bukit Masbait	Wisata Religi	Desa Kelanit, Kec. Kei Kecil
17.	Taman Ziarah Uskup Johannes Aerts	Wisata Religi	Desa Langgur, Kec. Kei Kecil
18.	Taman Wisata Budaya Letman	Wisata Budaya	Desa Letman, Kec. Kei Kecil
19.	Desa Adat Tanimbar Kei	Wisata Budaya	Desa Tanimbar Kei, Kec. Kei Kecil Barat
20.	Desa Seni Banda Ely	Wisata Budaya/Sejarah	Desa Banda Ely, Kec. Kei Besar Utara Timur
21.	Pasar Malam	Wisata Kuliner	Kelurahan Ohoijang Watdek, Kec. Kei Kecil
22.	Penangkaran Mutiara Ohoiwa	Wisata Buatan	Desa Ohoiwa, Kec. Kei Kecil
23.	Agrowisata Salak	Wisata Buatan	Desa Namar, Kec. Kei Kecil
24.	Gelandang Bermain Anak Alien Gota	Wisata Buatan	Kelurahan Ohoijang Watdek, Kec. Kei Kecil
25.	Gota <i>Supermarket and Department Store</i>	Wisata Buatan/Belanja	Kelurahan Ohoijang Watdek, Kec. Kei Kecil

Sumber Data: Profil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011.

4. Usaha Pariwisata, yang terdiri dari:

a. Usaha Akomodasi

Usaha akomodasi di Kabupaten Maluku Tenggara meliputi hotel sebanyak enam buah, wisma sebanyak satu buah, losmen sebanyak satu buah dan penginapan sebanyak lima buah. Secara lengkap usaha akomodasi di Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat pada Tabel 4.4. berikut.

Tabel 4.4 Kondisi Keberadaan Usaha Akomodasi di Kabupaten Maluku Tenggara

No.	Jenis Usaha Akomodasi	Klasifikasi
1.	Hotel Villia	Bintang 1
2.	Hotel Dragon	Melati
3.	Hotel Suita	Belum diklasifikasi
4.	Aurelia Hotel	Belum diklasifikasi
5.	Hotel Langgur	Melati
6.	Hotel Rosemgen	Melati
7.	Penginapan Delima	Melati
8.	Penginapan Eden	Melati
9.	Penginapan Sanuhi	Melati
10.	Penginapan Puri Kencana	Melati
11.	Penginapan Lia	Melati
12.	Wisma Matahari	Melati
13.	Homestay Evalin	Melati
14.	Losmen Havana Illinois	Melati
15.	Coastar Cottage	Melati

Sumber Data: Profil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011.

b. Usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan Agen Perjalanan Wisata (APW)

Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata di Kabupaten Maluku Tenggara meliputi BPW sebanyak 2 buah dan APW 3 buah. Secara lengkap usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan Agen Perjalanan Wisata (APW) di Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Kondisi Keberadaan Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata di Kabupaten Maluku Tenggara

No.	Nama BPW/APW	Golongan Usaha
1.	Mitra Pratama Dirgantara	BPW
2.	Mitra Prima Jaya	APW
3.	Suita Tour's and Travel	APW
4.	Mutiara Travel	APW
5.	Travel Planet	BPW

Sumber Data: Profil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011.

c. Usaha Pariwisata lainnya

Usaha pariwisata lainnya yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara yakni toko souvenir sebanyak dua buah, karaoke sebanyak lima buah, salon kecantikan sebanyak tujuh buah dan restoran sebanyak satu buah.

d. Sarana prasarana penunjang pembangunan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara

Sarana prasarana penunjang pembangunan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara meliputi ketersediaan Bandar Udara Dumatubun yang dikelola oleh TNI Angkatan Udara dengan runway 900x25 m untuk pendaratan pesawat tipe Cassa 212 dan Foker 27. Sedangkan pembangunan bandar udara internasional di Desa Ibra masih terus dilakukan. Adapun armada penerbangan yaitu Merpati Nusantara, Trigana Air, dan Wings Air. Selama tahun 2011, jumlah penerbangan sebanyak 2.946 penerbangan, 1.474 penerbangan tiba di Bandara Dumatubun dan 1.472 penerbangan berangkat dari Bandara Dumatubun. Jumlah penumpang pada tahun 2011 meningkat 3,66 persen dibandingkan jumlah penumpang pada tahun 2010. Kabupaten Maluku Tenggara juga dapat dijangkau melalui transportasi laut dengan menggunakan kapal milik Pelnis seperti KM. Kelimutu, KM. Ciremai, dan KM. Tatamailau yang masuk melalui Pelabuhan Namngil Vovo Kota Tual.

Angkutan umum baik darat maupun laut menuju objek wisata masih sangat terbatas padahal hampir seluruh objek wisata yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara sangat layak dikunjungi. Hal ini mengakibatkan keberadaan objek wisata yang ada belum mampu berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Listrik, telepon, dan kondisi jalan sangat penting bagi seluruh aktifitas pengembangan pariwisata dan merupakan syarat mutlak bagi masuknya investasi di suatu daerah wisata. Tenaga listrik yang diusahakan oleh PT. PLN lokasi PLTD Langgur dan sub ranting Elat jumlah mesin 19 buah, kapasitas terpasang 8.220 KW, dan daya mampu 5.190 KW dan telah menjangkau hampir seluruh wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara.

Sambungan telepon tetap di Kabupaten Maluku Tenggara hanya tersedia di dua kecamatan saja, Kecamatan Kei Kecil dan Kecamatan Kei Besar. Banyaknya sambungan telepon pada tahun 2011 adalah sebanyak 3.520 sambungan, sebanyak 3.488 sambungan di Kecamatan Kei Kecil dan 32 sambungan di Kecamatan Kei Besar.

Jalan di Kabupaten Maluku Tenggara memiliki total panjang 623,66 Km, yang terdiri atas 62,31 Km jalan negara, 129 Km jalan provinsi, dan 432,35 Km jalan kabupaten.

C. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara

Analisis SWOT pada penelitian ini dimulai dengan identifikasi faktor internal dan eksternal pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara. Identifikasi faktor internal dan eksternal dilakukan dengan menggunakan teknik

wawancara, observasi atau telaahan dokumen. Identifikasi faktor internal dengan menggunakan teknik wawancara, observasi atau telaahan dokumen dilakukan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mencari pemecahan masalah selain itu untuk mengidentifikasi sejumlah kemampuan dan sumber daya internal yang dapat diandalkan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah tertuang secara rinci dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2013. Hasil wawancara maupun observasi atau telaahan dokumen itu diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam kategori kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

Hasil identifikasi faktor internal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (*strengths*)

a. Potensi seni budaya dan sosial masyarakat Kei yang unik dan terjaga.

Masyarakat Kei atau Suku Kei merupakan penduduk asli yang mendiami Kabupaten Maluku Tenggara. Masyarakat Kei memiliki potensi seni budaya yang beragam baik yang terwujud dalam bentuk perkawinan Suku Kei, bahasa Kei, tarian adat maupun lagu adat sebagaimana telah digambarkan sebelumnya. Selain itu masyarakat Kei juga memiliki hukum adat yang mengatur tentang semua aspek dan tatanan hidup masyarakat Kei yang disebut Hukum Adat Lar Vul Ngabal. Hukum adat ini merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan adat masyarakat Kei dan dijunjung tinggi serta dihormati. Dalam kalangan sosial masyarakat Kei juga dikenal adanya pembagian strata/kelas masyarakat antara lain Kelas

Mel (kalangan atas), Kelas Ren (kalangan menengah), dan Kelas Iri (kalangan bawah). Pembagian strata/kelas dalam kalangan masyarakat Kei ini diakui ada hingga saat ini. Namun menurut penjelasan Bapak Ahmad Dfinubun yang merupakan tokoh masyarakat Kei dan juga budayawan bahwa kemerdekaan semua kelompok/kelas tetap terjaga, terjalinnya hubungan yang harmonis antar sesama dengan tetap menjaga batas-batas tertentu dan etika.

b. Memiliki obyek dan daya tarik wisata yang banyak dan beragam.

Obyek wisata yang terdata oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari obyek wisata alam bahari sebanyak 10 obyek, yakni Pantai Ngurbloat, Pantai Ngursarnadan, Pantai Nadiun Ohoidertawun, Pantai Elomel dan Pantai Debut, Pantai Disuk, Tanjung Kor, Pulau Kelapa, Pantai Daftel dan Pantai Walar. Obyek wisata tirta (pemandian alam) sebanyak 3 obyek, yakni Pemandian Alam Evu, Air Terjun Kasair dan Air Baluruk. Obyek wisata alam Goa sebanyak 2 obyek yakni Goa Hawang dan Goa Tanimbar Kei. Obyek wisata religi sebanyak 2 obyek yakni Taman Ziarah Bukit Masbait dan Taman Ziarah Uskup Johannes Aerts. Obyek wisata budaya dan sejarah sebanyak 25 obyek yang terdiri dari obyek wisata budaya sebanyak 3 obyek yakni Desa Adat Tanimbar Kei, Desa Seni Banda Ely, dan Taman Wisata Budaya Letman serta 21 situs sejarah. Kabupaten Maluku Tenggara juga memiliki 4 obyek wisata buatan yakni Penangkaran Mutiara Ohoiwa, Agrowisata Salak, Gelanggang Bermain Anak Alien Gota, dan Gota *Supermarket and Department Store*.

- c. **Tersedianya sarana transportasi laut dari berbagai wilayah seperti Jawa dan Sulawesi, terutama Ambon dan Papua dan tersedia penerbangan dari dan ke Ambon setiap hari pulang pergi.**

Ketersediaan sarana transportasi baik laut maupun udara yang memadai dari dan menuju Kabupaten Maluku Tenggara sebagai destinasi wisata merupakan faktor penunjang pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara karena memudahkan setiap wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Maluku Tenggara kapan saja. Transportasi laut dari dan menuju Kabupaten Maluku Tenggara menggunakan kapal PELNI seperti KM. Kerinci, KM. Tatamailau, dan KM. Ciremai. Sedangkan untuk transportasi udara tersedia 3 pesawat terbang yakni Wings Air, Trigana Air, dan Merpati Airlines yang melayani penerbangan Langgur menuju Ambon setiap hari pulang pergi.

- d. **Tersedia beberapa fasilitas akomodasi yang cukup representatif untuk kepentingan wisatawan.**

Ketersediaan fasilitas akomodasi dalam jumlah dan kualitas yang memadai merupakan hal penting dalam meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan waktu lama tinggal wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata. Kabupaten Maluku Tenggara memiliki fasilitas akomodasi berupa hotel sebanyak 6 buah yang terdiri dari Bintang 1 sebanyak 1 buah yakni Hotel Villia, Melati sebanyak 3 buah yakni Hotel Dragon dan Hotel Langgur serta 2 hotel lainnya yang belum diklasifikasi yakni Hotel Suita dan Aurelia Hotel, namun menurut keterangan Ibu Ena Notanubun, SE, selaku Kepala Seksi Usaha Sarana pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, di tahun 2013 akan dilakukan klasifikasi dan walaupun belum diklasifikasi, secara umum Hotel Suita memenuhi kriteria sebagai Bintang 3 dan Aurelia Hotel memenuhi kriteria sebagai Bintang 1. Fasilitas akomodasi lainnya seperti Penginapan sebanyak 5 buah yakni Penginapan Delima, Penginapan Eden, Penginapan Sanuhi, Penginapan Puri Kencana, dan Penginapan Lia. Wisma sebanyak 1 buah yakni Wisma Matahari, Homestay sebanyak 1 buah yakni Homestay Evalin, Losmen sebanyak 1 buah yakni Losmen Havana Illinois dan beberapa *coastar cottage* dan bungalow pada obyek wisata.

e. Adanya Falsafah Ain Ni Ain.

Falsafah Ain Ni Ain yang dianut oleh masyarakat Maluku Tenggara memandang semua orang yang datang dan atau tinggal menetap di Kabupaten Maluku Tenggara adalah saudara. Falsafah ini membentuk karakter masyarakat Maluku Tenggara yang ramah dan menghormati setiap tamu yang datang juga dapat menciptakan kondisi daerah yang aman dan damai. Hal ini tentu merupakan modal besar bagi meningkatnya kunjungan wisatawan atau dapat membuat wisatawan datang kembali ke Kabupaten Maluku Tenggara karena membawa kesan dan pengalaman yang baik.

2. Kelemahan (weaknesses)

a. Belum terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Belum berkembangnya pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara salah satu penyebabnya yaitu belum terbentuknya Badan Promosi Pariwisata

Daerah, padahal Badan Promosi Pariwisata Daerah yang fungsinya sebagai koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah dan merupakan mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah memegang peran strategis dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara. Badan Promosi Pariwisata Daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mempunyai tugas meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia, meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa, meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan, menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata. Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pariwisata. Menurut Ibu Aloysia Jaflean selaku Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata, baik Badan Promosi Pariwisata Daerah maupun asosiasi pariwisata sulit untuk dibentuk di Kabupaten Maluku Tenggara karena tidak ada inisiatif dari pelaku usaha pariwisata untuk pembentukannya diantaranya melalui rapat, pertemuan maupun sejenisnya. Selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara yang mendorong dan memfasilitasi pembentukannya. Upaya yang dilakukan juga selalu gagal karena banyak dari pelaku usaha pariwisata yang diundang tidak hadir.

b. Belum ada regulasi pendukung investasi bidang pariwisata.

Investasi mempunyai peranan penting dalam mengembangkan pariwisata di daerah. Peningkatan jumlah investasi baik investasi dalam negeri maupun asing akan dapat mendorong percepatan pengembangan pariwisata di daerah. Kehadiran investor akan dapat menjadi mitra kerja pemerintah dalam mewujudkan ketersediaan berbagai sarana dan prasarana pendukung bidang pariwisata seperti hotel, restoran, dan lainnya yang pada akhirnya dapat menciptakan kesempatan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini selayaknya menjadi perhatian pemerintah daerah karena pada kenyataannya pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengembangkan pariwisata sehingga diperlukan kebijakan yang lebih memihak kehadiran investor di daerah. Secara nyata, sampai saat ini belum ada kebijakan pendukung investasi bidang pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara, baik dalam bentuk perda yang mengatur tentang investasi bidang pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara maupun dalam bentuk lainnya seperti nota kesepahaman (MoU). Menurut Bapak Beni Ohoitumur selaku pengelola obyek wisata pantai Ngurbloat yang merupakan obyek wisata unggulan di Kabupaten Maluku Tenggara dan paling banyak dikunjungi oleh wisatawan, bahwa beberapa prasarana pariwisata telah dibangun di obyek wisata ini namun belum ada satupun nota kesepahaman (MoU) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang mekanisme pengelolaan obyek wisata, yang menurut masyarakat

setempat sangat penting untuk pengelolaan dan pemanfaatan obyek wisata ini pada waktu sekarang dan seterusnya.

c. Belum adanya website Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara.

Belum adanya website Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara menyebabkan upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara selama ini belum mampu secara optimal dalam memperkenalkan Kabupaten Maluku Tenggara secara luas baik pada tataran nasional maupun internasional. Pemanfaatan teknologi informasi melalui *website* sangat diperlukan untuk mengenalkan dan mempromosikan potensi-potensi wisata kepada masyarakat luas. Selain mengenalkan kepada masyarakat luas, pemanfaatan teknologi informasi melalui *website* juga dapat menarik investor-investor untuk berkontribusi aktif dalam usaha peningkatan pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara.

d. Keterbatasan anggaran pengembangan pariwisata.

Dukungan APBD Kabupaten Maluku Tenggara dalam pengembangan pariwisata sangat rendah padahal sektor pariwisata merupakan sektor unggulan di daerah. Sesuai data LAKIP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, dukungan APBD untuk sektor pariwisata tahun 2008 sebesar Rp. 2.491.940.179, tahun 2009 sebesar Rp. 3.122.054.350, sudah termasuk didalamnya pembangunan fisik sebesar Rp. 1.460.000.000 yang seharusnya dapat dikerjakan oleh investor, tahun 2010 sebesar Rp. 4.053.083.575, sudah termasuk

didalamnya pembangunan fisik sebesar Rp. 1.492.786.500, dan tahun 2011 sebesar Rp. 2.287.790.500 dengan anggaran pembangunan fisik sebesar Rp. 1.630.813.000. Adapun anggaran pembangunan sektor pariwisata di tahun 2012 sebesar Rp. 1.962.574.000, sudah termasuk didalamnya pembangunan fisik sebesar Rp. 1.538.200.000. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, telah diusulkan sejumlah anggaran guna membiayai beberapa program dan kegiatan yang dinilai strategis dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara namun tidak diakomodir, bahkan untuk tahun 2011 dan 2012 anggaran pengembangan pariwisata diturunkan.

e. Rendahnya kontribusi sektor pariwisata bagi Pendapatan Asli Daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Salah satu sektor yang dikembangkan adalah pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah. Melalui penyerahan urusan pilihan pariwisata ke Kabupaten maupun Kota, maka setiap kabupaten maupun kota dapat mengoptimalisasi potensi pariwisata terbaik yang dimilikinya sehingga dapat berkontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

Sektor pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 ini telah dijadikan sebagai prioritas sumber pendapatan asli daerah dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Maluku Tenggara

memiliki banyak obyek wisata yang sangat menarik, beberapa prasarana akomodasi yang layak bagi wisatawan serta tersedianya sarana perhubungan menuju Kabupaten Maluku Tenggara sebagai destinasi pariwisata baik sarana perhubungan laut maupun udara.

Sesuai data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan asli daerah sejak tahun 2008 sampai 2012 secara umum masih sangat rendah dan hanya pada tahun 2009 saja yang melampaui target yang ditetapkan. Hal ini tergambar secara jelas pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Kontribusi Sektor Pariwisata bagi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008 sampai dengan Bulan September 2012

No.	Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)
1.	2008	639.480.276	386.840.803
2.	2009	449.480.276	556.652.073
3.	2010	707.511.442	643.236.804,30
4.	2011	746.229.235,01	709.874.480
5.	2012		173.654.766

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Objek pendapatan asli daerah di atas terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara serta retribusi izin prinsip yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara. Pendapatan asli daerah dari Retribusi Izin Prinsip inipun sangat rendah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, realisasi Retribusi Izin Prinsip pada tahun

2008 hanya sebesar Rp. 6.150.000, tahun 2009 sebesar Rp. 6.710.000, tahun 2010 sebesar Rp. 6.460.000, tahun 2011 dan sampai dengan September 2012 masing-masing sebesar Rp. 9.610.000 dan Rp. 500.000. Padahal objek retribusi izin prinsip ini sangat banyak, baik berupa restoran, rumah makan, salon kecantikan, karaoke, hotel, penginapan, wisma, losmen maupun agen perjalanan wisata, dengan besaran retribusi terendah suatu obyek Rp. 100.000 dan tertinggi Rp. 1.500.000. Jika dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah yang pada akhirnya melalui pendapatan asli daerah ini diharapkan dapat berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Menurut Ibu Aloysia Jaflean selaku Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata yang juga merupakan pengelola retribusi Izin Prinsip pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara disebutkan ada beberapa alasan rendahnya pemasukan retribusi Izin Prinsip yakni kurangnya sosialisasi tentang retribusi izin prinsip. Izin prinsip menurut Ibu Aloysia Jaflean merupakan izin kelayakan suatu usaha pariwisata. Artinya, izin prinsip merupakan satu-satunya dasar dijalankannya suatu usaha pariwisata. Walaupun izin terkait lainnya seperti Izin Gangguan telah diberikan namun tanpa izin prinsip maka usaha pariwisata dimaksud tidak dapat dijalankan. Pemasukan izin prinsip yang rendah disebabkan juga karena rendahnya kesadaran dari pelaku usaha pariwisata dalam membayar retribusi izin prinsip serta database usaha pariwisata yang masih merupakan data tahun 2008 sehingga tidak

sesuai lagi dengan kondisi terkini padahal usulan untuk diperbaharui database ini telah diajukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2009 hingga 2012 namun tidak pernah terakomodir.

f. Terbatasnya sarana dan prasarana pariwisata.

Sarana dan prasarana pariwisata yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung datangnya wisatawan ke suatu destinasi wisata. Artinya semakin memadai sarana dan prasarana pariwisata yang dimiliki maka semakin meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi tersebut. Kabupaten Maluku Tenggara sangat terbatas sarana dan prasarana yang dimiliki. Menurut penuturan beberapa orang masyarakat yang tinggal di sekitar obyek wisata Pantai Ngurbloat dan Pantai Ngursarnadan bahwa prasarana seperti tenda-tenda jualan dan tempat duduk pengunjung semuanya milik masyarakat. Adapun beberapa rumah payung yang dibangun oleh Pemerintah Daerah kondisinya telah rusak dan tidak layak digunakan. Sedangkan sarana penunjang obyek wisata seperti *banana boat*, perahu kaca, sepeda pantai tidak ada samasekali, bahkan untuk obyek wisata unggulan daerah Pantai Ngurbloat sekalipun. Lebih lanjut dijelaskan oleh masyarakat bahwa beberapa prasarana yang dibangun pada obyek wisata tidak pernah diikuti dengan upaya pemeliharannya sehingga menjadi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi.

g. Belum terbentuknya Kelompok Sadar Wisata pada semua obyek wisata.

Pengembangan pariwisata akan optimal jika didukung oleh peran serta masyarakat yang sadar akan pentingnya pariwisata bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Agar terciptanya wawasan masyarakat tentang pembangunan kepariwisataan daerah khususnya bina masyarakat sadar wisata pada desa-desa atau kawasan yang memiliki daya tarik wisata maka perlu dibentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) melalui Surat Keputusan Kepala Daerah atau Kepala Dinas yang menangani pariwisata. Sampai saat ini belum satupun terbentuk Pokdarwis di Kabupaten Maluku Tenggara.

h. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur dan tenaga kerja di bidang kepariwisataan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pegawai pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara mayoritas adalah bukan dari lulusan studi bidang kepariwisataan. Adapun lulusan studi bidang kepariwisataan hanya sebanyak 5 orang dari 35 orang pegawai. Penempatan pegawai pada bidang seperti Bidang Pengembangan Produk Wisata, Bidang Kebudayaan maupun Bidang Pemasaran tidak sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Hal ini menurut Bapak Petrus Renwarin, SE, M.Si sangat mengganggu dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Sedangkan tenaga kerja yang kompeten di bidang kepariwisataan masih sangat rendah kualitasnya dan terbatas jumlahnya.

i. Belum terkelolanya obyek wisata secara profesional.

Secara keseluruhan obyek wisata yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara belum dikelola secara profesional. Tidak ada loket untuk pengambilan karcis masuk obyek wisata. Setiap wisatawan sebelum masuk obyek dibatasi hanya dengan portal yang terbuat dari bambu dengan maksud untuk menagih biaya masuk setiap pengunjung ke obyek wisata. Tidak adanya areal parkir membuat semua kendaraan bebas keluar masuk ke kawasan inti obyek wisata. Hal ini tentu dapat merusak lingkungan. Belum ada retribusi obyek wisata. Adapun seluruh pendapatan yang terkait dengan pemanfaatan obyek wisata semuanya menjadi milik desa kecuali beberapa bungalow yang dibangun oleh pemerintah daerah.

j. Database usaha pariwisata yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Database usaha pariwisata yang ada saat ini di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara adalah database usaha pariwisata tahun 2008. Hal ini tentu sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan pengembangan pariwisata kedepannya.

Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari pengaruh lingkungan eksternal. Upaya pengembangan pariwisata yang tidak mampu mencermati dan menganalisis perubahan keadaan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal secara akurat, akan menimbulkan berbagai hambatan dalam mewujudkan masa depan pariwisata sebagaimana dirumuskan dalam visi dan

misi. Untuk itu upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara harus mencermati perubahan keadaan lingkungan eksternalnya.

Faktor eksternal dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara dibagi menjadi dua bagian yakni peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

Hasil identifikasi faktor eksternal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

I. Peluang (*opportunities*)

a. Wisata bahari dan budaya sangat diminati oleh wisatawan mancanegara.

Potensi bahari sangat menonjol di Kabupaten Maluku Tenggara. Hamparan pasir putih yang sangat halus dijumpai pada semua obyek wisata pantai di Kabupaten Maluku Tenggara didukung dengan keadaan sekitar obyek yang masih alami dan keindahan alam bawah laut yang sangat beragam dan kaya akan potensi biota laut. Bahkan keunggulan potensi bahari yang dimiliki telah menjadikan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai anggota Asosiasi Bupati/Walikota Destinasi Sail Indonesia yakni sebuah asosiasi yang menangani event perahu layar yang melintasi destinasi di Indonesia yang unggul dalam potensi baharinya. Selain itu Kabupaten Maluku Tenggara juga memiliki adat istiadat dan kehidupan budaya yang unik dan telah menjadi atraksi wisata budaya. Menurut Bapak Budi Toffi, S.Par selaku Kepala Seksi Promosi, Tenaga dan Sarana pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, setiap bulan terdata 15 sampai 25 wisatawan

mancanegara yang menyatakan minat untuk berkunjung ke Kabupaten Maluku Tenggara dengan tema paket wisata yang diminta adalah wisata bahari dan budaya.

b. Investasi usaha wisata masih terbuka di sejumlah obyek wisata.

Obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Maluku Tenggara sangat banyak dan menarik serta masih perlu dikembangkan. Hal ini tentu membuka peluang investasi baik investasi dalam negeri maupun asing. Menurut keterangan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Bapak Ir. Lukas Retraubun, MBA, M.Si) bahwa investasi yang ada di obyek wisata saat ini semuanya berasal dari masyarakat sekitar, belum ada satupun investasi dalam negeri maupun asing di Kabupaten Maluku Tenggara.

c. Diberlakukannya otonomi daerah.

Otonomi daerah memberikan peluang kepada setiap daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki baik untuk peningkatan pendapatan asli daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah juga memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengambil segala kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata di daerah.

d. Pembangunan bandara bertaraf internasional.

Selama ini bandara yang digunakan adalah Bandara Dumatubun di Langgur milik TNI Angkatan Udara yang hanya dapat menampung pesawat tipe Fokker-27 dan Cassa 212 ATR-42/300. Melalui pembangunan Bandara internasional di Desa Ibra yang rencananya akan

beroperasi pada bulan Maret 2013 akan membuka peluang meningkatnya kunjungan wisatawan di Kabupaten Maluku Tenggara.

e. Terdapatnya acara-acara kesenian dan kebudayaan daerah.

Menurut keterangan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, untuk tahun 2013 telah ditetapkan sejumlah acara kesenian dan kebudayaan daerah seperti Pesta Kesenian Maluku Tenggara, Festival Perahu Belan, Gelar Tabob yakni suatu acara yang menonjolkan satwa penyu belimbing atau penyu raksasa dengan prosesi adat, dan Pengukuhan Rat (Raja pada kelompok masyarakat/Ratchap di Kabupaten Maluku Tenggara). Melalui pelaksanaan berbagai acara tersebut diharapkan dapat menarik banyak kunjungan wisatawan ke Kabupaten Maluku Tenggara.

2. Ancaman (*threats*)

a. Kabupaten Maluku Tenggara belum cukup dikenal dalam khasanah pariwisata di Indonesia.

Dalam khasanah pariwisata di Indonesia, Kabupaten Maluku Tenggara belum cukup dikenal sebagai destinasi wisata. Hal ini berdampak pada sedikitnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Maluku Tenggara sehingga dapat menyebabkan rendahnya penerimaan daerah dan juga akan mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat sekitarnya.

b. Persaingan dengan daerah lain yang sama potensinya, terutama di Provinsi Maluku.

Potensi pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara secara umum sama dengan daerah lain di Provinsi Maluku. Hal ini tentu menjadi suatu

ancaman bagi Kabupaten Maluku Tenggara jika potensi yang ada tidak dikemas dengan baik.

c. Asosiasi Pariwisata yang belum mapan.

Asosiasi Pariwisata yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pariwisata sesuai bidangnya masing-masing baik yang bergerak di bidang perjalanan wisata, hotel dan restoran, pramuwisata, wisata bahari, maupun bidang lainnya belum mapan di Kabupaten Maluku Tenggara. Sesuai keterangan Ibu Aloysia Jaflean, Kepala Seksi Usaha Jasa pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, asosiasi pariwisata yang baru terbentuk hanya ASITA yakni asosiasi pariwisata di bidang perjalanan wisata. Terbentuknya ASITA dengan nama ASITA Gabungan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual inipun atas prakarsa dan usaha dari Pemerintah Kota Tual. Sedangkan asosiasi pariwisata lainnya seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia), Gahawisri (Gabungan Pengusaha Wisata Bahari Indonesia) belum terbentuk di Kabupaten Maluku Tenggara.

d. Mahalnya biaya transportasi menuju Kabupaten Maluku Tenggara.

Mahalnya biaya transportasi menuju Kabupaten Maluku Tenggara berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan. Sesuai data dari Aji Bandjar, pengelola travel, bahwa perjalanan pesawat Ambon-Langgur yang hanya ditempuh dalam waktu 1,5 jam, harga tiketnya mencapai Rp. 1.100.000.

D. Identifikasi faktor kunci keberhasilan pengembangan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara

Analisis SWOT selanjutnya adalah mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan (FKK) pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara. Pengetahuan dan pemahaman terhadap faktor kunci keberhasilan sangat diperlukan untuk mengetahui mana saja faktor-faktor strategis dari tiap kategori kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).

Sesuai hasil analisa terhadap faktor internal dan eksternal yang telah diuraikan sebelumnya maka diketahui faktor kunci keberhasilan pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

1. Kekuatan (*strengths*)

- a. Potensi seni budaya dan sosial masyarakat Kei yang unik dan terjaga.
- b. Memiliki obyek dan daya tarik wisata yang banyak dan beragam.

2. Kelemahan (*weaknesses*)

- a. Belum terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- b. Belum ada regulasi pendukung investasi bidang pariwisata.

3. Peluang (*opportunities*)

- a. Wisata bahari dan budaya sangat diminati oleh wisatawan mancanegara.
- b. Investasi usaha wisata masih terbuka di sejumlah obyek wisata.

4. Ancaman (*threats*)

- a. Kabupaten Maluku Tenggara belum cukup dikenal dalam khasanah pariwisata di Indonesia.

- b. Persaingan dengan daerah lain yang sama potensinya, terutama di Provinsi Maluku.

Secara rinci, faktor kunci keberhasilan yang telah diuraikan dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Faktor-faktor Kunci Keberhasilan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara

No.	Faktor Internal		
	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	
S1	Potensi seni budaya dan sosial masyarakat Kei yang unik dan terjaga	W1	Belum terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah
S2	Memiliki obyek dan daya tarik wisata yang banyak dan beragam	W2	Belum ada regulasi pendukung investasi bidang pariwisata
No.	Faktor Eksternal		
	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)	
O1	Wisata bahari dan budaya sangat diminati oleh wisatawan mancanegara	T1	Kabupaten Maluku Tenggara belum cukup dikenal dalam khasanah pariwisata di Indonesia
O2	Investasi usaha wisata masih terbuka di sejumlah obyek wisata	T2	Persaingan dengan daerah lain yang sama potensinya, terutama di Provinsi Maluku

E. Rumusan Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara

Melalui analisis SWOT dirumuskan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara. Rumusan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu

rumusan strategi fokus yang pada dasarnya dapat dinamai sebagai strategi stabilitas atau rasionalisasi yakni strategi pengembangan pariwisata yang dianggap sebagai strategi unggulan atau utama yang dapat mendorong percepatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara dan strategi pendukung yang pada dasarnya dapat dinamai sebagai strategi ekspansi, strategi diversifikasi, dan strategi defensif atau survival yakni strategi yang mendukung strategi fokus.

Strategi fokus pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara dirumuskan atau ditetapkan melalui analisa terhadap peta kekuatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara. Sesuai hasil identifikasi faktor internal dan eksternal diperoleh data bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara banyak memiliki kelemahan. Namun disamping kelemahan tersebut, Kabupaten Maluku Tenggara juga memiliki banyak peluang, untuk itu dapat dipetakan posisi kekuatan upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara yakni pada kuadran III, dengan strategi yang digunakan adalah strategi stabilitas atau rasionalisasi yakni dipadukan kelemahan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi WO untuk menciptakan stabilitas atau rasionalisasi atau melakukan investasi/divestasi di bidang pariwisata dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau peluang yang menjanjikan masa depan pengembangan pariwisata yang cemerlang.

Perumusan dan penetapan strategi (WO) adalah memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan eksternal dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8 Formulasi Strategi SWOT Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara

FKK Internal	KELEMAHAN (W)
FKK Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah. 2. Belum ada regulasi pendukung investasi bidang pariwisata.
PELUANG (O)	STRATEGI WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wisata bahari dan budaya sangat diminati oleh wisatawan mancanegara. 2. Investasi usaha wisata masih terbuka di sejumlah obyek wisata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara oleh Pemerintah Daerah dan menetapkan dalam sebuah Keputusan Kepala Daerah guna mendukung pencitraan wisata bahari dan budaya Kabupaten Maluku Tenggara di tingkat nasional maupun mancanegara. 2. Fasilitasi Pemerintah Daerah melalui penyediaan regulasi yang mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di bidang pariwisata.

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui strategi fokus pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara oleh Pemerintah Daerah dan menetapkan dalam sebuah Keputusan Kepala Daerah guna mendukung pencitraan wisata bahari dan budaya Kabupaten Maluku Tenggara di tingkat nasional maupun mancanegara.
2. Fasilitasi Pemerintah Daerah melalui penyediaan regulasi yang mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di bidang pariwisata.

Selanjutnya dengan menggunakan matriks SWOT berikut ini, dirumuskan strategi pendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara.

<p style="text-align: center;">FKK Internal</p> <p style="text-align: center;">FKK Eksternal</p>	<p style="text-align: center;">STRENGTHS (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> Potensi seni budaya dan sosial masyarakat Kei yang unik dan terjaga. Memiliki obyek dan daya tarik wisata yang banyak dan beragam. 	<p style="text-align: center;">WEAKNESSES (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah. Belum ada regulasi pendukung investasi bidang pariwisata.
<p style="text-align: center;">OPPORTUNITIES (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> Wisata bahari dan budaya sangat diminati oleh wisatawan mancanegara. Investasi usaha wisata masih terbuka di sejumlah obyek wisata. 	<p style="text-align: center;">SO STRATEGIES</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan potensi bahari dan seni budaya guna meningkatkan kunjungan wisatawan. Penataan obyek dan daya tarik wisata yang dimiliki guna mewujudkan investasi di sejumlah obyek wisata. 	<p style="text-align: center;">WO STRATEGIES</p> <p style="text-align: center;">MERUPAKAN STRATEGI FOKUS</p>
<p style="text-align: center;">THREATS (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> Kabupaten Maluku Tenggara belum cukup dikenal dalam khasanah pariwisata di Indonesia. Persaingan dengan daerah lain yang sama potensinya, terutama di Provinsi Maluku. 	<p style="text-align: center;">ST STRATEGIES</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuka jaringan (<i>networking</i>) dengan destinasi utama di Indonesia (Jakarta, Bali, Jogja, Manado) agar dapat memperkenalkan potensi seni budaya dan sosial masyarakat Kei yang unik dan terjaga. Pengemasan obyek dan daya tarik wisata yang dimiliki dalam bentuk yang berbeda dengan daerah lain yang sama potensinya, terutama di Provinsi Maluku. 	<p style="text-align: center;">WT STRATEGIES</p> <ol style="list-style-type: none"> Membentuk Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara guna mempromosikan potensi pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara di tingkat nasional. Menetapkan regulasi investasi guna mendorong peningkatan kualitas SDM pariwisata agar dihasilkan produk wisata yang unik dan berdaya saing.

Bagan 4.1 Matriks SWOT Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara

Secara rinci, rumusan strategi pendukung pengembangan pariwisata di

Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari:

a. Strategi SO (*Strength Opportunity Strategy*) dipakai untuk memperoleh keuntungan dari peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal.

Perumusan strategi SO sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan potensi bahari dan seni budaya guna meningkatkan kunjungan wisatawan.
- 2) Penataan obyek dan daya tarik wisata yang dimiliki guna mewujudkan investasi di sejumlah obyek wisata.

b. Strategi ST (*Strength Threat Strategy*) yaitu strategi yang digunakan untuk menghindari, paling tidak memperkecil dampak dari ancaman yang datang dari luar.

Perumusan strategi ST sebagai berikut.

- 1) Membuka jaringan (*networking*) dengan destinasi utama di Indonesia (Jakarta, Bali, Jogja, Manado) agar dapat memperkenalkan potensi seni budaya dan sosial masyarakat Kei yang unik dan terjaga.
- 2) Pengemasan obyek dan daya tarik wisata yang dimiliki dalam bentuk yang berbeda dengan daerah lain yang sama potensinya, terutama di Provinsi Maluku.

c. Strategi WT (*Weakness Threat Strategy*) yaitu strategi yang diarahkan pada usaha memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Perumusan strategi WT sebagai berikut:

- 1) Membentuk Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara guna mempromosikan potensi pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara di tingkat nasional.

- 2) Menetapkan regulasi investasi guna mendorong peningkatan kualitas SDM pariwisata agar dihasilkan produk wisata yang unik dan berdaya saing.

Universitas Terbuka

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Melalui analisis SWOT strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara sebagai upaya menghasilkan alternatif rumusan strategi terbaik bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara kedepannya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara, faktor internal lebih banyak menentukan dibandingkan faktor eksternal. Teridentifikasi limabelas faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan diantaranya potensi seni budaya dan sosial masyarakat Kei yang unik dan terjaga, obyek dan daya tarik wisata yang dimiliki banyak dan beragam, tersedianya sarana transportasi laut dari berbagai wilayah seperti Jawa dan Sulawesi, terutama Ambon dan Papua dan tersedia penerbangan dari dan ke Ambon setiap hari pulang pergi, belum terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah, belum ada regulasi pendukung investasi bidang pariwisata. Sedangkan faktor eksternal teridentifikasi sebanyak sembilan faktor yang berupa peluang dan ancaman Sedangkan faktor eksternal teridentifikasi sebanyak sembilan faktor yang berupa peluang dan ancaman diantaranya wisata bahari dan budaya sangat diminati oleh wisatawan mancanegara, investasi usaha wisata masih terbuka di sejumlah obyek wisata, terdapatnya acara-acara kesenian dan kebudayaan daerah, Kabupaten Maluku Tenggara belum cukup dikenal dalam khasanah pariwisata di Indonesia, persaingan dengan daerah lain yang sama potensinya, terutama di Provinsi Maluku.

2. Untuk mendapatkan alternatif rumusan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara maka yang menjadi penting selain mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dilakukan juga identifikasi faktor-faktor strategis yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara. Adapun faktor kunci keberhasilan pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara yang teridentifikasi sebagai berikut: potensi seni budaya dan sosial masyarakat Kei yang unik dan terjaga, memiliki obyek dan daya tarik wisata yang banyak dan beragam, belum terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah, belum ada regulasi pendukung investasi bidang pariwisata, wisata bahari dan budaya sangat diminati oleh wisatawan mancanegara, investasi usaha wisata masih terbuka di sejumlah obyek wisata, Kabupaten Maluku Tenggara belum cukup dikenal dalam khasanah pariwisata di Indonesia, dan persaingan dengan daerah lain yang sama potensinya, terutama di Provinsi Maluku. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara diwujudkan bukan hanya untuk meraih pendapatan asli daerah (PAD) namun juga dalam bentuk fasilitasi pembentukan badan promosi daerah pariwisata daerah di Kabupaten Maluku Tenggara, penyediaan regulasi yang positif bagi dunia investasi dan menyiapkan mental masyarakat dalam mendukung pariwisata.
3. Rumusan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara yang dihasilkan terdiri dari Strategi Fokus yang pada dasarnya dapat dinamai sebagai strategi stabilitas atau rasionalisasi yakni strategi pengembangan pariwisata yang dianggap sebagai strategi unggulan atau utama yang dapat

mendorong percepatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara dan Strategi Pendukung yang pada dasarnya dapat dinamai sebagai strategi ekspansi, strategi diversifikasi, dan strategi defensif atau survival yakni strategi yang mendukung strategi fokus. Strategi Fokus yang dilakukan yaitu: fasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara oleh Pemerintah Daerah dan menetapkan dalam sebuah Keputusan Kepala Daerah guna mendukung pencitraan wisata bahari dan budaya Kabupaten Maluku Tenggara di tingkat nasional maupun mancanegara dan fasilitasi Pemerintah Daerah melalui penyediaan regulasi yang mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di bidang pariwisata. Adapun Strategi Pendukung yang dilakukan antara lain yaitu: mengoptimalkan potensi bahari dan seni budaya guna meningkatkan kunjungan wisatawan dan penataan obyek dan daya tarik wisata yang dimiliki guna mewujudkan investasi di sejumlah obyek wisata.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Evaluasi strategi dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan pembahasan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan oleh karena itu tidak perlu menunggu pembahasan RPJMD karena dinamika pembangunan perlu segera ditampung.
2. Masuknya investasi pada bidang pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara perlu menjadi prioritas dan perhatian serius pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Investasi merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu daerah yakni dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan

lapangan pekerjaan, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kendala yang menyebabkan belum adanya investasi sektor pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara perlu dicari solusinya seperti penguatan sinergi pembangunan pariwisata dengan bidang ekonomi, sosial dan budaya baik antara pemerintah pusat maupun daerah, menyediakan sarana pendukung pengembangan industri pariwisata secara memadai, peningkatan daya saing SDM, menjamin keamanan dan kenyamanan dalam berwisata, penyederhanaan prosedur perizinan usaha, dan penguatan pengelolaan destinasi.

3. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara hendaknya dapat diakomodir dalam APBD Kabupaten Maluku Tenggara agar terciptanya keberlanjutan dan keberhasilan upaya pengembangan pariwisata di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Armida, S. A. (2009). Pengembangan pariwisata daerah memasuki era otonomi daerah dan desentralisasi. Diambil 27 Agustus 2012, dari situs World Wide Web <http://www.scribd.com/doc/58730129/Pembangunan-Ekonomi-Daerah-Dari-Sektor-Pariwisata>
- Atmosudirdjo, P. (1982). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bappeda Kabupaten Maluku Tenggara. (2009). *Dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2008-2013*. Langgur: Bappeda, Kabupaten Maluku Tenggara.
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara. (2012). *Maluku Tenggara dalam angka tahun 2012*. Langgur: BPS, Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bryson, J. M. (2001). *Perencanaan strategis bagi organisasi sosial (Judul asli: Strategic planning for public and nonprofit organizations, Diterjemahkan oleh Miftahuddin)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Caiden, G. E. (1982). *Public administration*. California: Palisades Publishers.
- Chandler, R. C. & Plano, J. C. (1988). *The public administration dictionary*. Santa Barbara: CA ABC Clic Inc.
- Damanik, J. (2010). Merancang format baru pariwisata yang menyejahterakan rakyat. Pidato disampaikan pada *Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada tanggal 29 April 2010*. Yogyakarta.
- Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara. (2009). *Rencana strategis dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2009-2013*. Langgur: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara.
- Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara. (2011). *Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2011*. Langgur: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara.
- Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara. (2011). *Profil dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2011*. Langgur: Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara.

- Drucker, P. F. (1990). *Eksekutif yang efektif* (Diterjemahkan oleh Rosiana Budiman). Jakarta: Erlangga.
- Dwiyanto, A. (2003). *Reformasi tata pemerintahan dan otonomi daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Geriya, I. W. (1996). *Pariwisata dan dinamika kebudayaan lokal, nasional, global*. Denpasar: Upada Sastra.
- Gunn, C. A. (1979). *Tourism planning*. New York: Crane Russak & Company Inc.
- Handoko, T. H. (1995). *Manajemen personalia sumber daya alam*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, A. (2002). *Otonomi daerah peluang dan tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hax, A. C. & Majluf, N. S. (1991). *The strategy: Concept & process*. New Jersey: Prentice Hall.
- Higgins, J. M. (1985). *Strategy*. New York: CBS College Publishing.
- Idrus, M. (2009). *Metode penelitian ilmu sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Irawan, P. (2010). *Metodologi penelitian administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Karyono, A. H. (1997). *Kepariwisataaan*. Jakarta: Grasindo.
- Kuo, Nae-Wen & Chiu, Yu-Thing (2006). The assessment of agritourism policy based on sea combination with HIA. *Journal of Land Use Policy*, 23, 560-570.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2008). *Modul pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III: Teknik-teknik analisis manajemen*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2008). *Modul pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III: Analisis kebijakan publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Marpaung, H. (2002). *Pengetahuan kepariwisataan*. Bandung: Alfabeta.
- Myra, P. G. (1997). Pariwisata di Indonesia: Dulu, kini, dan yang akan datang. Dalam PP2Par ITB (Ed), *Prosiding Pelatihan dan Lokakarya Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan*, hal. 25-29. Bandung: Penerbit Institut Teknologi Bandung.
- Nasution. (1988). *Metode naturalistik kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nawawi, H. H. (1991). *Metodologi penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Nawawi, H. H. (2000). *Manajemen strategik organisasi non profit bidang pemerintahan*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Nigro, F. A. & Nigro, L. G. (1970). *Modern public administration*. New York: Harper & Row Publishers.
- Nirwandar, S. (2005). Pembangunan sektor pariwisata di era otonomi daerah. Diambil 27 Agustus 2012, dari situs World Wide Web http://www.budpar.go.id/userfiles/file/440_1257-PEMBANGUNANSEKTORPARIWISATA1.pdf
- Nugraha, M. Q. (2011). *Manajemen strategik organisasi publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Nugroho, R. (2009). *Public policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pamudji, S. (1981). *Ekologi administrasi negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pendit, N. S. (1998). *Pariwisata, sebuah studi, analisa dan informasi*. Jakarta: Jembatan.
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI No. PM.105/UM.001/MKP/2010 tentang perubahan pertama atas rencana strategis kementerian kebudayaan dan pariwisata Republik Indonesia tahun 2010-2014 (2010).
- Prajogo, M. J. (1976). *Pengantar Pariwisata Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Prasojo, E., Karyana, A., Kurniawan, T. & Maksum, I. R. (2010). *Pemerintahan daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Rakhmat. (2009). *Teori administrasi dan manajemen publik*. Jakarta: Pustaka Arif.

- Rangkuti, P. (1997). *Analisis SWOT teknik-teknik membedah kasus bisnis: reorientasi konsep perencanaan strategi untuk menghadapi abad 21*. Jakarta: Gramedia.
- Rohman, H. (2010). Administrasi publik: Pemahaman dan ruang lingkup kajian. Diambil 27 Nopember 2012, dari situs World Wide Web http://www.facebook.com/note.php?note_id=275651213443
- Salusu, J. (2002). *Pengambilan keputusan strategik untuk organisasi publik dan organisasi non profit* (Cetakan Keempat). Jakarta: Grasindo.
- Seetanah, B. (2011). Assessing the dynamic economic impact of tourism for island economies. *Journal of Annals of Tourism Research*, 38 (1). 291-308.
- Sinclair, M. T. (1998). Tourism and economic development: A survey. *Journal of Development Studies*, 34 (5). 1-51. Diambil 4 September 2012, dari situs World Wide Web <http://kar.kent.ac.uk/17144/>
- Singarimbun, M. & Effendi, S. (1989). *Metode penelitian survey*. Jakarta: LP3ES.
- Spillane, J. (2001). *Ekonomi pariwisata: Sejarah dan prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Stimson, R. J. (1997). Pariwisata dan pembangunan ekonomi daerah: Kasus Studi di Daerah Cairns-Far North Queensland. Dalam PP2Par ITB (Ed), *Prosiding Pelatihan dan Lokakarya Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan*, hal. 216-221. Bandung: Penerbit Institut Teknologi Bandung.
- Subadra, I. N. (2006). Peran masyarakat dalam pariwisata. Diambil 3 September 2012, dari situs World Wide Web http://artikelpariwisata.blogspot.com/2009_02_01_archive.html
- Sudirman, U. (2001). *Perspektif pengembangan pariwisata dalam antisipasi pelaksanaan otonomi*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sundarso, dkk. (2009). *Ilmu administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Swasono, M. H. (2001). Strategi pembangunan dan pengembangan pariwisata menjelang AFTA 2003. Makalah disajikan pada *Seminar Pariwisata Indonesia 2001, Program D III Pariwisata FISIP UI tanggal 17 Maret 2001*. Jakarta.
- Syafiie, I. K. (1997). *Ilmu administrasi publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Tadjudin, D. (2009). *Manajemen kolaborasi*. Jakarta: Pustaka Latin.
- Thoha, M. (2011). *Ilmu administrasi publik kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang RI No. 12 tentang Pemerintahan Daerah (2008).
- Undang-undang RI No. 10 tentang Kepariwisataaan (2009).
- Utama, I. G. B. R. (2011). Kajian dampak ekonomi dan keunggulan pariwisata kabupaten/kota di Provinsi Bali. Diambil 29 Desember 2012, dari situs World Wide Web <http://tourismbali.wordpress.com/2011/07/18/kajian-dampak-ekonomi-dan-keunggulan-pariwisata-kabupatenkota-di-provinsi-bali/>
- Utomo, W. (2009). *Administrasi publik baru Indonesia: Perubahan paradigma dari administrasi negara ke administrasi publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, S., dkk. (1997). *Pemasaran pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wahyudi, S. A. (1996). *Manajemen strategik: Pengantar proses berpikir strategik*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Wulandari & Titik, S. (2011). Implementasi manajemen kolaboratif dalam pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Vol. 5 No. 1. 32-50. Diambil 26 September 2012, dari situs World Wide Web <http://jurnalsodality.ipb.ac.id/jurnalpdf/3%20Wulandari.pdf>
- Yoeti, O. A. (1997). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yoeti, O. A. (2001). *Pengantar ilmu pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Yoeti, O. A. (2002). *Perencanaan strategis pemasaran daerah tujuan wisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Zauhar, S. (1996). *Reformasi administrasi: Konsep, dimensi dan strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Lampiran 1

**VISI, MISI, DAN TUJUAN PEMBANGUNAN PARIWISATA
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA YANG
TERTUANG DALAM RPJMD KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN 2008-2013**

- a. Visi: “Terwujudnya Masyarakat Maluku Tenggara yang Sejahtera Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Jasa Lingkungan Berbasis Bahari, Jasa Perdagangan dan Jasa Pendidikan”.
- b. Misi:
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
 2. Mengembangkan struktur ekonomi yang tangguh dan berdaya saing berbasis kelautan dan perikanan.
 3. Merevitalisasi sistem penyuluhan pertanian dalam arti luas serta meningkatkan kualitas dan produktivitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 5. Mewujudkan akselerasi pemberdayaan masyarakat dan penguatan sistem adat lokal secara proporsional sebagai instrumen pembangunan.
- c. Tujuan:
1. Mewujudkan tercapainya peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah melalui kemampuan kelembagaan dan sumberdaya aparatur yang berkualitas, profesional dan akuntabel, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang efisien, cepat, tepat dan manusiawi, menuju terwujudnya *good governance*.
 2. Mewujudkan tercapainya peningkatan kualitas pembinaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat serta pemeliharaan stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah.
 3. Mewujudkan perubahan struktur ekonomi yang tangguh dan berdaya saing yang berbasis pada sumberdaya kelautan dan perikanan, perdagangan, perkebunan, dan pariwisata.

4. Mewujudkan tercapainya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana ekonomi daerah dan jaringan produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung pengembangan ekonomi produktif masyarakat.
5. Mewujudkan tercapainya ketahanan pangan lokal melalui peningkatan kapasitas pengelolaan dan produktivitas sumber daya alam lokal pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
6. Mewujudkan tercapainya peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk peningkatan kualitas sumberdaya dan kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara.
7. Mewujudkan tercapainya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui akselerasi program mempercepat pemberdayaan masyarakat.
8. Mewujudkan tercapainya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pemantapan sistem adat istiadat lokal dan eksistensi lembaga adat sebagai wadah untuk melaksanakan berbagai aktivitas kemasyarakatan.

Universitas Terpadu

Lampiran 2

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PEMBANGUNAN PARIWISATA DALAM RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2009-2013**

- a. Visi: "Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Destinasi Wisata Dunia Berbasis Bahari dan Budaya".
- b. Misi:
1. Mendorong peningkatan citra Kabupaten Maluku Tenggara sebagai daerah tujuan wisata.
 2. Menyelenggarakan promosi pariwisata yang efektif dengan bertumpu pada kekuatan analisa pasar yang dilakukan secara komprehensif.
 3. Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan pariwisata.
 4. Menjaga dan mengembangkan budaya lokal (Suku Kei) yang beraneka ragam, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara turun temurun dipraktikkan dan dipelihara.
 5. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas pemuda yang berkemampuan untuk tumbuh sehat, maju, mandiri, bertaqwa, berjiwa usaha dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Tujuan:
1. Terlaksananya *event* pariwisata tahunan, tersedianya paket wisata yang menarik, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara, terlaksananya pengembangan KSP Wisata Budaya, terlaksananya pengembangan Wisata Alam Pantai, terlaksananya pengembangan wisata kuliner.
 2. Tereksposnya potensi-potensi pariwisata lokal spesifik dan dominan guna meningkatkan kunjungan wisatawan dan investasi.
 3. Terlaksananya pengembangan pariwisata secara berhasil guna dan berdaya guna, terarah dan terpadu dengan tetap mengedepankan Sapta Pesona dalam pelaksanaannya.

4. Terjaga dan terpeliharanya kelestarian dan kemuliaan adat, seni dan budaya daerah.
5. Terwujudnya peningkatan aktivitas di bidang pemuda dan olahraga yang didukung dengan ketersediaan wadah kepemudaan dan sarana prasarana olahraga yang memadai.

d. Sasaran:

1. Terlaksananya 2 event pariwisata tahunan, terlaksananya 5 paket wisata, tercapainya jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 35.000 orang maupun mancanegara sebanyak 1.000 orang pada tahun 2013, pengembangan KSP Wisata Budaya Desa Adat di Tanimbar Kei, pengembangan KSP Wisata Budaya Desa Seni di Banda Ely, pengembangan KSP Wisata Budaya Situs Sejarah di Kei Kecil, pengembangan Wisata Alam pantai di Ngilngof, Ohoililir, dan Ohoidertawun, pengembangan KSP Wisata Alam *Coral Garden* di Weduar Feer, pengembangan wisata kuliner di Kei Kecil.
2. Tercapainya peningkatan kualitas promosi potensi pariwisata daerah baik untuk kebutuhan sebagai tujuan wisata maupun sebagai tujuan investasi.
3. Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur dan pelaku usaha wisata yang profesional serta partisipasi masyarakat bagi pengembangan pariwisata daerah.
4. Terwujudnya revitalisasi institusi adat serta peningkatan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan seni dan budaya daerah sebagai aset sekaligus terselenggaranya event-event budaya yang berkualitas dan dikemas sebagai atraksi wisata yang mempunyai nilai jual bagi pengembangan pariwisata daerah.
5. Terwujudnya peningkatan motivasi, peran, partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan secara lebih luas, tercapainya peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi kepemudaan dalam membina semangat kepeloporan dan kepemimpinan pemuda, tercapainya peningkatan prestasi-prestasi olahraga Kabupaten Maluku Tenggara pada event-event provinsi, regional, dan nasional terutama cabang-cabang yang memiliki potensi atlet yang cukup di Kabupaten Maluku Tenggara, tercapainya peningkatan kemampuan manajemen kelembagaan pembinaan olahraga serta peningkatan kerjasama antarpengurus cabang olahraga dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan prestasi olahraga.
6. Terwujudnya peningkatan prasarana dan sarana olahraga yang sesuai standar sesuai kebutuhan daerah.

Lampiran 3

**OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



**Gambar 1. Pantai Ngurbloat, Desa Ngilngof,
Kecamatan Kei Kecil**



**Gambar 2. Pantai Ngursarnadan, Desa Oholilir,
Kecamatan Kei Kecil**



Gambar 3. Pantai Nadiun Ohoidertawun, Desa Ohoidertawun, Kecamatan Kei Kecil



Gambar 4. Pantai Elomel, Desa Sathean, Kecamatan Kei kecil



Gambar 5. Pantai Daftel



**Gambar 6. Pemandian Alam Evu,
Desa Evu, Kecamatan Kei Kecil**



**Gambar 7. Goa Hawang, Desa Letvuan,
Kecamatan Kei Kecil**



**Gambar 8. Desa Adat Tanimbar Kei,
Kecamatan Kei Kecil Barat**



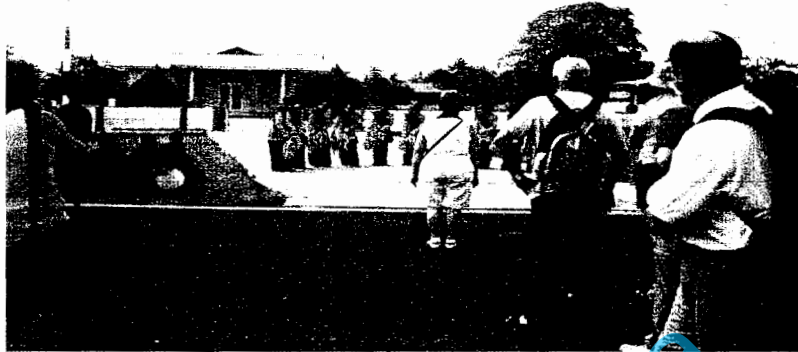
**Gambar 9. Desa Seni Banda Ely,
Kecamatan Kei Besar Utara Timur**



**Gambar 10. Situs Sejarah Siran Siryen (Amalir Lor),
Desa Elaar Ngursoin, Kecamatan Kei Kecil Timur**



Gambar 11. Pelantikan Raja Faan (Kelompok Raja Lor Lim)



Gambar 12. Tarian Adat Yirik



**Gambar 13. Taman Ziarah Bukit Masbait,
Desa Kelanit, Kecamatan Kei Kecil**



**Gambar 14. Penangkaran Mutiara Ohoiwa,
Desa Ohoiwa, Kecamatan Kei Kecil**



**Gambar 15. Atraksi Pembuatan Enbal di Desa Haar,
Kecamatan Kei Besar Utara Timur**



Gambar 16. Kerajinan Tangan Kabupaten Maluku Tenggara

Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pengelolaan objek wisata saat ini dan apa saja sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara guna menunjang objek wisata tersebut?
2. Apakah pengembangan sektor pariwisata yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selama ini dirasakan telah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar objek wisata, khususnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat?
3. Tema paket wisata apa yang paling diminati wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Kabupaten Maluku Tenggara?
4. Pengembangan pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara diantaranya bertumpu pada budaya sebagaimana pernyataan visi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara. Objek dan daya tarik wisata budaya unggulan diantaranya Desa Tanimbar Kei sebagaimana informasi yang diperoleh dari buku profil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara. Jumlah kunjungan wisatawan ke suatu destinasi wisata merupakan salah satu indikator ketertarikannya pada destinasi wisata tersebut sedangkan latar belakang wisatawan dapat dijadikan dasar bagi pengembangan destinasi

wisata kedepan. Berapa jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata Desa Tanimbar Kei ini setiap bulannya dan berasal dari mana saja?

5. Apa saja upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendukung pengembangan pariwisata Desa Tanimbar Kei selain publikasi melalui booklet, leaflet maupun baligo?
6. Apa pertimbangan menempatkan budaya sebagai basis pengembangan pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara?
7. Pengembangan pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara juga bertumpu pada bahari sebagaimana pernyataan visi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara. Objek dan daya tarik wisata bahari unggulan diantaranya Pantai Ngurbloat. Apa saja prasarana yang telah dibangun oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara pada objek wisata ini dan kendala apa saja yang ditemui dalam upaya pengembangannya?
8. Sebagai budayawan dan tokoh masyarakat Kei, Apakah Bapak setuju dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara yang menempatkan budaya sebagai basis pengembangan pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara?
9. Upaya pengembangan pariwisata perlu memperhatikan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan maupun faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Faktor-faktor apa saja yang merupakan kekuatan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara?

10. Faktor-faktor apa saja yang merupakan kelemahan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara?
11. Faktor-faktor apa saja yang merupakan peluang dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara?
12. Faktor-faktor apa saja yang merupakan ancaman dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara?
13. Potensi pariwisata yang sangat besar di Kabupaten Maluku Tenggara tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan menjadi daya tarik bagi investor. Apakah telah ada investasi pada objek wisata di daerah ini? Jika belum ada, apa penyebabnya?
14. Bagaimana kontribusi sektor pariwisata bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya sumber pendapatan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara?
15. Ketersediaan fasilitas akomodasi dalam jumlah dan kualitas yang memadai merupakan hal penting dalam meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan waktu lama tinggal wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata. Apakah fasilitas akomodasi yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara telah memadai baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya?
16. Asosiasi pariwisata merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pariwisata sesuai bidangnya masing-masing seperti ASITA di bidang perjalanan wisata, PHRI di bidang perhotelan dan restoran atau yang lainnya. Apakah asosiasi pariwisata telah terbentuk di Kabupaten Maluku

Tenggara. Jika telah terbentuk, mohon disebutkan asosiasi pariwisata apakah itu?

17. Keberadaan Kelompok Sadar Wisata sangat penting dalam mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini juga merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Apakah telah ada kelompok sadar wisata di Kabupaten Maluku Tenggara, berapa jumlahnya?

Universitas Terbuka

Lampiran 5

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Bapak Ir. L. Retraubun, MBA, M.Si
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara
Tempat Wawancara : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 18 Oktober 2012
Pewawancara : Drs. Asril Umagap

Hasil Wawancara :
1. Pertanyaan : Upaya pengembangan pariwisata perlu memperhatikan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan maupun faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Faktor-faktor apa saja yang merupakan kekuatan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara?

Jawaban : Faktor-faktor yang merupakan kekuatan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari: potensi seni budaya dan sosial masyarakat Kei yang unik dan terjaga, memiliki obyek dan daya tarik wisata yang banyak dan beragam khususnya bahari dan budaya, tersedianya sarana transportasi laut dari berbagai wilayah seperti Jawa dan Sulawesi, terutama Ambon dan Papua dan tersedia penerbangan dari dan ke Ambon setiap hari pulang pergi, tersedia beberapa fasilitas akomodasi yang cukup representatif untuk kepentingan wisatawan, dan adanya falsafah Ain Ni Ain (penjelasan masing-masing faktor telah dituangkan dalam BAB IV Temuan dan Pembahasan).

2. Pertanyaan : Faktor-faktor apa saja yang merupakan kelemahan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara?

Jawaban : Faktor-faktor yang merupakan kelemahan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari: keterbatasan anggaran

pengembangan pariwisata dan rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur dan tenaga kerja di bidang kepariwisataan (penjelasan masing-masing faktor telah dituangkan dalam BAB IV Temuan dan Pembahasan).

3. Pertanyaan : Faktor-faktor apa saja yang merupakan peluang dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara?

Jawaban : Faktor-faktor yang merupakan peluang dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari: wisata bahari dan budaya sangat diminati oleh wisatawan mancanegara, investasi usaha wisata masih terbuka di sejumlah obyek wisata, diberlakukannya otonomi daerah, pembangunan bandara bertaraf internasional, serta terdapatnya acara-acara kesenian dan kebudayaan daerah (penjelasan masing-masing faktor telah dituangkan dalam BAB IV Temuan dan Pembahasan).

4. Pertanyaan : Faktor-faktor apa saja yang merupakan ancaman dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara?

Jawaban : Faktor-faktor yang merupakan ancaman dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari: Kabupaten Maluku Tenggara belum cukup dikenal dalam khasanah pariwisata di Indonesia, persaingan dengan daerah lain yang sama potensinya, terutama di Provinsi Maluku, Asosiasi Pariwisata yang belum mapan, dan mahalnnya biaya transportasi menuju Kabupaten Maluku Tenggara (penjelasan masing-masing faktor telah dituangkan dalam BAB IV Temuan dan Pembahasan).

5. Pertanyaan : Potensi pariwisata yang sangat besar di Kabupaten Maluku Tenggara tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan menjadi daya tarik bagi investor. Apakah telah ada investasi pada objek wisata di daerah ini?

Jawaban : Investasi pihak swasta setempat, nasional maupun asing pada objek wisata belum ada. Investasi pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara masih terkonsentrasi pada hotel, penginapan, villa, restoran, rumah makan, dan travel yang letaknya di Langgur. Investasi ini dilakukan oleh pihak swasta setempat. Rencana investasi pengembangan Pantai Ngurbloat pernah disampaikan

oleh delegasi Henan, Republik Rakyat China pada tahun 2010 namun sampai saat ini belum terlaksana investasi tersebut.

6. **Pertanyaan** : Keberadaan Kelompok Sadar Wisata sangat penting dalam mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini juga merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Apakah telah ada kelompok sadar wisata di Kabupaten Maluku Tenggara, berapa jumlahnya?

Jawaban : Belum ada.

Maluku Tenggara, 18 Oktober 2012

Narasumber,

Ir. L. Retraubun, MBA, M.Si

Nama Narasumber : Bapak Petrus Renwarin, SE, M.Si
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara
Tempat Wawancara : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 18 Oktober 2012
Pewawancara : Drs. Asril Umagap

Hasil Wawancara :

1. **Pertanyaan** : Pengembangan pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara diantaranya bertumpu pada budaya sebagaimana pernyataan visi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara. Objek dan daya tarik wisata budaya unggulan diantaranya Desa Tanimbar Kei sebagaimana informasi yang diperoleh dari buku profil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara. Jumlah kunjungan wisatawan ke suatu destinasi wisata merupakan salah satu indikator ketertarikannya pada destinasi wisata tersebut sedangkan latar belakang wisatawan dapat dijadikan dasar bagi pengembangan destinasi wisata kedepan. Berapa jumlah kunjungan

wisatawan ke objek wisata Desa Tanimbar Kei ini setiap bulannya dan berasal dari mana saja?

Jawaban : Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata Desa Tanimbar Kei sebanyak 100-200 orang setiap bulan yang sebagian besar merupakan peneliti budaya dan sebagian lainnya peneliti terumbu karang baik dari lokal, nusantara maupun mancanegara.

2. **Pertanyaan** : Apa saja upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendukung pengembangan pariwisata Desa Tanimbar Kei selain publikasi melalui booklet, leaflet maupun baligo?

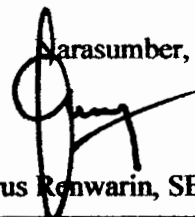
Jawaban : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara juga telah melaksanakan penyuluhan sadar wisata.

3. **Pertanyaan** : Apa pertimbangan menempatkan budaya sebagai basis pengembangan pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara?

Jawaban Selain objek wisata budaya yang banyak, Kabupaten Maluku Tenggara juga memiliki daya tarik budaya lainnya yang dapat dijadikan sebagai keunggulan pariwisata seperti acara perkawinan suku Kei. Suku Kei merupakan penduduk asli yang mendiami Kabupaten Maluku Tenggara dengan bahasa yang dipakai yaitu bahasa Kei. Selain itu Kabupaten Maluku Tenggara juga memiliki beragam tarian adat dan lagu adat. Masyarakat Kei juga terdiri dari dua komunitas besar atau yang sering disebut Utan dan Lor (Penjelasan lengkap tentang potensi budaya tersebut telah dituangkan dalam BAB IV Temuan dan Pembahasan).

Maluku Tenggara, 18 Oktober 2012

Narasumber,



Petrus Renwarin, SE, M.Si

Nama Narasumber : Ibu Fatimah Renngiwur, S.Sos
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Seksi Standar Mutu Produk, Objek dan Daya Tarik Wisata pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara
Tempat Wawancara : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 18 Oktober 2012
Pewawancara : Drs. Asril Umagap

Hasil Wawancara :
1. Pertanyaan : Bagaimana pengelolaan objek wisata saat ini di Kabupaten Maluku Tenggara?

Jawaban : Pengelolaan objek wisata seperti objek wisata Pantai Ngurbloat, Pantai Ngursarnadan, Pantai Nadiun Ohoidertawun, Pantai Daftel, Pemandian Alam Evu, Goa Hawang, sampai saat ini hanya dilakukan oleh desa. Semua objek wisata yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dikelola oleh desa, kecuali objek wisata Pantai Elomel dikelola oleh keluarga besar selaku pemilik objek. Belum ada pengelolaan bersama antara desa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Pendapatan yang diterima dari kunjungan wisatawan ke objek wisata ini semua menjadi milik desa kecuali pemanfaatan bungalow yang dibangun pemerintah daerah menjadi pendapatan pemerintah daerah. Setiap pengelola bungalow diberikan honor sebesar Rp. 750.000 setiap bulan.

2. Pertanyaan : Apa saja sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara guna menunjang objek wisata tersebut?

Jawaban : Untuk objek wisata Pantai Ngurbloat telah dibangun Bungalow sebanyak lima unit pada tahun 2009 namun baru dapat dimanfaatkan pada tahun 2011 karena pembangunannya tidak diikuti dengan pengadaan perlengkapan didalamnya. Pengadaan perlengkapan baru dilaksanakan pada akhir desember 2010. Selain itu dibangun juga tempat parkir bagi pengunjung objek wisata. Untuk objek wisata Pantai Ngursarnadan dan Pantai Nadiun Ohoidertawun telah dibangun Bungalow masing-masing sebanyak dua unit dan satu unit pada tahun 2010 namun baru dapat dimanfaatkan pada tahun 2011 karena pembangunannya tidak diikuti dengan pengadaan perlengkapan didalamnya. Pengadaan perlengkapan baru dilaksanakan pada akhir desember 2010. Perlu saya tambahkan bahwa jaringan telepon

seluler baru menjangkau objek wisata Pantai Ngurbloat, Pantai Ngursarnadan, Pantai Nadiun Ohoidertawun pada tahun 2011 berupa jaringan Pro XL, objek wisata Pantai Daftel berupa jaringan simpati dan mentari, sedangkan objek wisata yang lain belum ada jaringan telepon seluler sampai saat ini (tahun 2012). Pada tahun 2009 telah dibangun Pasar Seni di Desa Seni Banda Ely. Belum ada parasarana akomodasi maupun rumah makan di desa Seni Banda Ely ini sehingga wisatawan yang datang tinggal dan makan di rumah penduduk.

3. Pertanyaan : Potensi pariwisata yang sangat besar di Kabupaten Maluku Tenggara tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan menjadi daya tarik bagi investor. Apakah telah ada investasi pada objek wisata di daerah ini?

Jawaban : Sampai saat ini belum ada investasi dari pihak swasta setempat, nasional maupun asing. Pada tahun 2010, minat investasi pernah disampaikan oleh delegasi Henan, Republik Rakyat China. Mereka tertarik mengembangkan objek wisata Pantai Ngurbloat, namun sampai saat ini belum terlaksana investasi tersebut.

Maluku Tenggara, 18 Oktober 2012

Narasumber,


Fatimah Renngiwur, S.Sos

Nama Narasumber : Bapak Budi Toffi, S.Par
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Seksi Promosi, Tenaga dan Sarana pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012
Tempat Wawancara : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 22 Oktober 2012
Pewawancara : Drs. Asril Umagap

- Hasil Wawancara :
1. Pertanyaan : Pengembangan pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara diantaranya bertumpu pada budaya sebagaimana pernyataan visi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara. Objek dan daya tarik wisata budaya unggulan diantaranya Desa Tanimbar Kei sebagaimana informasi yang diperoleh dari booklet, leaflet maupun baligo yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara. Jumlah kunjungan wisatawan ke suatu destinasi wisata merupakan salah satu indikator ketertarikannya pada destinasi wisata tersebut sedangkan latar belakang wisatawan dapat dijadikan dasar bagi pengembangan destinasi wisata kedepan. Berapa jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata Desa Tanimbar Kei ini setiap bulannya dan berasal dari mana saja?
- Jawaban : Kunjungan ke objek wisata ini sebenarnya sangat banyak. Saya menerima banyak permintaan paket perjalanan wisata dari berbagai Biro Perjalanan Wisata dari daerah lain yang berusaha membuat paket perjalanan untuk tamu mancanegara. Ada yang berasal dari Belanda dan Jepang. Wisatawan yang datang dapat mencapai jumlah seratus orang bahkan mencapai 200 orang setiap bulan padahal akses ke desa wisata Tanimbar Kei ini cukup sulit. Desa wisata ini dijangkau melalui jalur laut menggunakan speedboat dengan jarak tempuh mencapai tiga jam, itupun jika cuaca baik. Jika kondisi cuaca laut tidak memungkinkan maka bisa dicapai selama lima jam.
2. Pertanyaan : Pengembangan pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara juga bertumpu pada bahari sebagaimana pernyataan visi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara. Objek dan daya tarik wisata bahari unggulan diantaranya Pantai Ngurbloat. Apa saja prasarana yang telah dibangun oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara pada objek wisata ini dan kendala apa saja yang ditemui dalam upaya pengembangannya?
- Jawaban : Pada tahun 2009 telah dibangun bungalow, tahun 2010 dibangun jalan masuk dan tempat parkir dan dilanjutkan pada tahun 2011. Tahun 2011 dan 2012 juga telah dianggarkan pembangunan *guest house* namun terkendala dengan masalah kepemilikan lahan sehingga sampai saat ini belum terealisasi pembangunannya. Tanggal 6

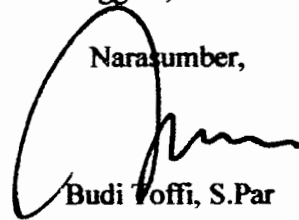
September 2012 telah dipindahkan lokasi pembangunan *guest house* dari kawasan Pantai Ngurbloat Desa Ngilingof ke kawasan Pantai Ngursarnadan Desa Ohoililir dengan pertimbangan bahwa telah terjadi proyek macet di lokasi Pantai Ngurbloat dan pembangunan *guest house* harus terus jalan dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat. Untuk tahun-tahun mendatang Pantai Ngurbloat tetap diprioritaskan untuk dikembangkan. Kendala-kendala yang ada terus dibenahi untuk dapat mewujudkan Pantai Ngurbloat sebagai obyek wisata bertaraf internasional.

3. **Pertanyaan** : Tema paket wisata apa yang paling diminati wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Kabupaten Maluku Tenggara?

Jawaban : Tema paket wisata bahari dan budaya. Setiap bulan terdata 15 sampai 25 wisatawan mancanegara yang menyatakan minat untuk berkunjung ke Kabupaten Maluku Tenggara dengan tema paket wisata yang diminta adalah wisata bahari dan budaya.

Maluku Tenggara, 22 Oktober 2012

Narasumber,



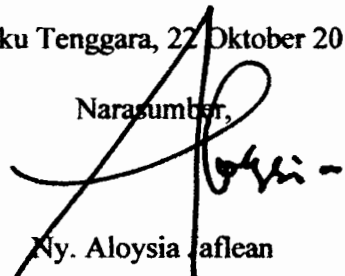
Budi Toffi, S.Par

Nama Narasumber : Ny. Aloysia Jaflean
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Seksi Usaha Jasa pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara dan Pengelola Retribusi Izin Prinsip pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara
Tempat Wawancara : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 22 Oktober 2012
Pewawancara : Drs. Asril Umagap

Hasil Wawancara :
1. **Pertanyaan** : Bagaimana kontribusi sektor pariwisata bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya sumber pendapatan yang dikelola oleh Dinas

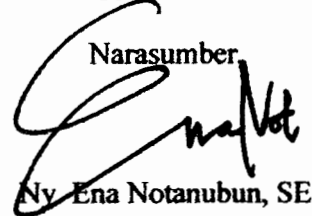
Maluku Tenggara, 22 Oktober 2012

Narasumber,


Ny. Aloysia Jaflean

-
- Nama Narasumber : Ny. Ena Notanubun, SE
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Seksi Usaha Sarana pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara
Tempat Wawancara : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 18 Oktober 2012
Pewawancara : Drs. Asril Umagap
- Hasil Wawancara :
Pertanyaan : Ketersediaan fasilitas akomodasi dalam jumlah dan kualitas yang memadai merupakan hal penting dalam meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan waktu lama tinggal wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata. Apakah fasilitas akomodasi yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara telah memadai baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya?
- Jawaban : Fasilitas akomodasi di Kabupaten Maluku Tenggara saya pikir telah memadai baik dari sisi jumlahnya maupun kualitasnya. Kami memiliki hotel sebanyak enam buah yang terdiri dari Bintang 1 sebanyak satu buah yakni Hotel Villia, Melati sebanyak tiga buah yakni Hotel Dragon dan Hotel Langgur serta dua hotel lainnya yang belum diklasifikasi yakni Hotel Suita dan Aurelia Hotel, Tahun 2013 akan dilakukan klasifikasi dan walaupun belum diklasifikasi, secara umum Hotel Suita memenuhi kriteria sebagai Bintang 3 dan Aurelia Hotel memenuhi kriteria sebagai Bintang 1. Fasilitas akomodasi lainnya seperti Penginapan sebanyak 5 buah yakni Penginapan Delima, Penginapan Eden, Penginapan Sanuhi, Penginapan Puri Kencana, dan Penginapan Lia. Wisma sebanyak 1 buah yakni Wisma Matahari, Homestay sebanyak 1 buah yakni Homestay Evalin, Losmen sebanyak 1 buah yakni Losmen Havana Illinois dan beberapa *coastar cottage* dan bungalow pada obyek wisata.

Maluku Tenggara, 18 Oktober 2012

Narasumber

Ny. Ena Notanubun, SE

Nama Narasumber : Bapak Ahmad Difinubun
Jabatan/Pekerjaan : Budayawan dan Tokoh Masyarakat Kei
Tempat Wawancara : Langgur
Tanggal Wawancara : 18 Oktober 2012
Pewawancara : Drs. Asril Umagap

Hasil Wawancara :
Pertanyaan : Sebagai budayawan dan tokoh masyarakat Kei, Apakah Bapak setuju dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara yang menempatkan budaya sebagai basis pengembangan pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara?

Jawaban : Saya sangat setuju dan itu memang benar adanya. Kabupaten Maluku Tenggara merupakan daerah adat dan berbudaya. Daya tarik budaya daerah ini sangat banyak seperti lagu adat, tarian adat, bahasa. Bahasa Kei dapat digunakan oleh semua orang Kei secara umum, walaupun terdapat perbedaan tekanan kata (*aksentuasi*) dan tekanan bagian kalimat (intonasi) antara masyarakat yang tinggal di wilayah Kei Besar dengan masyarakat yang tinggal di wilayah Kei Kecil, namun tidak membedakan makna komunikasinya. Tanah Kei juga memiliki Hukum Adat tertinggi dan dijunjung tinggi yakni Hukum Adat Lar Vul Ngabal. Dalam kalangan sosial masyarakat Kei juga dikenal adanya pembagian strata/kelas masyarakat antara lain Kelas Mel (kalangan atas), Kelas Ren (kalangan menengah), dan Kelas Iri (kalangan bawah). Pembagian strata/kelas dalam kalangan masyarakat Kei ini diakui ada hingga saat ini. Namun menurut penjelasan Bapak Ahmad Difinubun Kemerdekaan semua kelompok/kelas tetap terjaga, terjalinnya hubungan yang harmonis antar sesama dengan tetap menjaga batas-batas tertentu dan etika.

Langgur, 18 Oktober 2012

Narasumber,



Ahmad Difinubun

-
- Nama Narasumber : Bapak Beni Ohoitumur
Jabatan/Pekerjaan : Pengelola objek wisata Pantai Ngurbloat
Tempat Wawancara : Desa Ngilngof
Tanggal Wawancara : 19 Oktober 2012
Pewawancara : Drs. Asril Umagap
- Hasil Wawancara :
Pertanyaan : Apakah pengembangan sektor pariwisata yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selama ini dirasakan telah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar objek wisata, khususnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat?
- Jawaban : Sektor pariwisata dinilai belum mampu memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar objek wisata Pantai Ngurbloat. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah dan rendahnya kualitas prasarana penunjang pariwisata yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Hampir seluruh bangunan penunjang pariwisata merupakan milik masyarakat. Bungalow yang dibangun oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2009, sebelum dimanfaatkan hampir seluruh bangunan bungalow telah lapuk karena selesainya pembangunan tidak diikuti dengan pemeliharaan. Berbeda dengan beberapa prasarana milik masyarakat yang kondisinya tetap terawat dengan baik. Begitupun dengan tempat parkir yang dibangun oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara sejak tahun 2010 hingga saat ini (2012) belum juga dapat dimanfaatkan. Jaringan telepon seluler baru menjangkau objek wisata Pantai Ngurbloat pada tahun 2011 yakni jaringan Pro XL. Masuknya jaringan Pro XL ini bukan merupakan prakarsa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara padahal Pantai Ngurbloat telah ditetapkan sebagai objek wisata unggulan Kabupaten Maluku Tenggara. Jumlah pengelola bungalow pun telah ditetapkan oleh pihak

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak dua orang yang berasal dari masyarakat sekitar objek wisata Pantai Ngurbloat Desa Ngilngof dengan honor setiap bulannya sebesar Rp. 750.000. Menurut kami, penetapan pengelola bungalow yang hanya dua orang sangat tidak mendukung dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat sekitar. Terlebih lagi belum adanya investasi dalam mengembangkan objek wisata Pantai Ngurbloat. Beberapa prasarana pariwisata telah dibangun di obyek wisata ini namun belum ada satupun nota kesepahaman (MoU) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang mekanisme pengelolaan obyek wisata, yang menurut masyarakat setempat sangat penting untuk pengelolaan dan pemanfaatan obyek wisata ini pada waktu sekarang dan seterusnya.

Ngilngof, 19 Oktober 2012

Narasumber,


Beni Ohoitumur

Nama Narasumber : Bapak Alo Letsoin
 Jabatan/Pekerjaan : Pengelola objek wisata Pantai Ngursarnadan
 Tempat Wawancara : Desa Ohoililir
 Tanggal Wawancara : 19 Oktober 2012
 Pewawancara : Drs. Asril Umagap

Hasil Wawancara :
 Pertanyaan : Apakah pengembangan sektor pariwisata yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selama ini dirasakan telah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar objek wisata, khususnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat?

Jawaban : Pengembangan pariwisata belum dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Keterbatasan jumlah prasarana penunjang pariwisata yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara merupakan penyebabnya. Pembangunan dua unit bungalow untuk mendukung objek wisata ini tidak sebanding dengan berbagai prasarana yang disediakan oleh masyarakat. Apalagi hanya dimintakan satu orang dari masyarakat setempat oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengelola bungalow kami pikir tidak sesuai dan jauh dari upaya serius Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar objek wisata Pantai Ngursarnadan yang indah ini. Bukti lain bahwa pemerintah daerah tidak serius dalam mengembangkan objek wisata Pantai Ngursarnadan ini yakni ketiadaan jaringan komunikasi padahal ketersediaan jaringan komunikasi menjadi salah satu faktor pendukung kemajuan pariwisata. Tahun 2011 barulah jaringan telepon seluler Pro XL menjangkau objek wisata ini.

Ohoililir, 19 Oktober 2012

Narasumber,

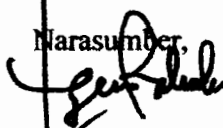
Alo Letsoin

Nama Narasumber : Bapak Egen Rahakbauw
Jabatan/Pekerjaan : Pejabat Kepala Desa Ohoidertawun
Tempat Wawancara : Desa Ohoidertawun
Tanggal Wawancara : 19 Oktober 2012
Pewawancara : Drs. Asril Umagap

Hasil Wawancara :
Pertanyaan : Apakah pengembangan sektor pariwisata yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selama ini dirasakan telah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar objek wisata, khususnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat?

Jawaban : Perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara bagi pengembangan objek wisata Pantai Nadiun Ohoidertawun sangat rendah. Saat ini hanya satu buah bungalow yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara padahal objek wisata Pantai Nadiun Ohoidertawun merupakan objek wisata yang sangat indah. Situs berupa lukisan kuno pada dinding batu yang ada pada tepian pantai ini telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku. Selama ini masyarakat tidak merasakan manfaat pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Ohoidertawun, 19 Oktober 2012

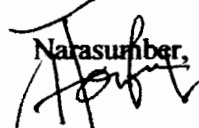
Narasumber,

 Eger Rahakbauw

Nama Narasumber : Bapak Jhon Tawurutubun
 Jabatan/Pekerjaan : Pengelola objek wisata Goa Hawang
 Tempat Wawancara : Desa Letvuan
 Tanggal Wawancara : 4 Nopember 2012
 Pewawancara : Drs. Asril Umagap

Hasil Wawancara :
 Pertanyaan : Apakah pengembangan sektor pariwisata yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selama ini dirasakan telah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar objek wisata, khususnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat?

Jawaban : Goa Hawang yang ada di Desa Letvuan merupakan objek wisata yang sangat menarik, selain sebagai wisata alam dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara telah memasukannya sebagai objek wisata yang menarik untuk dikunjungi di setiap bahan promosinya seperti booklet, namun sangat disayangkan sampai saat ini (2012) tidak ada satupun sarana dan prasarana yang dibangun dan disediakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara. Tidak sedikitpun manfaat pariwisata yang dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar objek wisata Goa Hawang ini.

Letvuan, 4 Nopember 2012

Narasumber,

 Jhon Tawurutubun

Nama Narasumber : Bapak Julius Soarubun, ST
 Jabatan/Pekerjaan : Tokoh Muda Desa Tanimbar Kei

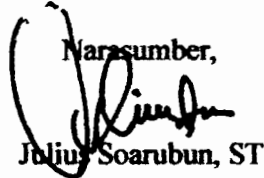
Tempat Wawancara : Langgur
Tanggal Wawancara : 18 Oktober 2012
Pewawancara : Drs. Asril Umagap

Hasil Wawancara :
Pertanyaan : Apa saja upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendukung pengembangan pariwisata Desa Tanimbar Kei selain publikasi melalui booklet, leaflet maupun baligo?

Jawaban : Peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara sampai tahun 2012 ini hanya sebatas melaksanakan penyuluhan sadar wisata, sedangkan pembangunan sarana prasarana pendukung aktivitas wisata budaya belum pernah dilakukan, padahal dalam Rencana Tindak Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara telah menetapkan Tanimbar Kei sebagai Desa Adat Berbudaya. Tentunya ini bukan tanpa alasan karena Desa Tanimbar Kei sangat kaya akan daya tarik budayanya, kehidupan masyarakatnya yang masih kental dengan adat istiadat serta didukung dengan potensi lautnya yang melimpah. Wisatawan yang datang biasanya tinggal dan makan di rumah penduduk karena tidak ada akomodasi maupun rumah makan.

Langgur, 18 Oktober 2012

Narasumber,



Julius Soarubun, ST

Lampiran 6

PEDOMAN OBSERVASI

No.	Hal yang diamati		Tanggal dan Hasil Observasi
	Aspek	Indikator	Tanggal.....2012
1.	Atraksi	a. Suguhan langsung kepada wisatawan selama berwisata	<i>Hasil observasi</i>
		b. Daya tarik utama objek wisata	<i>Hasil observasi</i>
2.	Aksesibilitas	Ketersediaan moda transportasi dari dan ke destinasi wisata	<i>Hasil observasi</i>
3.	Amenitas	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung	<i>Hasil observasi</i>
4.	Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata	Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata pada hari Minggu dan hari-hari biasa	<i>Hasil observasi</i>
5.	Faktor internal dan eksternal pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara	Faktor berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara	<i>Hasil observasi</i>

Lampiran 7

LEMBAR HASIL OBSERVASI

No.	Hal yang diamati		Tanggal dan Hasil Observasi
	Aspek	Indikator	19 s.d. 21 Oktober, 28 s.d. 29 Oktober 2012 serta 4 dan 11 Nopember 2012
1.	Atraksi	a. Suguhan langsung kepada wisatawan selama berwisata	Adanya suguhan tarian penjemputan bagi setiap tamu asing maupun tamu-tamu kehormatan yang mengunjungi objek wisata nampak pada objek wisata Pantai Ngurbloat, Pantai Ngursarnadan, dan Pantai Nadiun Ohoidertawun.
		b. Daya tarik utama objek wisata	Bahari dan budaya merupakan daya tarik utama objek wisata di Kabupaten Maluku Tenggara.
2.	Aksesibilitas	Ketersediaan moda transportasi dari dan ke destinasi wisata	Moda transportasi dari dan ke Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari transportasi darat (khusus wisatawan dari Kota Tual), laut dan udara. Jalur laut masih memanfaatkan Pelabuhan Namngil Vovo yang terletak di Kota Tual. Tersedia tiga armada penerbangan yaitu Trigana Air, Wings Air dan Merpati Airlines dengan jalur masuk dari Ambon, Dobo dan Saumlaki.
3.	Amenitas	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung	- Di kawasan pantai Ngurbloat tersedia bungalow sebanyak lima unit yang dibangun oleh pemerintah daerah setempat dan beberapa prasarana milik masyarakat lokal yakni penginapan sebanyak tujuh buah, tempat hiburan

			<p>karaoke sebanyak tiga buah, warung sederhana sebanyak tigapuluh buah, dan tigabelas buah tempat duduk di pinggir pantai dan tempat parkir yang luasnya $\pm 3.925 \text{ m}^2$.</p> <ul style="list-style-type: none">- Di kawasan pantai Ngursarnadan tersedia bungalow sebanyak dua unit yang dibangun oleh pemerintah daerah setempat dan beberapa prasarana milik masyarakat lokal yakni warung sederhana sebanyak lima buah, tiga buah <i>cottage</i>, dan tempat duduk di pinggir pantai sebanyak tigabelas buah.- Di kawasan pantai Nadiun Ohoidertawun tersedia bungalow sebanyak satu unit yang dibangun oleh pemerintah daerah setempat dan tiga unit milik masyarakat lokal juga terdapat warung sederhana milik masyarakat lokal sebanyak dua buah.- Di kawasan pantai Elomel tersedia satu unit panggung, satu unit gazebo dan satu unit rumah payung yang dibangun oleh pemerintah daerah pada tahun 2009 dan prasarana lainnya seperti rumah makan terapung, tujuh unit rumah payung milik keluarga besar.- Di kawasan pantai Daftel tersedia prasarana milik masyarakat lokal yakni sembilan unit gazebo yang disewakan kepada
--	--	--	---

			<p>wisatawan dan enam buah warung makan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di kawasan objek wisata Goa Hawang tidak nampak satupun pembangunan prasarana wisata. - Belum ada rambu-rambu petunjuk arah menuju objek wisata Pantai Ngurbloat, Pantai Ngursarnadan, Pantai Nadiun Ohoidertawun, Pantai Elomel, Pantai Daftel, Pemandian Alam Evu, Goa Hawang, dan Taman Ziarah Bukit Masbait.
4.	Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata	Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata pada hari Minggu dan hari-hari biasa	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk objek wisata Pantai Ngurbloat, pada hari minggu jumlah pengunjung kira-kira mencapai 300 sampai 400 orang. Belum termasuk pengunjung yang datang setiap hari pada waktu sore hari yang mencapai 75 sampai 100 orang. - Untuk objek wisata Pantai Ngursarnadan, pada hari minggu jumlah pengunjung kira-kira mencapai 100 sampai 200 orang. Belum termasuk pengunjung yang datang setiap hari pada waktu sore hari yang mencapai 15 sampai 20 orang. - Untuk objek wisata Pantai Nadiun Ohoidertawun, pada hari minggu jumlah pengunjung kira-kira mencapai 50 sampai 100 orang. Belum termasuk pengunjung yang datang setiap hari pada waktu sore hari yang mencapai 10 sampai 15 orang.

			<ul style="list-style-type: none"> - Untuk objek wisata Pantai Elomel, pada hari minggu jumlah pengunjung kira-kira mencapai 50 sampai 75 orang. Belum termasuk pengunjung yang datang setiap hari pada waktu sore hari yang mencapai 5 sampai 10 orang. - Untuk objek wisata Pantai Daftel, pada hari minggu jumlah pengunjung kira-kira mencapai 100 sampai 250 orang. - Untuk objek wisata Pemandian Alam Evu, pada hari minggu jumlah pengunjung kira-kira mencapai 300 orang. Belum termasuk pengunjung yang datang setiap hari pada waktu sore hari yang mencapai 50 sampai 100 orang. - Untuk objek wisata Taman Ziarah Bukit Masbait, pada hari minggu jumlah pengunjung kira-kira mencapai 100 sampai 200 orang. Belum termasuk pengunjung yang datang setiap hari pada waktu sore hari yang mencapai 10 sampai 20 orang.
5.	Faktor internal dan eksternal pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara	Faktor berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara	Faktor kelemahan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari: belum terbentuknya badan promosi pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara, belum ada regulasi pendukung investasi bidang pariwisata, belum adanya website Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku

			<p>Tenggara, terbatasnya sarana dan prasarana pariwisata, belum terkelolanya obyek wisata secara profesional, serta Database usaha pariwisata yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini (penjelasan masing-masing faktor telah dituangkan dalam BAB IV Temuan dan Pembahasan).</p>
--	--	--	---

Universitas Terbuka

Lampiran 8



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA
Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Ambon
Jl. Wolter Mongensidi Lateri, Ambon 97231
Telepon: 0911-361303, Faksimile: 0911-361304
Laman: ut-ambon@ut.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 813/UN31.51/LL/2012

Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Ambon, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa S2 Universitas Terbuka yang namanya *terlampir* sedang melaksanakan penelitian dan pengumpulan data untuk Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul tertulis pada lampiran ini pada kolom *judul TAPM sebelum BTR (Bimbingan Tesis Residensial) I*. Namun dalam kegiatan Seminar Proposal pada tanggal 15 dan 16 September 2012, ternyata ada perubahan judul atas saran pembimbingnya, sehingga judul proposalnya menjadi tertulis pada kolom **Judul TAPM setelah BTR I**.

Untuk itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu memberi ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk dapat mengumpulkan data /informasi sesuai kebutuhannya pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat keterangan ini diberikan, atas bantuan, dukungan dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ambon, 10 Oktober 2012

Kepala

Drs. Supartomo, C.B., M.Si
NIP.195210221982031002

- 2 -

NO	NAMA	NIM	JUDUL TAPM SEBELUM BTR 1	JUDUL TAPM SETELAH BTR 1
10.	Ridolf Marthen Waremra	017106565	Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kota Tual	<i>Tidak mengalami perubahan judul</i>
11.	Drs. Asril Umagap	016762681	Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Era Otonomi Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku	Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara
12.	Jan M. E. Tallaud, SH	016757199	Pengaruh Kepemimpinan Camat terhadap Kinerja Staf pada Kantor Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual	Analisis Gaya Kepemimpinan Camat (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual)
13.	Idris Taufik Ridwan	016757593	Analisis Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat (Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara)	Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Maluku Tenggara
14.	Muhammad Yusribau	016756362	Analisis Kinerja Pelayanan Publik di Bidang Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual)	Analisis Kinerja Pelayanan Publik di KUA Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual (Studi Kasus Pelayanan Pencatatan Nikah)
15.	Coce Lili Etwiory, SH	017094944	Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti MUSRENBANG di Kabupaten Maluku Tenggara	<i>Tidak mengalami perubahan judul</i>
16.	Eirene Florence Matmey, S.Hut	016760473	Kinerja Organisasi Publik (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara)	Analisis Kelembagaan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Maluku Tenggara (Studi Kasus BPKP2)
17.	Drs. Hi. Usman Toatubun	016762105	Efisiensi Pelayanan Publik Studi Kasus (Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap)	Kajian Efisiensi Pelayanan Publik (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Tual)
18.	Godlief Rahanra	016755955	Pengaruh Kemampuan dan Motivasi terhadap Kinerja Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara	<i>Tidak mengalami perubahan judul</i>

Lampiran 9



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Merdeka Raya Nomor 02 ☎ (0916) 21272 Langgur 97611 ☒

Langgur, 17 Oktober 2012.

Nomor : 070 / 148 / SIP/BKBPPM/2012
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. 1. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kab.Malra
2. Kepala Bappeda Kab.Malra
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kab.Malra
Masing-masing
di
Langgur.

Memperhatikan Surat Keterangan kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Nomor. 813 / UN31.51 / LL / 2012 tanggal 10 Oktober 2012 maka diberitahukan bahwa akan tiba di kantor saudara :

Nama : **Drs. Asril Umagap**
NIM : 016762681
Pekerjaan : Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik
Pascasarjana Universitas Terbuka
Maksud : Mengadakan penelitian
Judul Penelitian : “ **STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI
KABUPATEN MALUKU TENGGARA** “
Waktu : (1) Bulan (17 Oktober 2012 s/d 18 Nopember 2012)
Lokasi : Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Malra, Bappeda
Kab.Malra, Dinas PPKAD Kab.Malra.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah Penelitian, harus melaporkan diri kepada Kepala/Pimpinan Kantor / Instansi atau Camat apabila dilaksanakan di Kecamatan dan Kepala Ohoi apabila dilakukan di Ohoi.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat daerah setempat
4. Setelah selesai Penelitian dapat menyampaikan hasil Penelitian kepada Bupati Maluku Tenggara.

Demikian untuk diketahui dan kepada yang bersangkutan agar diberi bantuan data seperlunya.

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
KEPADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS

Drs. J. SIKTEUBUN
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19580307 199203 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (sebagai laporan) ;

Lampiran 10



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Merdeka Raya Nomor 02 ☎ (0916) 21272 Langgur 97611 ☒

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 184.a / SK.P/BKBPPM/2012

Bupati Maluku Tenggara cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di Langgur menerangkan dengan benar bahwa :

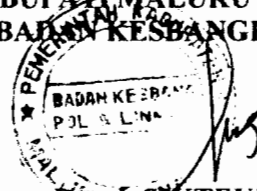
Nama : Drs. ASRIL UMAGAP
NIM : 016762681
Pekerjaan : Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dengan judul "*Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara*" pada Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tenggara, Kantor Bappeda Kabupaten Maluku Tenggara, Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sejak tanggal 18 Oktober s/d 11 Nopember 2012.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langgur, 13 Nopember 2012

**A.n. BUPATI MALUKU TENGGARA
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS**



DR. J. SIKTEUBUN
Pembina Tingkat I

NIP. 19580307 199203 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tenggara di - Langgur (sebagai laporan) ;
2. Direktur PPs-UT Tangerang Selatan di Tangerang Selatan ;
3. Kepala UPBJJ Ambon di Ambon
4. Yang bersangkutan ;
5. Peringgal.

Lampiran 11

BIODATA PENELITI

Nama/NIM : Drs. Asril Umagap/016762681

Tempat dan Tanggal Lahir : Ambon, 28 Mei 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Anggota Keluarga : - Istri: Jeny Mandak, S.Pi
- Anak: 1. M. Iman Fatardha Umagap
2. M. Fayad Zukhruf Umagap
3. Idlan Athar Umagap

Alamat Rumah dan Telp. : Jalan Mujair Perumnas Blok IV RT. 004
RW. 006 Kelurahan Ohoijang Watdek
Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku
Tenggara.

No. Hp. : 081343476399

Alamat E-mail : umagap_asril@yahoo.com

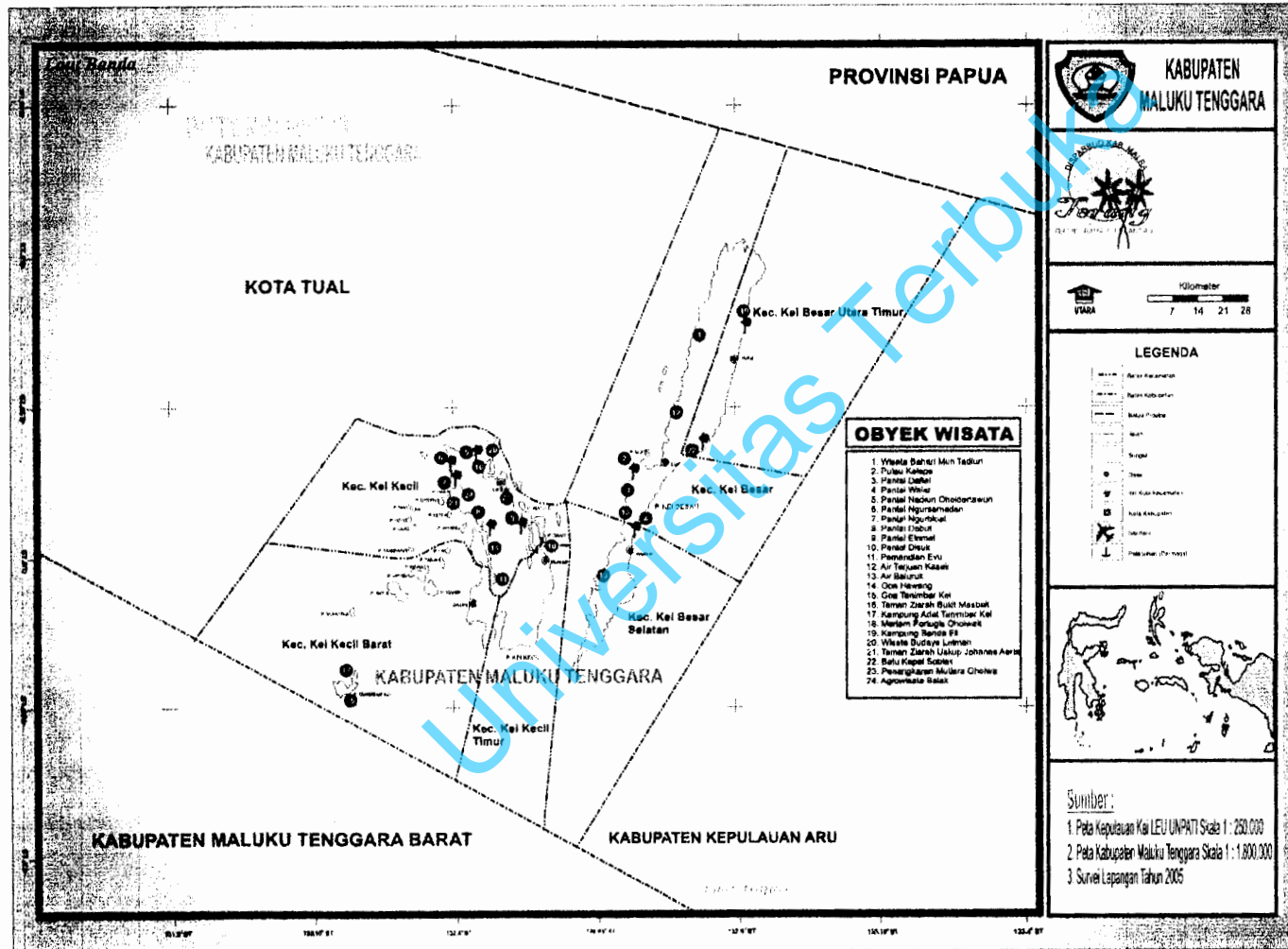
Pengalaman Pendidikan : - SD Negeri XIX Ambon Lulus Tahun 1988
- SMP Negeri 2 Ambon Lulus Tahun 1991
- SMA Negeri 1 Ambon Lulus Tahun 1994
- STPDN Lulus Tahun 1998
- S1 IIP Lulus Tahun 2002

Pengalaman Pekerjaan : Awal karir dimulai pada tahun 1998 dengan diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Pengembangan Karier Pegawai pada Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Maluku Tenggara. Pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Lingkungan Hidup, Pemukiman dan Prasarana Wilayah pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Maluku Tenggara dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris KORPRI Kabupaten Maluku Tenggara.

Tual, 21 Januari 2013

Peneliti,

Drs. Asril Umagap



**PETA POTENSI WISATA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

Lampiran 12